

**MODEL KOMUNIKASI ISLAMI PEMERINTAH DALAM
MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DI KOTA TANJUNG BALAI**

Disertasi

Oleh :

WARIS

4004213035

**PROGRAM STUDI
S3 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

2024

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul

MODEL KOMUNIKASI ISLAMI PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KOTA TANJUNG BALAI

Oleh

WARIS

NIM. 4004213035

Dapat disetujui dan disahkan untuk diujikan pada Sidang Pendahuluan Disertasi
guna memperoleh gelar Doktor (Dr) pada prodi Komunikasi Penyiaran
Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 05 Februari 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Lahmuddin, M,Ed
NIDN 20110462201

Pembimbing II



Dr. Mailin, M.A
NIDN 2007097701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Telp. 0615683-602792 Fax. 615683 Medan Estate 20371
Situs: www.fdk.uinsu.ac.id, email: fdk@uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul “ Model Komunikasi Islami Balai Pemerintah Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Tanjungbalai ” a.n. Waris, NIM. 4004213035. Telah diujikan dalam seminar hasil Disertasi Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, pada Hari Jumat, tanggal 29 Januari 2024

Disertasi ini telah diperbaiki dan diterima sebagai syarat untuk mengajukan permohonan sidang pendahuluan Disertasi.

Medan, 05 Februari 2024
Panitia Seminar Hasil Disertasi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Dr. Elfi Yanti Ritonga M.A
NIDN. 2025028501

Sekretaris

Prof. Dr. Zainal Arifin Lc. MA
NIDN. 2001106901

Pembimbing I

Prof. Dr. Lahmuddin, M.ed
NIDN. 20110462201

Pembimbing II

Dr. Mailin, M. A
NIDN. 2007097701

Penguji I

Prof. Dr. Hasan Sazali, MAg
NIDN. 2022027604

Penguji II

Dr. Hasnuz Zuhari Ritonga M.A
NIDN. 2007087404

Mengetahui:
Ka. Prodi S3 KPI
UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Zainal Arifin Lc, MA
NIP. 196910012000031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARIS
Nim : 4004213035
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Disertasi : Model Komunikasi Islami Pemerintah Dalam
Membangun Moderasi Beragama Berbasis
Kearifan Lokal Di Kota Tanjung Balai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil plagiasi, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima

Medan, 25 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



WARIS
NIM. 4004213035

ABSTRAK

Nama	: WARIS
NIM	: 4004213035
Fak. Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Pembimbing/Promotor I	: Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
Pembimbing/Promotor II	: Dr. Mailin, M.A
Judul Disertasi	: Model Komunikasi Islami Pemerintah Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Tanjung Balai

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi pemerintah dalam membangun moderasi beragama di Kota Tanjung Balai, Penelitian ini dianggap penting kerna sejarah kota Tanjungbalai sebagai kota religius yang memiliki sikap toleransi cukup baik, belakangan menjadi salah satu kota ter in-toleran sejak peristiwa pembakaran rumah ibadah pada tahun 2016. Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data di analisis menggunakan analisis data kualitatif, analisis yang dilakukan secara berkesinambungan mulai pengumpulan data sampai penelitian selesai . Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tanjung Balai memiliki sikap toleransi yang cukup baik saat ini. Hal ini dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang saling menghargai, dan masih memegang teguh kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Kota tanjungbalai. Moderasi beragama dapat di pahami kepada masyarakat melalui kearifan lokal yang telah ada seperti pesta rakyat (pesta Korang), tradisi songgot, menghargai saudara semarga, dan beberapa keraifan lokal lainnya. Pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat melalui Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat, FKUB, Tokoh Agama, serta Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Moderasi Beragam melalui Kampung Moderasi Beragama Kota Tanjungbalai. Penelitian ini memberikan bukti bahwa dalam kearifan lokal masyarakat terdapat 4 indikator Moderasi Beragama, sehingga pemahaman Moderasi Beragama akan lebih mudah bagi masyarakat jika dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal yang ada.

Keywords: Moderasi, Beragama, Kearifan, Lokal

ABSTRACT

Name : Waris
NIM : 4004213004
Faculty : Islamic Communication and Broadcasting
Promoter I : Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed
Promoter II : Dr. Mailin, M.A
Dissertation Title : Government Communication in Building Religious Moderation Based on Local Wisdom Values in Tanjungbalai City

This research aims to see how government communication in building religious moderation in Tanjung Balai City. This research is considered important because the city of Tanjungbalai has a history of intolerance cases, so this city is dubbed as one of the intolerant cities. Tanjung Balai City historically has local wisdom that can be used as an instrument of religious moderation in the city of Tanjungbalai. This study used qualitative research methods with a phenomenological approach. The data collection techniques used in this article are observation, interviews and documentation. Then, the collected data will be analyzed. Then, the collected data will be analyzed using qualitative research analysis. The results showed that the city of Tanjung Balai is currently rich in ethnic and religious diversity. This city is unique in the cultural context because there are several societies that still adhere to animism and dynamism. There are also some local wisdom that can be maximized in degrading intolerance by putting aside differences through local wisdom. So far, the government has socialized local wisdom as an instrument of religious moderation but the success indicators are still immeasurable. At this level, the government has an obligation to collaborate and bring synergy with the community to degrade religious issues in the city of Tanjung Balai.

Keywords: Government Communication, Religious Moderation, Local Wisdom

ملخص البحث

الاسم : وارث
رقم التسجيل : ٤٠٠٤٢١٣٠٠٤
المسلك : الاتصال والإذاعة الإسلامية
المشرف / المروج الأول : الأستاذ الدكتور لحم الدين ، م. إد
المشرفة / المروجة الثانية : الدكتورة مايلين ، ماجستير
عنوان الأطروحة : الاتصال الحكومي في بناء التوسط الديني القائم على القيم المحلية

في مدينة تانجونج بالاي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية الاتصال الحكومي في بناء التوسط الديني وتسامحه في مدينة تانجونج بالاي. يعتبر هذا البحث مهماً لأن مدينة تانجونج بالاي لها تاريخ من التعصب حتى يلقبها بـ "مدينة التعصب" (*Intolerance's city*). تتمتع مدينة تانجونج بالاي تاريخياً بقيم محلية التي يمكن استخدامها في أدوات التوسط الديني فيها. تناول هذا البحث منهج الأساليب النوعية مع نهج الظواهر (*Qualitative method with phenomenological approach*). وأما طريقة تحليلها بنموذج الوصفي بخطواتها الثلاثة: التصنيف، العرض، واستنتاج البحث وبعد ذلك سيتم تحليل البيانات باستخدام تحليل البحث النوعي.

تناول الباحث نتائج البحث لهذه الأطروحة بأن تكون مدينة تانجونج بالاي فيها القبائل والأديان المتنوعة ولها فريدة ثقافية بوجود الروحانية والديناميكية. وهناك أيضاً القيم المحلية التي تستخدمها الحكومة لإضعاف التعصب من خلال إخفاء الخلافات بالقيم المحلية فحسب.

و قامت الحكومة حالياً بالتنشئة الاجتماعية مع استعمال القيم المحلية في الوسائل قيم ديني حيث كان مؤشرات النجاح لا يزال قابلة للقياس. وعلى هذا المستوى، لازم على الحكومة بالتعاون واللاتفاق مع المجتمع لتدهور المشاكل الدينية في مدينة تانجونج بالاي.

الكلمات الأساسية : القيم المحلية التوسط الديني، الوعي الديني

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah Swt., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah memberi petunjuk jalan kebenaran.

Disertasi ini berjudul “ **Model Komunikasi Islam Pemerintah dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Tanjung Balai** , diajukan sebagai tugas akhir dan sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dalam penyelesaian disertasi ini, penulis sangat menyadari banyak kendala yang dihadapi, namun berkat kerja yang maksimal dan bantuan serta doa dari berbagai pihak, akhirnya disertasi ini dapat juga diselesaikan. Dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus dan mendalam pertama sekali kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Alm. Tholib dan ibunda Almh.Naswen yang telah membesarkan dan mendidik penulis, serta kepada Mertua alm Salman Haitami dan ibu Mertua almh Salmah semoga ini menjadi amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya bagi mereka. Juga kepada keluarga besar yang turut membantu baik moril maupun materil. Mudah-mudahan Allah Swt. membalaskan kebaikan mereka dengan berlipat ganda dan dimudahkan segala urusannya.

Begitu juga kepada semua pihak, baik perorangan maupun lembaga yang ikut berjasa dalam proses penyelesaian studi saya ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr Nurhayati, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Hasan Sazali, M.A., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk belajar dan menggali ilmu sekaligus

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin, M.ed., selaku pembimbing/promotor I yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis dalam rangka penyelesaian disertasi berupa masukan, arahan, dan sebagainya. Mudah-mudahan segala masukan yang telah diberikan menjadi amal dan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan khususnya ilmu komunikasi Islam.
4. Ibu Dr. Mailin, M.A., selaku pembimbing/promotor II yang telah banyak memotivasi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian studi dan disertasi ini. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi amal *jariyah* dan diberi pahala oleh Allah Swt. dengan berlipat ganda.
5. Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin, LC, M.A, dan bapak Dr. Fahrur Rozi, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yang telah membantu dan memberikan pelayanan di Prodi dalam penyelesaian studi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yang telah mencurahkan ilmunya sehingga penulis mendapat bekal dalam menyelesaikan disertasi ini.
7. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan administrasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian disertasi ini. Mudah-mudahan Allah Swt. memberikan kemudahan terhadap segala urusan mereka di dunia ini

9. Teristimewa kepada Istri Fatiah Haitami dan anak-anak tercinta Hilda Aulia Fatwa, Nursalimah Isnaina Fatwa, M. Syaifullah Fatwa serta yang telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa disertasi ini masih terdapat kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kontribusi yang konstruktif demi kesempurnaannya.

Medan, Maret 2024

Peneliti

Waris

4004213035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PANDUAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Fokus Masalah	14
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Batasan Istilah	17
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	27
A. Moderasi Beragama	27
B. Kearifan Lokal	46
C. Model Komunikasi.....	53
D. Komunikasi Islam	71
E. Teori Komunikasi Interkultural.....	77
F. Teori Komunikasi Pembangunan.....	82
G. Penelitian Terdahulu	87
H. Kerangka Berpikir Peneliti.....	100
BAB III METODE PENELITIAN	102
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	102
B. Tempat dan Waktu Penelitian	103
C. Informan Penelitian.....	104
D. Sumber Data.....	105
E. Teknik Pengumpulan Data	106
F. Instrumen Pengumpulan Data	110
G. Teknik Analisis Data.....	111
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	113
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	115
A. Temuan Umum.....	115
1. Sejarah Kota Tanjung Balai	115
2. Keadaan Penduduk Kota Tanjung Balai.....	123

B. Temuan Khusus.....	130
1. Komunikasi Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam membangun Moderasi Beragama	130
2. Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Moderasi Beragama di Kota Tanjung Balai.....	148
3. Peluang dan Tantangan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Tanjung Balai	171
C. Pembahasan.....	175
 BAB V PENUTUP	197
A. Kesimpulan	197
B. Saran.....	198
DAFTAR PUSTAKA	201
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Etika Komunikasi dalam Alquran.....	76
Tabel 2. Penelitian Terdahulu yang relevan.....	97
Tabel 3. Perkiraan Penelitian.....	104
Tabel 4. Informan Penelitian.....	105
Tabel 5. Kuantitas Penduduk.....	124
Tabel 6. Kecamatan dan Penduduk Kota Tanjung Balai.....	125
Tabel 7. Klasifikasi Kearifan Lokal Kota Tanjung Balai.....	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visualisasi jaringan artikel mengenai moderasi beragama.....	10
Gambar 2. Visual Densiry mengenai moderasi beragama.....	11
Gambar 3. Kerangka Pikir Peneliti.....	100
Gambar 4. Model Miles dan Huberman.....	112
Gambar 5. Penggunaan Triangulasi.....	113
Gambar 6. Peta Kota Tanjung Balai.....	115
Gambar 7. Lambang Kota Tanjung Balai.....	118
Gambar 8. Kota Tanjung Balai pada tahun 1930-an (Udara).....	119
Gambar 9. Pelabuhan Tanjung Balai di masa Hindia Belanda Tahun 1917.....	120
Gambar 10. Kantor perusahaan Guntzel & Schumacher di jl. Heerenstraat di Tanjungbalai tahun 1917.....	121
Gambar 11. Demografi Pemeluk Agama.....	126
Gambar 12. Data Agama Islam, Protestan, Khatolik , Hindu.....	128
Gambar 13. Peresmian Rumah Moderasi Beragama Tahun 2022.....	146
Gambar 14. Forum Partisipatif.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beranekaragam. Keanekaragaman ini ditandai dengan berbagai kesatuan sosial yang terbentuk berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya dan agama (Rozak, 2008). Keanekaragaman masyarakat Indonesia ini merupakan sebuah anugerah tak ternilai dari Yang Maha Kuasa. Namun, keanekaragaman bangsa ini akan membawa kebaikan jika dapat dijaga, akan tetapi keanekaragaman ini akan membawa bencana, jika tidak dapat dijaga. Keanekaragaman ditengah kemajuan teknologi akan sangat rentan dengan perselisihan, dan konflik, serta beraneka problematika sosial dan agama jika tidak dijaga dengan baik. Problematika sosial dan beragama yang terjadisaat ini di Indonesia tidak hanya mencakup batas-batas eksternal antar umat beragama, namun juga dalam batas internal umat seperti saling mengkafirkan, klaim kebenaran dan perundungan sesama pemeluk agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih rentan dengan konflik dan intoleransi antar umat beragama.

Di sini terlihat bahwa kemajemukan bangsa Indonesia baik dari segi agama, budaya, bahasa juga suku, yang telah disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, tetap rentan dengan gesekan-gesekan dan konflik. Keberagaman agama dan keyakinan bangsa Indonesia sejatinya menjadikan bangsa ini sebagai mercusuar peradaban dunia karena memiliki kekayaan nilai budaya luhur yang lebih efektif untuk membangun komunitas berperadaban tinggi dengan memproyeksi sikap

hormat kepada kemanusiaan Tanjungbalai merupakan salah satu daerah di Indonesia wilayah Sumatera Utara dengan masyarakat yang beranekaragaman, namun dikenal sebagai daerah dengan Budaya Melayu. Keberagaman budaya yang dimiliki kota ini merupakan cerminan dari negara Indonesia yang beranekaragam. Tanjungbalai diawal berdiri dikenal sebagai sebuah kota religius dan memiliki sikap toleransi yang baik, saling menghargai antar umat beragama, dan antar suku, belakangan berubah menjadi salah satu kota ter in-toleran di Indonesia bahkan dunia. Hal ini dikarenakan peristiwa yang terjadi di Kota Tanjungbalai yang tepatnya di Masjid Al-Maksum di Jl. Karya Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2016 konflik yang dimulai dari seorang yang bernama Meliana yang berbicara kotor terhadap jamaah Masjid Al-Maksum ketika itu yang mengakibatkan umat Islam marah karena dianggap menghina agama Islam saat Meliana tidak tahan mendengarkan suara adzan di Masjid Al-Maksum. Akibat peristiwa ini terjadilah pembakaran Vihara dan Klenteng pada tahun 2016. (bbc.com/indonesia/berita_2016/07/16). Berdasarkan peristiwa ini Kota Tanjungbalai dinobatkan sebagai kota ter intoleran.

Pada dasarnya, kota Tanjung Balai yang multietnis, multikultural dan multireligi harusnya memiliki masyarakat yang memaklumi serangkaian perbedaan yang ada. Keberagaman yang ada di Kota Tanjung Balai seharusnya dapat dijadikan sebagai kekuatan dan dihindarkan dalam konteks *Bhinneka Tunggal Ika*. Ditinjau dari segi historis, Kota Tanjung Balai merupakan wilayah dengan corak kerajaan melayu Asahan dan dalam sistem sosialnya memunculkan beragam akulturasi budaya terutama dari Batak Toba dan Melayu sehingga

memunculkan keunikan identitas dalam konteks kearifan lokal (Mailin, 2017). Sangat disayangkan apabila kehidupan masyarakat yang harmonis dengan kearifan lokal yang ada selama ini, tidak dapat dioptimalkan pemerintah sebagai instrument dalam menerapkan moderasi beragama di kota Tanjungbalai..

Sementara di beberapa wilayah lain krisis toleransi masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Hasil survey Wahid Institute tentang intoleransi pada tahun 2021 mengerucut pada angka 54% yang meningkat 8% dari tahun sebelumnya (Media Indonesia, 2022). Isu sensitifitas agama sering terjadi di Indonesia dan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti disharmonisasi, intoleransi, budaya transnasional, fanatisme dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, Hal ini dapat dilihat dari beragam fenomena seperti pembakaran Vihara dan Klenteng di Kota Tanjungbalai (2016), biksu dilarang beribadah di Tangerang (2018), pembubaran paksa gereja di Yogyakarta (2017), dan lain sebagainya. Kasus-kasus di atas menandakan bahwa bangsa Indonesia masih minim toleransi.

Dengan kondisi keberagaman dan potensi konflik sosial dalam masyarakat tersebut maka peran strategis pemerintah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa agar menjadi lebih baik. Pemerintah yang dalam hal ini, baik Kementerian Agama sebagai leading sektor keagamaan masyarakat maupun pemerintah kota suatu daerah, diharapkan mampu memposisikan diri di tengah-tengah keragaman tersebut. Sifat dalam menengahi hal tersebut dilandasi dengan mewujudkan moderasi beragama. Setidaknya, ada tiga tantangan kehidupan keagamaan yang dihadapi saat ini.

Pertama, berkaitan dengan menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Cara beragama ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga berusaha membangun ulang Indonesia menjadi sebuah negara eksklusif yang hanya dimiliki kelompok tertentu.

Pada 2012, CSIS melakukan survei nasional. Dari 1.200 total responden, ditemukan bahwa 33,4% tidak mau bertetangga dengan orang yang berlainan agama; 25% tidak percaya kepada umat agama lain, dan 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya. Data-data di atas menunjukkan betapa kuatnya sikap keberagamaan eksklusif, sebuah sikap keberagamaan yang dibangun di atas hilangnya kepercayaan kepada kelompok lain, yang jika dibiarkan akan berujung pada tindakan penyingkiran kepada kelompok lain yang berbeda. (Kompas.com, 2012)

Kedua, berkaitan dengan tingginya angka kekerasan bermotif agama. Pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif pada akhirnya melahirkan berbagai praktik intoleransi dan kekerasan keagamaan yang menghancurkan dan mematikan. Setidaknya, sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, berbagai konflik sosial keagamaan muncul di berbagai wilayah seperti yang terjadi di Poso dan Ambon Pada 2002, peristiwa peledakan bom Bali yang menewaskan 202 orang. (Kementrian Kesehatan RI, 2022) Peristiwa ini disusul dengan peristiwa pengeboman Hotel J.W. Marriot Jakarta, dengan

korban 11 orang meninggal dan 152 mengalami luka serius (2003). Pada 2004, 5 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka berat karena ledakan bom di Kedutaan Besar Australia Jakarta. Setahun kemudian, bom terbesar kedua meluluh-lantakkan Kuta Bali dan menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Pada 2009, sepasang bom diledakkan di Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton Jakarta, dengan korban 7 orang meninggal dan 50 lainnya luka-luka.

Peristiwa kekerasan atas nama agama kembali terjadi. Pada 14 Januari 2016, salah satu jaringan ISIS di Indonesia melakukan serangan dengan senjata api dan meledakkan bom di Jalan Thamrin Jakarta dan mengakibatkan hilangnya nyawa 8 orang. Pada 2018, terjadi pengeboman di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan Markas Polrestabes Surabaya di tahun 2018. Pada akhirnya, di depan ideologi keagamaan yang tertutup, dipenuhi kebencian dan kekerasan ini, Indonesia dipertaruhkan.

Ketiga, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Atas nama agama, Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Indonesia dianggap sebagai berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Di sinilah, kita menemukan ideologi khilafah diajakan sebagai alternatif pengganti NKRI. Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, melakukan survei kepada siswa dan guru Pendidikan Agama

Islam (PAI) se-Jabodetabek. Hasilnya: 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan; 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam; 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom. Pada 2016, Jaringan GUSDURian melakukan pemetaan sosial media dan internet, di mana hasilnya adalah narasi keislaman dan keindonesiaan didominasi oleh pandangan keagamaan yang menganggap bahwa demokrasi Indonesia dianggap sebagai musuh Islam, maka ideologi yang harus dipeluk umat Islam adalah ideologi khilafah.

Perlu digaris bawahi, bahwa problematika beragama yang terjadi di Indonesia tidak hanya mencakup batas-batas eksternal. Intoleransi pada dewasa ini sudah menyentuh batas-batas internal seperti saling mengkafirkan, klaim kebenaran dan perundungan sesama pemeluk agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih gugup terhadap anugerah pluralisme yang diberikan oleh tuhan. Sejatinya, Indonesia adalah sebuah bangsa dimana masyarakat bercorak plural. Pluralitas tersebut ditandai dengan berbagai kesatuan sosial yang terbentuk berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya dan agama (Rozak, 2008).

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional setiap warga Negara. Undang-undang dasar 1945 pasal 28 E menegaskan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianutnya serta jaminan perlindungan dari Negara terhadap segala bentuk diskriminasi, yaitu: 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat

tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Jaminan yang diberikan negara terhadap kebebasan beragama warganya ditegaskan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 29 yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Pada umumnya, permasalahan agama di Indonesia dipicu oleh subjektivitas perbedaan. Dalam Taufani (Taufani, 2018), Gusdur mengemukakan bahwa banyaknya perbedaan justru memunculkan banyaknya perspektif sehingga pluralisme rentan akan sensitivitas. Oleh karena itu, dalam membenahi problematika agama harus dilakukan dengan pendekatan sosial dan budaya, bukan agama itu sendiri. Problematika heterogenitas menjadi isu yang mengkhawatirkan di Kota Tanjung Balai. Dilansir dari data Kota Toleran, indeks toleransi di Kota Tanjung Balai sangat rendah bahkan menjadi kota paling intoleran di Indonesia (Kota Toleran, 2018). Hal ini sangat disayangkan mengingat keberagaman yang berada di Kota Tanjung Balai sangat variatif dan dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam bermasyarakat.

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam mengenalkan moderasi beragama kepada masyarakat. Masyarakat yang multi-etnis dan multi-agama, kearifan lokal menyediakan landasan budaya dan moral yang kuat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama (Aksa & Nurhayati, 2020; Telaumbanua et al., 2023). Nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan

menghormati keberagaman yang tercermin dalam kearifan lokal dapat membantu mengatasi ketegangan antaragama dan mencegah konflik yang berbasis agama. Hal ini sangat penting dalam mengurangi potensi konflik dan kekerasan yang bisa timbul akibat perbedaan agama, sehingga mempromosikan perdamaian dan stabilitas sosial (Belwawin & Abineno, 2023).

Meski demikian, sangat lumrah terjadi isu intoleransi di tengah masyarakat yang heterogen. Pasalnya, semakin banyak perbedaan maka akan semakin banyak perspektif dalam menilai suatu kebenaran (Taufani, 2018). Sayangnya terdapat beberapa pokok penting dalam bersosial yang gagal diinternalisasi secara utuh bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam perspektif subjektif. Pencegahan intoleransi yang belum signifikan juga diduga kuat karena pesan-pesan subjektif. Pesan-pesan moderasi beragama seharusnya tidak boleh terlepas dari konteks sosial, sayanginya tidak sedikit pesan moderasi beragama samapai ke masyarakat yang salah menggunakan dalil-dalil agama tertentu.

Heterogenitas agama di Indonesia pada dewasa ini memunculkan tantangan dan konflik (Dewi et al., 2023). Perbedaan keyakinan seringkali menjadi sumber perselisihan dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik agama telah terjadi sepanjang sejarah, baik dalam skala kecil maupun besar, dan kadang-kadang bahkan memicu konflik bersenjata. Tantangan lain yang mungkin muncul adalah diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama, yang dapat mengancam hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa pengimplementasian moderasi beragama sangat urgen bagi bangsa Indonesia. Serangkaian problematika

intoleransi di Indonesia acapkali dilandasi oleh pemikiran agama yang dangkal. Padahal, seluruh agama yang eksis di Indonesia memiliki konsep moderasi agama yang tujuannya untuk menyatukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis.

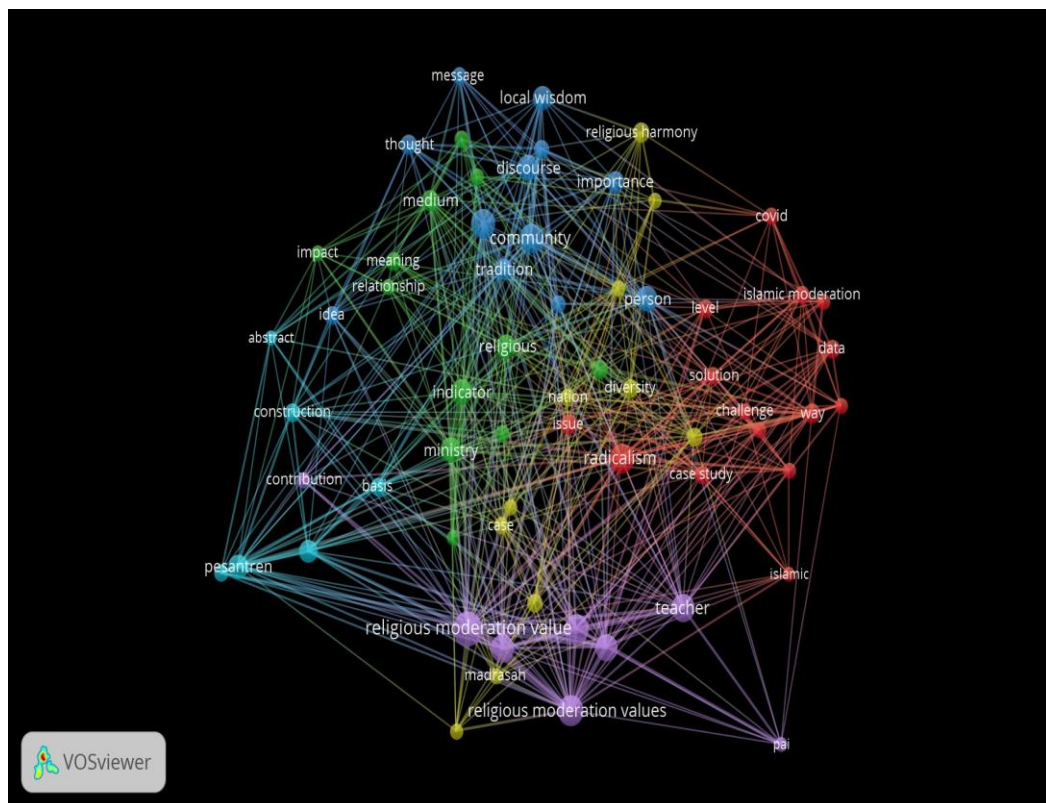
Selain itu, pengenalan dan pemahaman moderasi agama melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang kearifan lokal juga dapat membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik dalam mempromosikan pemahaman dan harmoni antaragama. Sehingga, urgensi kearifan lokal sebagai instrumen moderasi agama terletak pada potensi untuk menciptakan perdamaian, mengurangi ketegangan, dan membangun kedekatan sosial dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama.

Idealnya, sebagai bangsa yang selama ini menganut semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" kasus intoleransi dapat didegradasi secara optimal (Muhtadi, 2019). Heterogenitas merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Dalam menjaga dinamika heterogenitas dibutuhkan moderasi agama yang proporsional. Lebih dalam lagi, urgensi menjaga nilai-nilai sosial dan kemanusiaan harus menjadi pokok penting di samping keagamaan (Al-Mujtahid & Sazali, 2023). Dalam tataran ini, dibutuhkan kurikulum yang mumpuni agar menghapuskan isu-isu intoleransi.

Moderasi agama merupakan isu strategis yang mendalam dalam kehidupan agama di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya dan keberagaman agama. Keselarasan dan toleransi antarumat agama

menjadi fondasi penting bagi harmoni sosial di tengah keragaman tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus mengutamakan moderasi beragama sebagai landasan utama dalam menjaga ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.

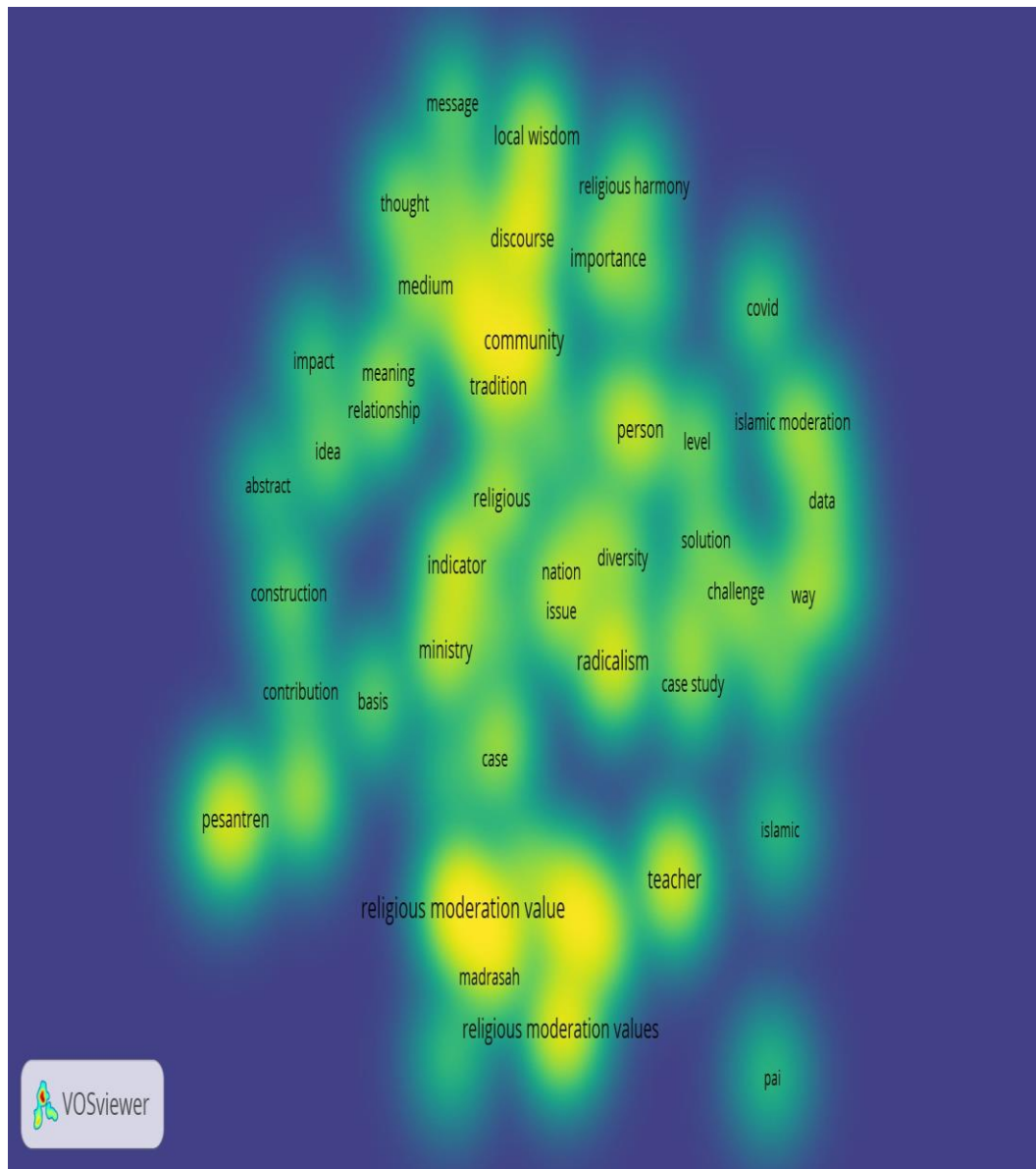
Untuk melihat gap penelitian dari disertasi ini, penulis menggunakan aplikasi *Publish or Perish* untuk mengumpulkan 1.000 artikel yang berkenaan dengan isu-isu moderasi beragama. Setelah terkumpul, penulis akan melakukan analisis menggunakan aplikasi *VosViewer* untuk memetakan gap penelitian. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Visualisasi jaringan artikel mengenai moderasi beragama

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bentuk jaringan yang membahas moderasi beragama cenderung tidak karuan. Hal ini menandakan banyaknya aspek yang diamati oleh peneliti terkait moderasi beragama.

Untuk melihat lebih jelasnya, peneliti akan melakukan *visual density* untuk menganalisis tema-tema yang seringkali muncul dalam penelitian mengenai moderasi beragama. Sebagai berikut :



Gambar 2.
Visual Density mengenai moderasi beragama

Melalui gambar di atas, tema yang seringkali dibahas terkait moderasi beragama adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan moral (*value*). Selanjutnya,

radikalisme (*radicalism*), komunitas (*community*) dan Kementrian Agama Republik Indonesia (*ministry*) menjadi salah satu tema yang cukup sering dijadikan sebagai objek penelitian. Kajian tentang kearifan lokal (*local wisdom*) juga terdapat dalam dalam penelitian walaupun jarang.

Urgensi dari penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal dalam penerapan konsep moderasi beragama untuk meningkatkan relevansi dan penerimaan oleh masyarakat setempat. Ketika pemerintah dan lembaga agama mengambil pendekatan dengan menghargai budaya dan tradisi lokal, mereka akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat setempat, moderasi beragama akan menjadi lebih autentik dan memiliki dampak yang lebih positif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik meneliti dengan judul : Model komunikasi Islami Pemerintah Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Tanjungbalai.”

B. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa permasalahan peneliti temukan dalam proses penelitian disertasi ini, sebagai upaya mengidentifikasi masalah serta membuat masalah tersebut menjadi lebih terukur.

1. Ketidakseimbangan Informasi: Masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai atau informasi yang seimbang tentang upaya pemerintah dalam membangun moderasi beragama berbasis nilai

kearifan lokal. Ini bisa menjadi masalah dalam membentuk pemahaman dan dukungan masyarakat.

2. Resistensi Masyarakat: Adanya resistensi atau ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun moderasi beragama. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman, perbedaan keyakinan, atau ketidaksukaan terhadap campur tangan pemerintah dalam hal agama.
3. Kekurangan Keterlibatan Masyarakat: Tidak adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan moderasi beragama. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.
4. Krisis Identitas: Potensi konflik identitas atau perasaan kehilangan identitas lokal dalam mengadopsi moderasi beragama. Pemerintah perlu memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap dihargai dan terjaga seiring dengan upaya moderasi beragama.
5. Komunikasi yang Tidak Efektif: Kemungkinan terjadinya komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya strategi komunikasi yang tepat, bahasa yang tidak sesuai, atau ketidakjelasan dalam menyampaikan pesan.
6. Kurangnya pemahaman Terhadap Kearifan Lokal: Kurangnya pemahaman atau kesadaran pemerintah terhadap nilai-nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai dapat menghambat keberhasilan inisiatif

moderasi beragama. Perlu adanya penelitian mendalam untuk memahami dan menghormati nilai-nilai setempat.

7. Tantangan Pluralisme Agama: Dalam konteks keberagaman agama, mungkin ada tantangan mengelola konflik atau ketidaksepakatan antarumat beragama. Pemerintah perlu membangun dialog yang inklusif dan mempromosikan kerukunan antaragama.
8. Perubahan Sosial: Perubahan sosial yang cepat atau dinamika perubahan masyarakat bisa menjadi tantangan. Hal ini dapat memunculkan ketidakpastian atau kebingungan di kalangan masyarakat terkait peran agama dalam konteks nilai kearifan lokal.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk merancang sebuah Model komunikasi yang efektif, melibatkan masyarakat secara aktif, serta memahami dengan baik dinamika kearifan lokal di Kota Tanjung Balai..

C. Fokus Masalah

Penulis melakukan analisis terhadap beberapa fenomena yang ada, dalam tataran ini terdapat beberapa fokus masalah yang diadopsi dari identifikasi masalah dalam disertasi ini , di antaranya adalah:

1. Kekurangan Keterlibatan Masyarakat: Ketidakpartisipan aktif masyarakat dalam upaya membangun moderasi beragama di Kota Tanjung Balai menjadi kendala utama. Minimnya keterlibatan dapat mengakibatkan perumusan kebijakan yang kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kekurangan ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan harapan

masyarakat, mengancam keberhasilan inisiatif moderasi beragama. Penting untuk mendorong partisipasi aktif melalui forum partisipatif dan mekanisme umpan balik, memastikan bahwa suara masyarakat diakui dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kearifan Lokal: Tantangan berikutnya terletak pada kurangnya pemahaman pemerintah terhadap nilai-nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. Tanpa pemahaman mendalam terhadap warisan budaya dan nilai-nilai setempat, kebijakan moderasi beragama dapat menjadi tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses keputusan, dan merespons dinamika budaya secara aktif guna memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan identitas lokal.
3. Komunikasi yang Tidak Efektif: Komunikasi yang tidak efektif merupakan hambatan serius dalam menjalankan upaya moderasi beragama. Jika pesan yang disampaikan oleh pemerintah tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Keterbatasan dalam gaya komunikasi atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks lokal dapat menghambat pemahaman. Pemerintah perlu memastikan bahwa pesan-pesan mereka disampaikan dengan jelas, menggunakan bahasa yang sesuai, dan mengakomodasi keberagaman budaya di Kota Tanjung

Balai untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan dukungan masyarakat terhadap moderasi beragama.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta focus penelitian, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan disertasi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Model komunikasi Pemerintah dalam membangun Moderasi Beragama di Kota Tanjung Balai?
2. Bagaimana menanamkan konsep moderasi beragama melalui kearifan lokal masyarakat Kota Tanjung Balai?
3. Bagaimana peluang dan tantangan Pemerintah dalam menanamkan konsep Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai?

E. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, penulis mengidentifikasi tujuan masalah yang menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Untuk menganalisis Model komunikasi Pemerintah dalam membangun Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai.
2. Untuk menganalisis penanaman konsep moderasi beragama melalui kearifan lokal masyarakat di Kota Tanjung Balai.

3. Untuk menganalisis peluang dan tantangan Pemerintah dalam menanamkan konsep Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai.

F. Batasan Istilah

Untuk mempermudah dan memperjelas pembaca dalam memahami tujuan dan pembahasan dalam disertasi ini serta menghindari ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas, maka terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan Batasa, antara lain:.

Judul disertasi "Model Komunikasi Islami Pemerintah Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Tanjung Balai" penelitian ini terbatas pada konteks Kota Tanjung Balai dan tidak melibatkan wilayah atau kota lain. Pembatasan ini dilakukan untuk mendalami dampak moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal secara khusus di kota ini.

1. Model Komunikasi Islami

Model adalah gambaran untuk ,menjelaskan dan menerapkan teori. Model juga diartikan sebagai sebuah teori yang disederhanakan, yang mampu menggambarkan suatu fenomena seserhana mungkin. Ardianto, dalam (Komunikasi Massa Suatu Pengantar : 2007) menyatakan bahwa model komunikasi adalah gambaran suatu proses yang dibutuhkan dalam terciptanya komunikasi.

Pengertian komunikasi menurut ahli (Hovlan) adalah ...
communication is the process by which an individual transmits stimuli usually verbal symbols to modify the behaviour of other individuals..”

(Komunikasi adalah proses di mana seorang individu memindahkan secara terus menerus simbol verbal untuk mengubah tingkah laku individu lain). Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Siporin, adalah “komunikasi sebagai proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi”. Sedangkan kata pemerintah sendiri menurut Pamudji (1985:22) berasal dari kata ”perintah” yang mengandung makna menyuruh, melaksanakan dan melakukan sesuatu pekerjaan. Namun, tinjauan asal kata pemerintah sebenarnya berasal dari kata Inggris, yaitu Government yang sudah biasa diterjemahkan sebagai ”pemerintah” dan ”pemerintahan” di Indonesia. Pengertian yang berkembang di lingkungan akademik tentang kata “Pemerintahan” ini tampaknya mempengaruhi perilaku aparatur pegawai negeri sipil karena makna yang dipahami terkait dengan nomenklatur kata “Pemerintahan” tersebut “Pemerintahan” adalah “kemampuan memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya kepada berbagai pihak”, karena suatu pengertian dari nomenklatur akan berpengaruh terhadap perilaku orang-orang yang memegang jabatan, dalam hal ini adalah “Aparatur Pemerintah”.

Konsep komunikasi menurut Harold D. Lasswell yang dikemukakan oleh Onong Uchjana (2001:10) bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah menjawab pertanyaan *who says* (siapa yang berbicara), *what* (apa yang dibicarakan), *in what*

channel (media apa yang dipakai), *to whom* (kepada siapa lawan bicara), dan *what effect* (efek yang ditimbulkan). Jadi berdasarkan konsep Laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Everett M. Rogers (dalam Cangara,2016:22) seorang pakar Sosiologi Pedesaan Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada studi riset komunikasi mendefinisikan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada seorang penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Hovlan,Janis and Kelley (dalam Roudhonah,2019:23) bahwa komunikasi bertujuan untuk merubah atau membentuk perilaku orang lain (masyarakat).

Definisi komunikasi telah dijelaskan di atas yaitu proses seseorang (komunikator) menyampaikan pesan dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku-perilaku orang lain (khlayak). Proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian (*mutual understanding*) antara kedua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi.

Sedangkan arti Islam secara etimologi adalah tunduk, patuh dan damai. Menurut Al Jurjani (dalam Hefni,2017:7) bahwa Islam adalah kerendahan dan ketundukan terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Saw. Sedangkan menurut Yatimin Abdullah (2006:7), Islam mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt. bukan berasal dari manusia.

Islam secara terminology, Amin Syukur (2004:93) mendefinisikan bahwa Islam adalah ad Din yaitu titah Tuhan yang diturunkan melalui para nabi-Nya untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia yang mempunyai akal sehat untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akherat. Harjani Hefni (2015:10) mendefinikan Islam sebagai kumpulan seluruh nilai yang diturunkan Allah Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia baik hukum akidah, akhlak, ibadah, muamalah serta berita-berita yang disebutkan Alquran dan As Sunah.

Dari penjelasan singkat tentang Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam adalah ketundukan terhadap keseluruhan nilai yang terkandung dalam Alquran dan As Sunah baik berupa hukum, akidah, akhlak, muamalah maupun berita atau kisah-kisah masa lampau. Dari pengertian komunikasi dan Islam di atas, komunikasi Islam didefinisikan sebagai suatu proses menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaidah komunikasi yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perantaraan media atau tidak, yang bertujuan untuk membentuk pandangan umum yang benar berdasarkan hakikat kebenaran agama. Proses penyampaian pesan dengan berpegang teguh pada prinsi-prinsip Alquran dan Hadits berarti komunikator dalam menyampaikan pesan harus berprinsip pada keikhlasan, kejujuran, kebenaran, selektif dan valid dan mengedepankan keseimbangan berita

(Niland et al., 2020).

Dengan demikian bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan (khalayak) tidak hanya dinilai sebagai aktivitas muamalah, hubungan antara manusia belaka, tetapi juga dengan Tuhannya. Konsep inilah menjadi landasan pokok komunikasi Islam dan hal itulah yang membedakan antara konsep komunikasi secara umum dengan konsep komunikasi Islam.

Konsep komunikasi Islam tersebut diperkuat oleh perspektif bahwa Islam merupakan agama yang bersifat *mission* (dakwah) yang mendesak penganutnya agar menyebarkan pesan-pesan Islam kepada seluruh umat manusia. Setiap individu muslim dianggap sebagai komunikator agama dimana mereka diwajibkan menyampaikan pesan-pesan Islam berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing. Tanggung jawab ini membuat tugas komunikasi menjadi penting, bahkan diperlihatkan oleh Nabi Muhammad Saw. yang memerintahkan agar setiap muslim menyampaikan pesan dari beliau walaupun hanya satu ayat. Simbolis satu ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya kebenaran ajaran agama untuk disampaikan dengan efektif berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang digariskan oleh Alquran dan Hadits (Niland et al., 2020).

Komunikasi Islami adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip komunikasi dengan nilai-nilai Islam. Teori ini menekankan pada pentingnya kejujuran, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesantunan dalam berkomunikasi. Selain itu, konsep-konsep komunikasi kenabian

turut menjadi bagian integral dari teori ini, menjadikan komunikasi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai dalam tataran sosial (Faridah et al., 2023).

Dari penjelasan diatas, bahwa komunikasi Islam yang di pakai dalam judul disertasi ini adalah komunikasi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam yang memandang proses komunikasi bukan hanya sebatas hubungan antara manusia tetapi lebih juga hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bernilai ibadah.

2. Komunikasi pemerintah

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari kontek komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (sharing ideas), instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan (feelings) (Malone, 1997).

Komunikasi pemerintahan eksternal pada hakekatnya merupakan proses penyebaraninformasi dan penerimaan informasi oleh pemerintah kepada dan dari publik. Informasi yangdisebar oleh pemerintah kepada publik disebut informasi publik (public information) sedangkaninformasi

yang diterima pemerintah dari publik disebut public opinion. Oleh karena yang disebar adalah informasi publik maka komunikasi pemerintahan kadang-kadang disebut komunikasi publik (public communication) dan karena informasi publik yang disebar berupa kebijakan maka komunikasi pemerintahan juga disebut komunikasi kebijakan (Dunn, 1998).

Komunikasi pemerintah dalam penelitian ini difokuskan pada peran dan strategi komunikasi yang diadopsi oleh pemerintah setempat. Sementara interaksi dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya bisa diakui, penelitian ini tidak akan mengeksplorasi komunikasi dari perspektif non-pemerintah.

3. Moderasi Beragama:

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun

ketika berhadapan dengan institusi negara. . Artinya, pada tataran teologis, setiap orang berhak dan bahkan seharusnya meyakini kebenaran agamanya, tetapi pada saat yang sama (pada tataran sosiologis) memahami bahwa orang lain pun memiliki keyakinan terhadap ajaran agama mereka, karena keyakinan adalah wilayah yang sangat subjektif, wilayah hati. Pandangan orang akan menganggap apa yang ada dan dekat pada dirinya paling baik, tetapi tidak perlu dirisaukan kalau orang lain memandang lain (Rahman & Noor, 2020). Moderasi beragama dalam penelitian ini cara pandang sikap beragama individu dan kelompok dalam masyarakat dengan penekanan pada bagaimana pemerintah memfasilitasi dialog dan mempromosikan sikap saling menghormati antarumat beragama. Aspek-aspek lain dari moderasi beragama, seperti pengaturan kebebasan beragama, bisa diperlakukan secara tangensial tetapi tidak menjadi fokus utama.

4. Nilai Kearifan Lokal:

Pemahaman nilai kearifan local dimaknai sebagai bagian dari budaya suatu masyarakat . Menurut A.S.Padmanugraha dalam "Common Sense Outlook on Local Wisdom and Identity: A Contemporary Javanese Natives" (2010) menuliskan, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri.

Kearifan lokal ini diwariskan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui cerita dari mulut ke mulut oleh masyarakat.

Suatu masyarakat tertentu bisa menemukan suatu pengetahuan yang kemudian disebut bagian dari kearifan lokal melalui pengalaman. Mereka kemudian mengintegrasikan temuan itu dengan pemahaman terhadap budaya atau keadaan alam di sekitarnya.

Nilai kearifan lokal dalam penelitian membatasi penekanannya pada nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan konteks Kota Tanjung Balai. Nilai-nilai tersebut dapat mencakup adat, tradisi, norma-norma sosial, dan nilai-nilai lokal lainnya yang berperan dalam memoderasi praktik keagamaan.

Batasan-batasan ini membantu memfokuskan penelitian disertasi ini pada aspek-aspek yang paling relevan dan signifikan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang Model komunikasi pemerintah dalam membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai.

G. Sistematika Pembahasan

- Bab I** : Pada bab ini peneliti akan menguraikan secara keseluruhan mengenai latarbelakang permasalahan penelitian dan pendahuluan yang menggambarkan adanya kesenjangan antar harapan dan kenyataan. Kemudian membatasi masalah, rumusan masalah, focus masalah, serta tujuan, batasan istilah dan sistematika pembahasan.
- Bab II** : Pada bab ini penulis akan memberikan landasan-landasan berpikir, teori-teori yang relevan dalam penelitian ini

menggunakan teori Moderasi Beragama, teori komunikasi Pembangunan, Teori komunikasi Islam, teori interkultural dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan tema penelitian serta kerangka berpikir peneliti.

- Bab III** : Pada bab ini penulis akan mengkonstruksikan langkah-langkah Metode Penelitian, pendekatan, dan sistem pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat mengarah kepada hasil yang substantif dan konstruktif.
- Bab IV** : Pada bab ini peneliti membahas hasil temuan penelitian, mulai deskripsi wilayah penelitian, dan temuan temuan khusus terkait Moderasi Beragama di Kota Tanjungbalai akan memaparkan data yang peneliti dapat dan dikonstruksikan dalam bentuk hasil dan pembahasan.
- Bab V** : Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran saran yang konstruktif.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Moderasi Beragama

Moderasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki arti yaitu penjaualan dari keekstreman atau pengurangan kekerasan (KBBI, n.d.). Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal sebagai *tawassuth* (tengah), *i'tidal* (adil), serta *tawazun* (berimbang). Individu yang mengamalkan prinsip *wasathiyah* dapat diartikan sebagai “pilihan terbaik.” Adapun kata yang digunakan, mengarah kepada arti yang sama, yakni adil, berarti dalam hal ini yaitu memilih posisi tengah diantara berbagai pilihan-pilihan ekstrem (Kementerian Agama RI, 2019).

Kata Moderasi sendiri berasal dari kosakata bahasa Inggris yaitu *moderation*, artinya adalah sikap tengah dan atau sikap tidak berlebihan. Sehingga orang yang moderat mampu menerima perbedaan yang ada, dan percaya bahwa berbeda bukan berarti permusuhan, namun perbedaan adalah suatu keniscayaan yang indah. Menurut Abuddin Nata profesor bidang pengkajian Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Allah menerangkan bahwa Dia mengharuskan hamba-hamba-Nya berlaku adil, yaitu bersifat tengah dan seimbang di dalam semua aspek kehidupan beserta melaksanakan perintah yang tertuang di al-Quran dan berbuat *ihsan* (keutamaan). Adil berarti wujud kesamaan dan keseimbangan antara hak kewajiban. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak diperbolehkan dikurangi disebabkan adanya kewajiban (Nata, 2014).

Moderasi beragama wajib dipahami sebagai sikap agama yang sejalan antara penghormatan teruntuk praktik agama individu lainnya yang beragam keyakinan (inklusif) dan pengamalan agama sendiri (eksklusif). Dikarenakan moderasi beragama adalah kunci dari wujud kerukunan, perdamaian, toleransi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi adalah sikap kebajikan yang membantu tercipta keselarasan sosial dan keseimbangan di dalam kehidupan dan personal, di dalam keluarga dan masyarakat beserta hubungan antar manusia yang lebih luas (Azra, 2020).

Moderasi beragama adalah konsep yang penting dalam konteks masyarakat yang beragam dan kompleks. Ini merujuk pada pendekatan dalam menjalani agama yang menekankan nilai-nilai toleransi, kerukunan, penghargaan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap ekstremisme atau fanatisme agama. Moderasi beragama mendorong individu untuk menjalani agama mereka dengan bijak, berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, cinta kasih, dan perdamaian (Engkizar et al., 2022).

Indonesia merupakan suatu negara yang tersusun dari banyak suku, ras dan juga agama, tentu sangat mudah tercipta perpecahan. Perpecahan itu sendiri banyak bersumber dari ideologi-ideologi liberal dan ekstrimis yang masuk ke Indonesia. Moderasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengatur, menengahi komunikasi interaktif yang terdiri atas lisan maupun tulisan. Moderasi juga dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan berlaku yang telah ditetapkan. Serta istilah moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah pandangan yang mengamalkan sikap tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri (Misrawi, 2010).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Hal ini karena ajaran agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrem, sehingga tidak akan menimbulkan konflik antar umat beragama.

Selanjutnya, Moderasi Beragama membentuk sikap dan perilaku yang inklusif. Ini membantu masyarakat mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Hal ini mempromosikan kerjasama, pemahaman, dan harmoni antaragama dalam masyarakat (Singhal et al., 2023). Landasan Moderasi Beragama

Al-Quran, sebagai kitab suci dalam agama Islam, merupakan sumber utama ajaran dan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Salah satu tema sentral yang dibahas dalam Al-Quran adalah moderasi beragama, yang mencerminkan pentingnya menjalani agama dengan keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang mendalam. Konsep moderasi beragama adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam Al-Quran, memberikan landasan kuat bagi praktek keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut (Hati et al., 2023).

Dengan demikian, Al-Quran memberikan pedoman yang kuat bagi umat Islam dalam menjalani agama mereka secara moderasi, seimbang, dan toleran. Pesan-pesan ini relevan dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan intoleransi, radikalisasi, dan konflik antaragama. Moderasi beragama,

sesuai dengan ajaran Al-Quran, mempromosikan nilai-nilai yang mendorong perdamaian, kerjasama, dan penghormatan terhadap seluruh umat manusia (Dalimunthe et al., 2023).

Dalam Al-Quran, moderasi beragama diekspresikan melalui berbagai ayat yang menekankan pentingnya menjauhi ekstremisme, fanatisme, dan kekerasan dalam pelaksanaan ajaran agama. Al-Quran menekankan pada umat Muslim untuk menjalani agama mereka dengan penuh pemahaman dan kebijaksanaan, menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, dan menghindari praktik yang berlebihan atau menyimpang dari ajaran asli Islam.

Selain itu, Al-Quran juga menekankan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dalam berinteraksi dengan individu dari beragam latar belakang agama dan budaya. Pesan-pesan seperti "Tidak ada paksaan dalam beragama" (Al-Baqarah: 256) dan "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal" (Al-Hujurat: 13) menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan keragaman budaya dalam semangat dialog dan harmoni.

Dengan demikian, Al-Quran memberikan pedoman yang kuat bagi umat Islam dalam menjalani agama mereka secara moderasi, seimbang, dan toleran. Pesan-pesan ini relevan dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan intoleransi, radikalisasi, dan konflik antaragama. Moderasi beragama, sesuai dengan ajaran Al-Quran, mempromosikan nilai-nilai yang mendorong

perdamaian, kerjasama, dan penghormatan terhadap seluruh umat manusia (Dalimunthe et al., 2023).

Terma moderasi beragama dalam agama Islam terkandung dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan kata *wasath*. Dalam Al-Qur'an, kata *wasath* beserta serangkaian perubahannya berjumlah tiga ayat yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 143, 238 dan Q.S. al-Qalam ayat 48 (Baqi, 2009). Selain itu, praktek moderasi beragama yang sesuai dengan tuntunan terdapat dalam Q.S. al-Kafirun.

Ayat-ayat yang cenderung membahas moderasi beragama adalah Q.S. al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ الرُّسُولُ وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى شَهَادَةٍ لِّتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَكُمْ وَكَذَلِكَ
عَقِبْنَاهُ عَلَى يَنْقَلِبُ مِّنَ الرُّسُولِ يَتَّبِعُ مَنْ لِّنَعْلَمَ إِلَّا عَلَيْهَا كُنْتَ أَلَّتِي الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا وَمَا ۖ
اللَّهُ إِنَّ ۖ إِيْمَانَكُمْ لِيُضَيِّعَ اللَّهُ كَانَ وَمَا ۖ اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ عَلَى إِلَّا لَكَبِيرَةً كَانَتْ وَإِنَّ ۖ
رَّحِيمٍ لَّرِءُوفٌ بِالنَّاسِ

[Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah] (Q.S. al-Baqarah: 143)

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan yang harus bersikap adil sebagai umat pilihan (As-Suyuthi & Al-Mahally, 2015). Lebih lanjut lagi, umat pilihan yang dimaksud adalah bahwa umat Islam adalah umat yang bersaksi atas risalah nabi Muhammad dan nabi Muhammad akan

bersaksi kembali atas umatnya (Al-Qarni, 2008). umat yang adil dan pilihan jalan lain. *Wasatha* dapat diartikan dengan umat yang moderat, berada di antara dua tepi yang negatif, terlalu ke kanan dan terlalu ke kiri.(Arifin, 2021) Seperti moderat antara aliran yang mengakui banyak tuhan (musyrik) dengan aliran yang tidak mengakui adanya tuhan (ateis).

Allah memberikan isyarat yang eviden mengenai moderasi beragama pada ayat yang penulis paparkan di atas. Pasalnya, nabi Muhammad acapkali berhasil dalam menyatukan masyarakat heterogen melalui beragam upaya seperti: piagam Madinah, perjanjian Hudaibiyah, Perjanjian Najran dan beberapa perjanjian lainnya. Sikap inilah yang menjadi *blueprint* bagi umat Islam agar mampu menyatukan heterogenitas dalam bingkai kemanusiaan.

Sejalan dengan ayat di atas, Alquran mengisyaratkan bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama (Q.S. al-Baqarah ayat 256). Pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadi palsu dan dapat menimbulkan pertentangan (Hamka, 2012). Sekiranya hal ini dipaksa untuk dilakukan maka hasilnya tidak akan optimal (Al-Thabary, 2000).

Sekiranya Allah menghendaki semua manusia untuk beriman maka Allah dapat melakukannya dengan mudah. Namun fakta bahwa Allah menciptakan perbedaan dengan sengaja. Hikmah ini terkandung dalam Q.S. Yunus ayat 99 yang artinya:

مُؤْمِنِينَ يَكُونُوا حَتَّى النَّاسِ تُكْرَهُ أَفَأَنْتَ ۖ جَمِيعًا كُلُّهُمْ الْأَرْضِ فِي مَنْ لِّءَامَنَ رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ

[“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?”] (Q.S. Yunus: 99)

Dalam ayat lain, tergambar bahwa dalam agama Islam terdapat dua tauhid yang harus dipegang teguh yaitu tauhid langit (*hablumminallah*) dan tauhid bumi (*hablumminannas*). Kedua tauhid ini harus seimbang agar mampu menciptakan moderasi yang ideal. Argumentasi ini terlihat jelas pada Q.S. Ali ‘Imran ayat 112 yang berbunyi:

وَضُرِبَتْ لِلَّهِ مِنَ الْبَغْضِ وَبَاءُ النَّاسِ مِنَ وَحْبِ اللَّهِ مِنَ بَحْلِ إِلَّا تَقْفُوا مَا آتَيْنَا عَلَيْهِمْ ضُرِبَتْ
عَصَا بِمَا ذَلِكَ حَقٌّ بغيرِ الْإِنْبِيَاءِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهَ بِآيَاتٍ يَكْفُرُونَ كَانُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسْكَنَةُ عَلَيْهِمْ
يَعْتَدُونَ وَكَانُوا

[“Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka] (Q.S. Al-Imran: 112)

Ajaran sebuah agama sudah tentu memuat dalil-dalil untuk meyakinkan kepada manusia bahwa ajaran yang dikandungnya sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan. Oleh karena itu, ajaran agama yang terkandung di dalam masing-masing kitab suci sudah pasti mengajak akal manusia untuk berpikir sesuai tuntutan logika. Jika ajaran suatu agama selalu dikaitkan dengan akal manusia maka sudah tidak pada tempatnya memaksakan ajaran suatu agama kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam hal beragama tidak boleh terlepas dari objek-objek yang harus dipahami agar tidak terjadi pemaksaan.

Dalam Q.S. al-Kafirun dijelaskan secara kumulatif bahwa objek moderasi beragama terbagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, keyakinan tentang eksistensi Tuhan. Kedua, adanya cara yang digariskan dalam menyembah Tuhan. Ketiga, keyakinan bahwa agama dapat membawa penganutnya kepada kebahagiaan. Ketiga objek inilah yang patut dijadikan sebagai tolak ukur untuk membangun moderasi beragama.

Objek mengenai ketuhanan adalah konsep bahwa setiap agama mengakui eksistensi Tuhan meskipun interpretasinya berbeda. Objek ini terletak dalam Q.S. al-Kafirun ayat 2-3 yang artinya:

[“Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah”] (Q.S. al-Kafirun: 2-3)

Setiap manusia memiliki hak untuk meyakini eksistensi Tuhan sesuai dengan tuntunan logika. Objek ini muncul karena terdapat perbedaan mengenai eksistensi Tuhan dimana suku Quraisy meyakini Latta dan Uzza sebagai tuhan mereka. Sedangkan Tuhan dalam ajaran Islam ialah Allah yang tiada sekutu bagi-Nya (Katsir, 2018).

Pada objek mengenai tata cara peribadatan terdapat konsep dalam menyembah Tuhan. Agaknya, tata cara dalam menyembah Tuhan menyangkut etika dan estetika mengagungkan Tuhan dalam sebuah ritual. Dalam konteks surah al-Kafirun, peribadatan yang dilakukan suku Quraisy tidak substansial dan terkesan hanya seremonial belaka. Sedangkan Islam memiliki landasan filosofis mengenai tata cara peribadatan sehingga setiap umat Islam mengetahui makna ritual peribadatan yang dijalani.

Ritual peribadatan merupakan kegiatan yang sakral, sehingga pada kisah di balik turunnya Q.S. al-Kafirun terdapat intimidasi karena tata cara peribadatan (Al-Shâbûnî, n.d.) Meski demikian, dalam tataran keindonesiaan moderasi pada objek yang kedua dapat diinternalisasi melalui ketekunan dan penghayatan serta internalisasi nilai-nilai ajaran agama masing-masing (Nurdin, 2021).

Ayat terakhir Q.S. al-Kafirun mengindikasikan adanya objek Moderasi Beragama bahwa pemeluk agama harus meyakini bahwa agama yang dianutnya dapat membawanya kepada kebahagiaan. Kalimat *lakum dînukum waliyadîn* mengisyaratkan agar masing-masing pemeluk agama sudah cukup dikatakan moderat dengan mengamalkan ajarannya tanpa harus mengolok dan mencampuri urusan agama orang lain (Shihab, 2015). Kebahagiaan ini dapat dilihat dari ketidakmungkinan konvergensi dua buah agama yang dapat merusak esensi dari kebahagiaan dalam beragama (Qurtubi, 2002).

Ungkapan ayat terakhir ini merupakan sebuah pengakuan esensi dan eksistensi secara timbal-balik sehingga tidak ada ruang bagi pembenaran semata yang sifatnya subjektif. Moderasi beragama yang terdapat di dalam surah al-Kafirun menunjukkan bahwa hubungan kemanusiaan tidak harus dibatasi oleh agama. Dengan demikian, moderasi beragama yang terdapat di dalam surah ini patut dijadikan referensi karena terdapat kebebasan dalam memilih agama sehingga nilai-nilai kemanusiaan seperti persaudaraan tetap terjaga dengan eksis. Adapun benar dan salah di dalam memilih suatu agama maka konsekuensinya terpulang kepada individu.

Hal diatas merupakan landasan Moderasi Beragama dalam Alquran, sedangkan Dasar Moderasi Beragam dalam Negara adalah bahwa Moderasi beragama terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam konteks ini, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional keempat, yakni Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam diskusi yang melibatkan pihak-pihak Kementerian Agama dan Bappenas, penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 dianggap sangat penting mengingat salah satu isu strategis yang muncul dalam evaluasi RPJMN 2015-2019 sebelumnya adalah “masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama”.

Secara keseluruhan, ada enam isu strategis yang dijadikan sebagai kerangka pikir program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni:

- a. Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya perlindungan hak kebudayaan;
- b. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan;
- c. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia;
- d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama;
- e. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa; dan
- f. Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Kerangka pikir atau latar belakang isu strategis inilah yang akan dijadikan pertimbangan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyusun arah dan kebijakannya di bidang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam 5 (lima) tahun ke depan, mulai 2020-2024. Tentu saja, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama akan menjadi yang terdepan (*leading sector*) dalam merespon isu strategis di bidang keagamaan tersebut.

Keberhasilan mengintegrasikan visi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020-2024 akan sia-sia jika Renstra Kementerian Agama 2020-2024 tidak mencerminkan program turunannya, karena Renstra merupakan penjabaran visi

kementerian yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden.

Tim Penyusun Renstra Kementerian Agama sudah sampai pada kesimpulan bahwa Visi Renstra Kementerian Agama 2020-2024 adalah “Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Moderat, Cerdas, dan Unggul”. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, proses penyusunan Renstra K/L memang membutuhkan 4 (empat) tahapan, yakni: penyusunan, penelaahan, penyesuaian, dan kemudian penetapan. Dalam tahap penyusunan, rancangan Renstra telah dibuat meski masih bersifat indikatif, dengan rumusan visi tersebut.

Dari rumusan visi tersebut, semangat moderasi beragama terlihat jelas dengan menjadikan kata “moderat” sebagai salah satu dari empat kata kunci, selain taat beragama, cerdas, dan unggul. Pada gilirannya, keempat visi itu perlu diturunkan lagi ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Meski bentuk program dan kegiatan dalam setiap tahunnya niscaya berubah, namun secara keseluruhan program dan kegiatan di Kementerian Agama harus mencakup aspek pelayanan, pendidikan, riset, advokasi, literasi, ekonomi umat, tata kelola, serta integrasi data agama dan keagamaan.

Sekadar contoh, visi Taat Beragama misalnya, dapat diturunkan ke dalam program-program yang diproyeksikan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti: meningkatkan literasi, edukasi, advokasi, dan internalisasi pemahaman dan peng-

amalan ajaran agama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran, seperti yang disasar oleh Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Taat beragama dengan perspektif moderasi juga dapat diturunkan ke dalam program atau kebijakan terkait rumah ibadah, baik dalam hal pembangunannya maupun pengelolaannya.

Dengan perspektif moderasi, yang menekankan ketaatan beragama secara esensial dan substantif, semestinya semakin bertambahnya rumah ibadah tidak akan mengganggu kerukunan kehidupan keagamaan, tentu dengan catatan bahwa pembangunannya telah mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu aspek fundamental dari moderasi beragama adalah toleransi (Subchi et al., 2022). Ini berarti menghormati hak individu untuk memilih dan menjalani agama mereka tanpa tekanan atau diskriminasi. Moderasi beragama juga mencakup penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Ini mengajak individu untuk membuka dialog dan berkomunikasi dengan individu dari latar belakang agama yang berbeda, dengan tujuan memahami dan menghormati perbedaan tersebut. Ini adalah landasan untuk membangun kerukunan antarumat beragama dan mendorong kerjasama antar kelompok agama dalam menjalani prinsip-prinsip moral dan etika yang sama (Ashoumi & Hidayatulloh, 2022).

Moderasi beragama dipahami sebagai sikap agama yang sejalan antara penghormatan terhadap pelaksanaan agama individu lainnya yang beragama keyakinan (inklusif) dan pengamalan agama sendiri (eksklusif). Dikarenakan moderasi beragama adalah salah satu kunci mewujudkan kedamaian, kerukunan, toleransi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi

Beragama adalah sikap kebajikan yang membantu tercipta keselarasan sosial dan keseimbangan di dalam kehidupan dan personal, di dalam keluarga dan masyarakat beserta hubungan antar manusia yang lebih luas (Azra, 2020).

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, adat istiadat, dan juga agama, hal ini sangat mudah memicu terjadinya perpecahan. Perpecahan itu sendiri banyak bersumber dari ideologi-ideologi liberal dan ekstrimis yang masuk ke Indonesia. Moderasi beragama merupakan kegiatan mengarahkan, mengatur, menengahi komunikasi interaktif yang terdiri atas lisan maupun tulisan. Moderasi juga dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan berlaku yang telah ditetapkan. Serta istilah moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah pandangan yang mengamalkan sikap tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri (Misrawi, 2010).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Hal ini karena ajaran agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrem, sehingga tidak akan menimbulkan konflik antar umat beragama.

Selain itu, moderasi beragama mendorong individu untuk menjalani agama dengan sikap yang tenang dan penuh rasa tanggung jawab. Ini berarti tidak terjerumus ke dalam ekstremisme atau fanatisme agama yang dapat menyebabkan konflik dan kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan individu untuk mengejar perdamaian, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama. Ini memungkinkan mereka untuk bersama-sama bekerja pada isu-isu sosial yang relevan dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik (Latifa et al., 2022).

Moderasi beragama juga relevan dalam mengatasi tantangan kontemporer. Di era globalisasi, di mana individu dari berbagai budaya dan agama dapat dengan mudah terhubung dan berinteraksi, moderasi beragama dapat membantu menjembatani perbedaan (Bennett et al., 2022). Ini adalah cara untuk menghindari konflik budaya dan agama yang seringkali terjadi ketika perbedaan tidak dielaborasi secara baik. Moderasi beragama mengajarkan individu untuk memandang perbedaan sebagai kekayaan dan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan bekerja bersama.

Dalam konteks politik, moderasi beragama dapat berperan sebagai pengimbang terhadap retorika ekstremisme yang dapat memecah belah masyarakat. Ini dapat membantu menghindari penggunaan agama sebagai alat politik yang memanfaatkan ketegangan dan konflik agama. Moderasi beragama mendorong pemimpin politik dan masyarakat sipil untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai yang mendukung persatuan dan kerukunan.

Penting untuk mencatat bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan agama. Sebaliknya, itu adalah cara untuk mengamalkan

keyakinan agama dengan cara yang mempromosikan nilai-nilai positif dan konstruktif dalam masyarakat. Ini mendorong individu untuk menjalani agama mereka dengan bijaksana dan sadar akan tanggung jawab sosial mereka.

Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan keragaman budaya dan agamanya, telah lama dianggap sebagai contoh yang gemilang dalam menjaga harmoni dan kerukunan beragama (Pangestu et al., 2022). Konsep moderasi beragama di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian sosial dan memupuk persatuan di antara penduduknya. Pengalaman unik negara ini dalam hal religiusitas yang moderat tercermin melalui berbagai indikator, mulai dari dialog antaragama dan kerja sama hingga praktik Islam yang khas dikenal dengan sebutan "Islam Nusantara." Dalam lanskap keagamaan yang dinamis dan beragam ini, studi mengenai indikator moderasi beragama tidak hanya memberikan wawasan tentang identitas nasional Indonesia, tetapi juga berperan sebagai model berharga bagi masyarakat yang ingin mempromosikan toleransi dan pemahaman antaragama di dunia yang seringkali diwarnai oleh ketegangan dan konflik beragama.

Pengkajian mengenai indikator moderasi beragama di Indonesia adalah proses yang kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan beragama. Mulai dari keberadaan berbagai festival keagamaan yang dirayakan di seluruh negeri hingga keterlibatan aktif pemimpin agama dalam memajukan kerukunan, indikator-indikator ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menjaga masyarakat yang damai dan inklusif (Holt et al., 2021). Memahami bagaimana indikator-indikator ini diukur dan dipertahankan tidak hanya relevan bagi para

ilmuwan dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi individu di seluruh dunia yang mencari inspirasi dari keberhasilan Indonesia dalam mempromosikan kerukunan antaragama. Dalam konteks inilah kita memahami jaringan kompleks indikator moderasi beragama di Indonesia, yang memberikan wawasan berharga tentang pendekatan unik negara ini dalam mengelola keragaman agama dan mempromosikan persatuan di antara rakyatnya.

Dilansir website Nahdlatul Ulama (NU Online, 2023), Kemenag telah merilis empat indikator moderasi beragama, yaitu:

1. Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama di Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam memelihara harmoni dan persatuan dalam keragaman. Hal ini tercermin dalam indikator-indikator yang mengukur tingkat kesetiaan warga Indonesia terhadap negara mereka, yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap beragam agama dan budaya yang ada (Lusia et al., 2023). Komitmen ini juga tercermin dalam semangat Pancasila, dasar negara Indonesia, yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang secara esensial menyatukan semua warga Indonesia di bawah payung negara yang pluralistik.

Indonesia telah berhasil menciptakan indikator-indikator yang mengukur komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama, seperti partisipasi aktif dalam acara-acara nasional, kepedulian terhadap persatuan nasional, dan penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda

tetapi tetap satu). Melalui komitmen yang kuat terhadap kebangsaan, Indonesia terus memperkuat fondasi moderasi beragama, menghasilkan kerukunan yang berkelanjutan di tengah kompleksitas keragaman yang menjadi salah satu ciri khas negara ini.

2. Anti kekerasan

Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat multikultural dan multireligi, telah berhasil membangun indikator yang signifikan dalam upaya mendorong moderasi beragama dengan menekankan prinsip anti kekerasan. Indikator ini mencakup upaya nyata pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin agama dalam mendukung pendekatan yang damai dan toleran dalam menangani perbedaan keagamaan. Dalam konteks ini, Indonesia telah mendorong dialog antaragama, mengimplementasikan program-program pendidikan keberagaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi untuk menghindari konflik keagamaan.

Upaya nyata dalam menetapkan indikator anti kekerasan telah membantu Indonesia membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan moderasi beragama. Tindakan tegas terhadap kelompok radikal, kebijakan yang mendorong inklusivitas, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama telah menjadikan Indonesia sebagai contoh positif dalam menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat yang terdiri dari beragam keyakinan dan tradisi keagamaan (Arafah, 2020). Melalui indikator ini, Indonesia terus menunjukkan bahwa

moderasi beragama dan anti kekerasan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis.

3. Toleransi

Toleransi dalam moderasi beragama telah menjadi inti dari keseimbangan sosial dan harmoni di Indonesia, sebuah negara yang dihuni oleh berbagai kelompok agama (Suryana & Hilmi, 2023). Indikator toleransi mencerminkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk menerima perbedaan keyakinan dan menghormati hak setiap individu untuk menjalankan agamanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Inisiatif seperti program pendidikan keberagaman, dialog antaragama, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) menjadi penanda kuat dalam memperkuat toleransi di antara masyarakat Indonesia, menciptakan lingkungan yang mendukung moderasi beragama dan kerukunan.

Indonesia terus memperkuat indikator toleransi melalui kebijakan yang mendorong keragaman agama, melibatkan pemimpin agama dalam mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan inklusivitas sebagai bagian integral dari identitas nasional (Sar et al., 2022). Ini tidak hanya menciptakan landasan kuat untuk moderasi beragama, tetapi juga membantu masyarakat Indonesia memahami bahwa toleransi adalah kunci bagi perkembangan positif dan stabilitas dalam negara yang dipenuhi oleh berbagai bentuk kepercayaan. Dengan menjaga indikator toleransi ini, Indonesia terus memberikan contoh penting tentang bagaimana kerukunan

antaragama dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan sosial dan harmoni dalam masyarakat yang beragam (Latief, 2023).

4. Penerimaan terhadap tradisi yang ada ditengah masyarakat

Penerimaan terhadap tradisi yang ada di tengah masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam moderasi beragama di Indonesia. Negara ini membangun fondasi yang kuat dalam menghormati dan menerima berbagai tradisi agama dan budaya yang ada di tengah masyarakatnya (Aksa & Nurhayati, 2020). Melalui indikator ini, Indonesia menghargai keberagaman dengan mengakui pentingnya tradisi-tradisi tersebut sebagai bagian integral dari identitas nasional, yang memberikan kontribusi positif dalam menjaga harmoni antaragama dan menguatkan kerukunan sosial (Prasojo & Pabbajah, 2020).

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendorong penerimaan terhadap tradisi-tradisi keagamaan yang beragam dan telah mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian dan penghormatan terhadap warisan agama dan budaya yang kaya. Dengan melakukan hal ini, Indonesia memperlihatkan kepada dunia bahwa moderasi beragama bukan hanya tentang menghindari konflik antaragama, tetapi juga tentang memelihara keberagaman sebagai aset berharga dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

B. Kearifan Lokal

Kearifan lokal, sebagai konsep yang mencerminkan warisan budaya dan nilai-nilai yang diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu, menjadi bagian

integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari (Iftitah Nurul Laily, 2022). Kearifan lokal mencakup norma-norma sosial, tradisi, adat istiadat, dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui perpaduan elemen-elemen ini, kearifan lokal membentuk pandangan dunia dan perilaku masyarakat yang unik.

Dalam banyak masyarakat di seluruh dunia, kearifan lokal menjadi pondasi bagi kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok etnis atau komunitas memiliki ciri khas dan nilai-nilai yang memandu keputusan-keputusan mereka. Kearifan lokal tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis, berkembang seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial (Habibah et al., 2023; Prihana et al., 2020).

Salah satu aspek penting dari kearifan lokal adalah keterkaitannya dengan lingkungan alam. Masyarakat tradisional sering kali mengandalkan pengetahuan lokal untuk beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim setempat. Kearifan lokal dapat mencakup praktik-praktik pertanian yang sesuai dengan musim, cara memanfaatkan tanaman obat-obatan lokal, atau teknik-teknik pembangunan yang memperhitungkan kondisi alam setempat. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menggambarkan hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Tradisi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kearifan lokal. Upacara adat, tarian, dan ritual-ritual lainnya menjadi penanda waktu yang mempertahankan identitas budaya dan sekaligus mengajarkan nilai-nilai kepada generasi yang lebih muda. Tradisi-tradisi ini tidak hanya memberikan hiburan,

tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Komitmen terhadap gotong royong dan solidaritas sosial juga sering kali tercermin dalam kearifan lokal. Masyarakat yang mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal sering kali memiliki sistem dukungan sosial yang kuat (Uge et al., 2019). Gotong royong bukan hanya sekadar konsep, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari di mana masyarakat saling membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti pertanian, membangun rumah, atau merayakan peristiwa penting.

Selain itu, kearifan lokal juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk seni dan kreativitas. Kesenian tradisional, seperti seni ukir, tarian adat, dan musik tradisional, sering kali menggambarkan ekspresi seni yang muncul dari nilai-nilai kearifan lokal. Seni ini bukan hanya estetis, tetapi juga memiliki nilai-nilai simbolik yang mendalam yang terkait dengan identitas dan sejarah suatu komunitas.

Namun, kearifan lokal tidak selalu terjaga dengan baik. Pengaruh globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi sering kali membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat lokal. Nilai-nilai tradisional dapat tergerus oleh budaya populer global, teknologi modern, atau perubahan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan melestarikan kearifan lokal agar tidak hilang begitu saja.

Melestarikan kearifan lokal bukan hanya tanggung jawab masyarakat setempat, tetapi juga pemerintah dan lembaga pembangunan. Perlu ada upaya untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan,

pendidikan, dan kebijakan publik. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai kearifan lokal menjadi suatu kebutuhan yang mendesak (Zuhri et al., 2019).

Mengenal dan menghargai kearifan lokal juga dapat membawa manfaat lebih lanjut, terutama dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Banyak wisatawan yang mencari pengalaman otentik dan interaksi dengan kebudayaan lokal. Oleh karena itu, melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal dapat menjadi daya tarik yang signifikan bagi pariwisata lokal.

Kearifan lokal mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang memperkuat identitas suatu masyarakat. Hal ini tidak hanya terkait dengan warisan sejarah, tetapi juga menjadi panduan hidup yang terus berkembang seiring waktu. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, menjaga kearifan lokal menjadi esensial untuk menjaga keberagaman budaya dan kehidupan yang berkelanjutan. Tindakan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk melestarikan dan meneruskan kearifan lokal agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.

Moderasi beragama berbasis kearifan lokal mewakili pendekatan yang mendalam dan berakar dalam mengelola perbedaan keyakinan di suatu komunitas. Konsep moderasi beragama sendiri menekankan pada sikap tengah, penerimaan, dan dialog yang positif antarumat beragama. Saat diselaraskan dengan kearifan lokal, pendekatan ini dapat menghasilkan harmoni sosial yang kuat, menciptakan

dasar bagi masyarakat yang beragam untuk hidup bersama dengan damai dan saling menghormati.

Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai yang telah diterapkan dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat. Integrasi nilai-nilai ini dalam moderasi beragama menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menerima perbedaan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang muncul dalam konteks moderasi beragama berbasis kearifan lokal adalah kecenderungan untuk menemukan titik temu antara berbagai keyakinan, menciptakan lingkungan yang mendukung kerukunan dan persatuan.

Salah satu cara di mana moderasi beragama berbasis kearifan lokal dapat muncul adalah melalui ritual dan perayaan bersama (Widyatwati et al., 2021). Perayaan-perayaan agama yang dirayakan bersama dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal menciptakan momen yang merayakan keberagaman, sambil memperkuat rasa persatuan. Inisiatif ini membantu mengurangi polarisasi dan menciptakan ruang untuk kerja sama antarumat beragama dalam merayakan peristiwa-peristiwa penting bersama-sama.

Selain itu, dalam konteks kearifan lokal, moderasi beragama dapat ditemukan dalam pendekatan praktis terhadap kebutuhan sehari-hari. Prinsip gotong royong dan saling membantu, yang sering kali tercermin dalam kearifan lokal, dapat menjadi fondasi untuk kehidupan beragama yang moderat. Misalnya, keberagaman dalam praktek-praktek pertanian, kesehatan tradisional, atau bahkan dalam kegiatan sehari-hari seperti berbelanja dan berbisnis dapat menciptakan keseimbangan dan saling pengertian antarumat beragama.

Dalam lingkup kearifan lokal, cerita dan mitos seringkali menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral dan etika. Moderasi beragama yang mengambil inspirasi dari cerita-cerita lokal dapat membantu membentuk persepsi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Pemerintah dan pemuka agama lokal dapat memanfaatkan cerita-cerita ini untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi dan saling pengertian yang sesuai dengan konteks budaya setempat.

Penyelenggaraan dialog antarumat beragama juga menjadi bagian penting dari moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Masyarakat dapat mengadakan forum-forum diskusi, seminar, atau lokakarya yang memungkinkan berbagai keyakinan untuk diajak berbicara. Pendekatan ini memperkuat kesadaran akan perbedaan dan menciptakan ruang untuk pemahaman bersama. Dialog semacam itu dapat diterapkan dengan memperhitungkan nilai-nilai lokal, sehingga prosesnya bukan hanya merangkul perbedaan, tetapi juga menghargai keragaman budaya.

Adaptasi nilai-nilai lokal juga dapat muncul dalam pembentukan kebijakan publik terkait moderasi beragama. Pemerintah setempat dapat mengembangkan kebijakan yang mencerminkan kearifan lokal dan memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan beragama dihormati tanpa mengorbankan keharmonisan sosial. Keterlibatan tokoh-tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam pembuatan kebijakan ini dapat memastikan bahwa pandangan mereka diakomodasi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (Abas et al., 2022).

Pentingnya pendidikan dalam membentuk pemahaman dan sikap moderat terhadap agama juga tidak bisa diabaikan. Institusi pendidikan dapat memainkan

peran kunci dalam memperkenalkan nilai-nilai moderasi dan mendidik generasi muda tentang kearifan lokal. Melibatkan komunitas lokal, pemuka agama, dan para tua-tua dalam proses pendidikan dapat membawa perspektif yang lebih dalam dan kontekstual terhadap moderasi beragama.

Tantangan dalam mengimplementasikan moderasi beragama berbasis kearifan lokal melibatkan penyeimbangan antara menghormati nilai-nilai lokal dan mengakomodasi nilai-nilai universal. Dalam mengembangkan pendekatan moderasi yang sesuai dengan konteks budaya setempat, penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok agama yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui. Dialog terbuka dan partisipasi semua pihak menjadi kunci untuk membangun moderasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam mendukung moderasi beragama berbasis kearifan lokal, kerjasama antarumat beragama dan pemerintah sangat penting. Pemerintah perlu menjadi fasilitator dan penggerak inisiatif moderasi ini, sambil memastikan bahwa semua pihak terlibat secara adil dan setara (Musi et al., 2022). Peran pemuka agama, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok sipil juga sangat penting dalam membentuk sikap moderat dan mempromosikan kearifan lokal dalam konteks agama.

Secara keseluruhan, moderasi beragama berbasis kearifan lokal bukanlah hanya suatu strategi untuk mengelola perbedaan, tetapi juga merupakan pendekatan holistik yang menciptakan fondasi bagi kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif. Memahami dan menghargai kearifan lokal menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan dialog saling pengertian,

toleransi, dan kerjasama antarumat beragama. Dalam menghadapi era globalisasi dan kompleksitas sosial, moderasi beragama yang berakar dalam kearifan lokal membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang damai, saling menghormati, dan berkelanjutan.

C. Model Komunikasi

Kata Model secara sederhana adalah gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan (Jalaluddin Rakhmat, 2012). Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Definisi lain dari model adalah, suatu gambaran yang sistematis dan abstrak yang menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari suatu proses (Riswandi, 2009).

Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengkategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua aspek yang mendukung terjadinya suatu proses. Misalnya, dapat menunjukkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu proses dan keberadaannya dapat ditunjukkan secara nyata (Hafied Cangara, 2010).

Model komunikasi tidak sama dengan fenomena komunikasi. Model adalah alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model disebut juga sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori, atau dengan perkataan lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Penyajian model dalam bagian ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi.

Gordon Wiseman dan Larry Barker menyebutkan tiga fungsi pentingnya model komunikasi, yaitu:

1. Melukiskan proses komunikasi.
2. Menunjukkan hubungan *visual*.
3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi

(Deddy Mulyana, 2007).

Menggunakan pendapat Raymond S. Ross, model memberikan penglihatan yang lain, berbeda dan lebih dekat; model menyediakan kerangka rujukan, menyoroti kesenjangan informasional, menyoroti problem abstraksi, dan menyatakan suatu problem dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol.

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku *Human Communication* menjelaskan 3 model komunikasi :

- a. Model komunikasi *linier*, yaitu model komunikasi satu arah (*one-way view of communication*). Di mana komunikator memberikan suatu stimulus dan komunikan memberikan respons atau tanggapan yang diharapkan, tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Seperti, teori jarum hipodermik (*hypodermicneedle theory*), asumsi-asumsi teori ini yaitu ketika seseorang

memersuasi orang lain, maka ia “menyuntikkan satu ampul” persuasi kepada orang lain itu, sehingga orang lain tersebut melakukan apa yang ia kehendaki.

- b. Model komunikasi dua arah adalah model komunikasi interaksional, merupakan kelanjutan dari pendekatan *linier*. Pada model ini, terjadi komunikasi umpan balik (*feedback*) gagasan. Ada pengirim (*sender*) yang mengirimkan informasi dan ada penerima (*receiver*) yang melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respons balik terhadap pesan dari pengirim (*sender*). Dengan demikian, komunikasi berlangsung dalam proses dua arah (*two-way*) maupun proses peredaran atau perputaran arah (*cyclical process*), sedangkan setiap partisipan memiliki peran ganda, di mana pada satu waktu bertindak sebagai *sender*, sedangkan pada waktu lain berlaku sebagai *receiver*, terus seperti itu sebaliknya.
- c. Model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (*relationship*) di antara dua orang atau lebih. Proses komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki konten pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi.

Terdapat beberapa model komunikasi yang sangat umum dibicarakan dalam ilmu komunikasi yaitu:

1. Model S-R (Stimulus-Respons)

Model stimulus-respons (S-R) adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang

beraliran *behavioristik*. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus-respons. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada seorang wanita, dan wanita itu kemudian tersipu malu, atau bila saya tersenyum dan kemudian anda membalas senyuman saya, itulah pola S–R. Jadi model S–R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan–tulisan), isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. Oleh karena itu anda dapat menganggap proses ini sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal-balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi berikutnya.

Sebagai contoh, ketika seseorang yang anda kagumi atau menarik perhatian anda tersenyum kepada anda ketika berpapasan di jalan, boleh jadi anda akan membalas senyumannya, karena anda merasa senang. Pada gilirannya, merasa mendapatkan sambutan, orang tadi bertanya kepada anda, “mau ke mana?” lalu anda menjawab, “mau kuliah.” Ia pun melambaikan tangan ketika berpisah, dan anda membalas dengan lambaian tangan pula. Di kampus, masih mengenang peristiwa sebelumnya yang menyenangkan, anda juga tersenyum-senyum kepada orang lain dan mendapatkan tanggapan dari teman anda, “kok kamu tampak bahagia sekali, sih.” Begitulah seterusnya.

Pola S–R ini dapat pula berlangsung negatif, misalnya orang

pertama menatap orang kedua dengan tajam, dan orang kedua balik menatap, menunduk malu, memalingkan wajah, atau membentak, “apa lihat-lihat? Nantang, ya?” atau, orang pertama melotot dan orang kedua ketakutan.

Model S–R mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, khususnya yang berkenaan dengan faktor manusia. Secara implisit ada asumsi dalam model S–R ini bahwa perilaku (respons) manusia dapat diramalkan. Ringkasnya, komunikasi dianggap statis; manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar (stimulus), bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Model ini lebih sesuai bila diterapkan pada sistem pengendalian suhu udara alih-alih pada perilaku manusia.

2. Model Lasswell

Salah satu model komunikasi yang tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell, seorang ahli ilmu politik dari *Yale University*. Dia menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu *who*(siapa), *says what* (mengatakan apa), *in which* medium atau dalam media apa, *to whom* atau kepada siapa, dan dengan *what effect* atau apa efeknya.

Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model Lasswell ini akan kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan *who* tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai

komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau persatuan.

Pertanyaan kedua adalah *says what* atau apa yang dikatakan. Pertanyaan ini adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Umumnya kita menanyakan pertanyaan ini dalam pemikiran kita dalam berkomunikasi. Kadang-kadang orang perlu mengorganisir lebih dahulu apa yang akan disampaikan sebelum mengkomunikasikannya. Isi yang dikomunikasikan ini kadang-kadang sederhana dan kadang-kadang sulit dan kompleks. Misalnya yang sederhana seorang pimpinan menyuruh karyawannya untuk datang rapat pada hari tertentu. Contoh isi pesan yang agak sulit misalnya menjelaskan kepada karyawan mengenai pengelolaan informasi dengan menggunakan komputer.

Pertanyaan ketiga adalah *to whom*. Pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari komunikasi. Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator berbicara atau kepada siapa pesan yang ia ingin disampaikan diberikan. Hal ini perlu diperhatikan karena penerima pesan ini, berbeda dalam banyak hal misalnya, pengalamannya, kebudayaannya, pengetahuannya dan usianya. Kita tidak akan menggunakan cara yang sama dalam berkomunikasi kepada anak-anak dan berkomunikasi kepada orang dewasa. Jadi, dalam berkomunikasi siapa pendengarnya perlu dipertimbangkan.

Pertanyaan yang keempat adalah *through what* atau melalui media

apa. Yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi, seperti berbicara, gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, buku dan gambar. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak semua media cocok untuk maksud tertentu. Kadang-kadang suatu media lebih efisien digunakan untuk maksud tertentu tetapi untuk maksud yang lain tidak.

Pertanyaan terakhir dari model Lasswell ini adalah *what effect* atau apa efeknya dari komunikasi tersebut. Misalnya: sebuah sekolah swasta membuat iklan untuk mengkomunikasikan bahwa mereka akan menerima murid baru. Sesudah iklan ini disiarkan beberapa hari, sudah berapa orangkah yang telah mendaftar untuk menjadi murid. Jumlah orang yang mendaftar ini adalah merupakan efek dari komunikasi.

Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan 2 hal yaitu apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan kedua, apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa kadang-kadang tingkah laku seseorang tidak hanya disebabkan oleh faktor hasil komunikasi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Model Aristoteles

Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik. Model ini sering disebut model retorik (*rhetorical model*). Aristoteles adalah filosof Yunani yang paling awal mengkaji komunikasi. Ia lah yang pertama kali merumuskan model komunikasi verbal. Menurut Aristoteles,

komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Ia mengemukakan tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara/*speaker*, pesan/*message*, dan pendengar/*listener*.

Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retorik, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (*public speaking*) atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato memang merupakan keterampilan penting yang digunakan di pengadilan dan di majlis *legislatur* dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Oleh karena semua bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi, Aristoteles tertarik menelaah sarana persuasi yang paling efektif dalam pidato.

Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa anda (etos-keterpercayaan anda), argumen anda (*logos*-logika dalam pendapat anda), dan dengan memainkan emosi khalayak (*pathos*-emosi khalayak). Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar. Persuasi berlangsung melalui khalayak ketika mereka diarahkan oleh pidato itu ke dalam suatu keadaan emosi tertentu.

4. Model Shanon dan Weaver

Salah satu model awal komunikasi dikemukakan Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku *The Mathematical Theory of Communication*. Model yang sering disebut model matematis

atau model teori informasi itu mungkin adalah model yang pengaruhnya paling kuat atas model dan teori komunikasi lainnya. Shannon adalah seorang insinyur pada *Bell Telephone* dan ia berkepentingan dengan penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Weaver mengembangkan konsep Shannon untuk menerapkannya pada semua bentuk komunikasi.

Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi-balik atau mencipta-ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran (*channel*) adalah medium yang mengirimkan sinyal (tanda) dari *transmitter* ke penerima (*receiver*). Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal (kata-kata terucapkan), yang ditransmisikan lewat udara (lewat saluran).

5. Model Schramm

Wilbur Schramm membuat serangkai model komunikasi, dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana, lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua

individu. Model pertama mirip dengan model Shannon dan Weaver. Dalam modelnya yang kedua Schramm memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaran-lah yang sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Model ketiga Schramm menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi-balik, mentransmisikan dan menerima sinyal. Di sini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagi informasi.

Menurut Wilbur Schramm, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur: sumber (*source*), pesan (*message*), dan sasaran (*destination*). Sumber boleh jadi seorang individu (berbicara, menulis, menggambar, memberi isyarat) atau suatu organisasi komunikasi (seperti sebuah surat kabar, penerbit, stasiun televisi, atau studio film). Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara, atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Sasarannya mungkin seorang individu yang mendengarkan, menonton atau membaca; atau anggota suatu kelompok, seperti kelompok diskusi, khalayak pendengar ceramah, kumpulan penonton sepakbola, atau anggota khalayak media massa.

6. Model Newcomb

Theodore Newcomb memandang komunikasi dari *perspektif* psikologi- sosial. Dalam model Newcomb, komunikasi adalah suatu cara

yang lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh suatu keseimbangan kekuatan-kekuatan dan bahwa setiap perubahan dalam bagian manapun dari sistem tersebut akan menimbulkan suatu ketegangan terhadap keseimbangan atau simetri, karena ketidakseimbangan atau kekurangan simetri secara psikologis tidak menyenangkan dan menimbulkan tekanan internal untuk memulihkan keseimbangan.

7. Model Berlo

Model lain yang dikenal luas adalah model David K. Berlo, yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (saluran), dan *Receiver* (penerima). Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat; saluran adalah medium yang membawa pesan; dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi.

Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi (*encoder*) dan penyandi-balik (*decoder*) dalam proses komunikasi. *Encoder* bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Dalam situasi tatap-muka, fungsi penyandian dilakukan lewat mekanisme vokal dan sistem otot sumber yang menghasilkan pesan verbal dan nonverbal. Akan tetapi, mungkin juga terdapat seorang lain yang menyandi pesan.

Misalnya, Menteri Sekretaris Negara dapat berfungsi sebagai penyandi dalam konferensi pers. Senada dengan itu, penerima membutuhkan penyandi-balik untuk menerjemahkan pesan yang ia terima. Dalam kebanyakan kasus, penyandi-balik adalah perangkat keterampilan indrawi penerima.

Model komunikasi yang dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 telah menjadi dasar penting dalam studi komunikasi. Teori ini dikenal sebagai Model Matematika Komunikasi, dan tujuannya adalah memberikan kerangka kerja untuk memahami proses komunikasi dalam konteks teknis dan ilmiah. Model ini terutama digunakan untuk menggambarkan komunikasi dalam sistem telekomunikasi, tetapi konsep-konsepnya juga dapat diterapkan pada berbagai konteks komunikasi (Shannon et al., 1949).

Menurut Shannon dan Weaver, Model komunikasi terdiri dari beberapa elemen kunci, yaitu pengirim (sender), pesan (message), saluran (channel), penerima (receiver), encoding, decoding, dan noise. Mari kita bahas setiap elemen ini lebih rinci.

Model komunikasi pemerintahan adalah suatu konsep yang mengacu pada cara pemerintah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan entitas lainnya. Komunikasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan publik, membangun hubungan dengan warganegara, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi beberapa elemen utama dalam model komunikasi pemerintahan.

- a. Komunikasi Internal Pemerintahan: Komunikasi internal di dalam pemerintahan adalah landasan dari efektivitas suatu negara. Pemerintahan harus memiliki saluran komunikasi yang efisien antar unit dan departemen untuk memastikan arus informasi yang tepat. Ini mencakup pertukaran informasi antar kementerian, lembaga, dan tingkatan pemerintahan yang berbeda (Grawe et al., 2023).
- b. Komunikasi Eksternal Pemerintahan: Komunikasi eksternal pemerintahan mencakup interaksi antara pemerintah dan pihak eksternal seperti masyarakat, sektor bisnis, organisasi nirlaba, dan media. Pemerintah harus dapat mengkomunikasikan kebijakan, program, dan inisiatifnya secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan eksternal (Zhang et al., 2020).
- c. Komunikasi Kebijakan Publik: Salah satu fungsi penting pemerintah adalah merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik. Model komunikasi pemerintahan harus mencakup strategi untuk menjelaskan, membela, dan mempromosikan kebijakan-kebijakan ini kepada masyarakat (Kim & Shim, 2020). Ini termasuk pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman warganegara tentang dampak dan tujuan kebijakan.
- d. Media dan Hubungan Masyarakat: Media memainkan peran kunci dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah perlu

memiliki strategi komunikasi yang efektif dengan media, termasuk konferensi pers, rilis pers, dan interaksi langsung dengan wartawan (Dunan & Mudjiyanto, 2020). Selain itu, hubungan masyarakat pemerintah juga harus memastikan bahwa citra pemerintah di mata masyarakat dijaga dengan baik.

- e. Partisipasi Masyarakat: Model komunikasi pemerintahan yang efektif juga memasukkan elemen partisipasi masyarakat. Pemerintah harus membuka saluran untuk mendengar aspirasi, kekhawatiran, dan pendapat masyarakat terkait kebijakan dan keputusan yang diambil (Yuan et al., 2023). Ini dapat dilakukan melalui dialog, forum partisipatif, atau konsultasi publik.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah yang transparan dan akuntabel memiliki komunikasi yang jujur dan terbuka. Model komunikasi pemerintahan harus mencakup upaya untuk memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat (Roundy et al., 2023). Ini mencakup penyediaan laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan informasi terkait lainnya.
- g. Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi. Model komunikasi pemerintahan modern mencakup penggunaan platform digital, media sosial, dan teknologi informasi lainnya untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan efektif (Zhou et al., 2023). Inovasi dalam teknologi juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.

- h. Manajemen Krisis dan Darurat: Komunikasi pemerintahan menjadi sangat kritis selama situasi krisis dan darurat (Hagen et al., 2020). Model ini harus mencakup strategi komunikasi yang cepat dan tepat untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat, meredakan kepanikan, dan memberikan arahan yang jelas.

Penting untuk diingat bahwa model komunikasi pemerintahan tidak bersifat statis. Seiring perubahan lingkungan politik, sosial, dan teknologis, pemerintah perlu terus beradaptasi dengan model komunikasi yang relevan dan efektif. Model yang sukses akan mencerminkan nilai-nilai demokrasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganegara.

Pemahaman mengenai berbagai jenis model komunikasi adalah kunci untuk menyelidiki dan menggali dinamika proses komunikasi. Model-model tersebut memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pesan disampaikan, dipahami, dan meresap di antara pihak-pihak yang terlibat. Dari model linier yang sederhana hingga model transaksional yang lebih kompleks, setiap pendekatan mencerminkan berbagai aspek dan nuansa dalam interaksi manusia. Seiring dengan perkembangan teori komunikasi, penelitian dan aplikasi model-model ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan meningkatkan komunikasi di berbagai konteks.

Model-model komunikasi mencakup berbagai kerangka kerja dan teori yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses komunikasi. Beberapa model tersebut merinci unsur-unsur dasar, dinamika, dan faktor-faktor yang

memengaruhi komunikasi manusia. Di bawah ini, akan dijelaskan beberapa model komunikasi yang mewakili berbagai pendekatan dan konsep.

1. Model Linier (Linear Model):

Model linier adalah salah satu model komunikasi yang paling sederhana. Dalam model ini, komunikasi dipandang sebagai suatu garis lurus dari pengirim (sender) ke penerima (receiver). Elemen-elemen kunci melibatkan pengirim yang menghasilkan pesan, mentransmisikan pesan melalui saluran, dan penerima yang menerima dan merespon pesan (Rohayatin et al., 2022). Model ini ditemukan dalam karya-karya awal seperti model komunikasi Shannon dan Weaver yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Model Interaksional (Interactive Model):

Model interaksional membawa konsep interaksi dan umpan balik ke dalam pemahaman komunikasi. Dalam model ini, komunikasi dipandang sebagai pertukaran pesan yang melibatkan pengirim dan penerima secara bergantian. Umpan balik menjadi elemen kunci, di mana penerima merespon pesan dan memberikan tanggapan, membentuk suatu siklus interaktif (Llopis-Lorente et al., 2017). Model ini mencerminkan sifat dinamis dan saling ketergantungan dalam proses komunikasi.

3. Model Transaksional (Transactional Model):

Model transaksional, dikembangkan oleh Barnlund dan berdasarkan konsep transaksi, menekankan bahwa komunikasi adalah suatu pertukaran dinamis di mana kedua pihak, pengirim dan penerima,

saling berkontribusi pada pembentukan pesan (Cerrone & Mäekivi, 2021). Dalam model ini, komunikasi dipahami sebagai suatu aktivitas yang terus menerus, dan umpan balik menjadi elemen yang sangat penting. Pesan tidak hanya dikirim dan diterima tetapi juga dibangun bersama dalam interaksi.

4. Model Konstitutif (Constitutive Model):

Model konstitutif menggeser fokus dari pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan menjadi pemahaman komunikasi sebagai pembentukan realitas. Pemikiran teoritis ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang mentransfer informasi, tetapi juga tentang bagaimana komunikasi membentuk dan menciptakan makna. Model ini menyoroti peran bahasa, simbol, dan konteks dalam membentuk realitas sosial (Cassinger, 2018).

5. Model Sosial-Konstruktivis (Social Constructivist Model):

Model ini memperluas pandangan konstitutif dengan menekankan konstruksi sosial dari makna. Menurut perspektif ini, makna tidak ditemukan tetapi dibangun oleh masyarakat melalui interaksi dan budaya. Proses komunikasi menjadi sarana utama untuk menyusun dan memperbarui makna dalam suatu konteks sosial (Matteucci, 2015).

6. Model Komunikasi Partisipatif:

Model komunikasi partisipatif mencerminkan pendekatan yang esensial dalam membangun keterlibatan aktif dan demokratis dalam proses komunikasi. Dengan fokus pada pemberian peran yang signifikan kepada

semua pihak yang terlibat, model ini mempromosikan keterlibatan aktif dan menciptakan platform untuk kolaborasi yang efektif. Di dalamnya, setiap individu atau kelompok dianggap sebagai kontributor berharga, diakui atas nilai dan pengalaman yang dimilikinya (de la Casa & Caballero, 2021).

Ciri khas dari model komunikasi partisipatif adalah terbukanya saluran komunikasi. Informasi disampaikan secara transparan, memastikan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tujuan komunikasi. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan di mana setiap peserta memiliki akses ke informasi relevan dan dapat berpartisipasi secara berpengetahuan. Selain itu, model ini sering diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan yang demokratis, di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembentukan keputusan. Dengan demikian, model komunikasi partisipatif membangun lingkungan inklusif yang mendukung kerjasama dan pengambilan keputusan yang lebih holistik.

Model-model komunikasi yang telah dijelaskan di atas mencerminkan keragaman pendekatan dan pandangan terhadap proses komunikasi. Setiap model menyoroti aspek-aspek unik dan memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Dalam kenyataannya, banyak situasi komunikasi melibatkan kombinasi dari berbagai model ini, tergantung pada konteks, tujuan, dan karakteristik pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman

mendalam terhadap model-model ini membantu kita menjelajahi kompleksitas komunikasi manusia dalam berbagai situasi kehidupan.

D. Komunikasi Islam

Teori Komunikasi Islam adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip komunikasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam tataran ini, komunikasi harus dipraktikkan dengan nilai-nilai profetik yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an. Teori ini menekankan pada pentingnya kejujuran, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesantunan dalam berkomunikasi. Selain itu, konsep-konsep komunikasi kenabian turut menjadi bagian integral dari teori ini, menjadikan komunikasi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai dalam tataran sosial (Faridah et al., 2023).

Teori komunikasi Islam adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis aspek komunikasi dalam konteks budaya, agama, dan nilai-nilai Islam. Ini adalah bidang studi yang berkembang pesat dalam ilmu komunikasi, yang membahas bagaimana Islam mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya (Khiabany, 2021). Teori komunikasi Islam mengidentifikasi elemen-elemen yang unik dalam komunikasi di dunia Muslim, serta peran agama dalam membentuk pesan dan interaksi sosial. Pemahaman teori ini penting dalam konteks globalisasi dan diversifikasi budaya, karena memungkinkan kita untuk merespons tantangan komunikasi lintas budaya dengan lebih baik.

Salah satu konsep utama dalam teori komunikasi Islam adalah akhlak atau etika komunikasi. Islam menekankan pentingnya berkomunikasi dengan cara yang

jujur, adil, dan santun. Akhlak komunikasi adalah bagian integral dari praktik Islam sehari-hari, baik dalam interaksi interpersonal maupun dalam media massa (Istiani & Islamy, 2020). Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, penghormatan terhadap orang lain, dan sikap saling pengertian. Dalam budaya Islam, komunikasi yang baik dianggap sebagai wujud ibadah dan upaya untuk mencapai kedamaian dan harmoni di antara individu dan komunitas.

Teori komunikasi Islam juga membahas peran Al-Quran dan Hadis dalam komunikasi. Al-Quran adalah sumber utama panduan dalam hidup Muslim, dan banyak ajaran agama Islam disampaikan melalui teks ini. Dalam konteks komunikasi, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana berkomunikasi dengan bijak dan menghindari tindakan yang tidak etis. Hadis, yang berisi kutipan dan tindakan Nabi Muhammad, juga digunakan sebagai pedoman untuk berkomunikasi dengan benar dalam kehidupan sehari-hari (Robot, 2023).

Selain itu, teori komunikasi Islam menyoroti pentingnya pemahaman konteks budaya dalam komunikasi. Islam adalah agama global yang memiliki banyak subkultur dan perbedaan budaya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana praktik komunikasi dapat bervariasi di seluruh dunia Muslim. Ini melibatkan mempertimbangkan aspek seperti bahasa, norma budaya, dan tradisi komunikasi dalam berbagai masyarakat Islam.

Teori komunikasi Islam juga mencakup peran teknologi modern dalam menyebarkan pesan-pesan agama. Internet dan media sosial telah menjadi platform penting dalam menyebarkan pesan-pesan agama dan mendukung

komunikasi antarumat beragama. Namun, teknologi ini juga membawa tantangan dalam bentuk penyebaran informasi palsu atau radikalisme online. Oleh karena itu, teori komunikasi Islam juga mencoba menjelaskan bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan dunia digital dan mengatasi isu-isu tersebut.

Secara keseluruhan, teori komunikasi Islam adalah disiplin yang penting dalam memahami bagaimana komunikasi berlangsung dalam konteks budaya dan agama Islam. Ini membantu kita menjalani komunikasi dengan etika yang sesuai, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pesan-pesan kita, dan menghormati keanekaragaman budaya yang ada dalam dunia Muslim. Dalam era globalisasi dan teknologi modern, pemahaman yang lebih baik tentang teori ini penting dalam mempromosikan dialog antarbudaya dan perdamaian di seluruh dunia (Sufah et al., 2023).

Moderasi beragama dalam konteks komunikasi Islam adalah prinsip penting yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa dan komunikasi yang seimbang, penuh toleransi, dan tidak ekstrem dalam berbicara tentang agama (Tanjung, 2022). Ini berarti bahwa dalam berkomunikasi mengenai Islam, individu harus menjaga agar pesan-pesan agama disampaikan dengan cara yang menghargai keragaman, menghindari retorika eksklusif atau menggurui, dan mempromosikan dialog konstruktif.

Secara ilmiah, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi antara individu atau entitas melalui berbagai media atau metode. Ini melibatkan penyampaian pesan dari satu pihak (pengirim) kepada pihak lain (penerima) dengan tujuan tertentu. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai

bentuk, seperti lisan, tertulis, non-verbal, elektronik, dan sebagainya. Proses ini melibatkan kodifikasi (pengirim mengubah pesan menjadi bentuk yang dapat dipahami), transmisi (pengirim mengirimkan pesan), dan dekodifikasi (penerima mengurai pesan dan memahaminya).

Alquran menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan bijaksana(QS. An-Nahl: 125). Komunikasi Islam dilandasi oleh akhlak yang tinggi, menghindari ucapan yang tidak berguna, fitnah atau menyinggung (QS. Al-Hujurat: 11-12). Lebih dari itu, Alqur'an juga menganjurkan untuk mendengarkan baik-baik dan menjawab dengan santun(QS. Al-Baqarah: 83).

Berikut adalah ciri-ciri komunikasi Islam menurut Alquran:

1. Gunakan bahasa yang baik

Komunikasi Islam membutuhkan penggunaan bahasa yang baik dan sopan serta menghindari kata-kata kasar atau menyakitkan. “Dan beri tahu hamba-hamba-Ku bahwa mereka harus mengucapkan kata-kata yang baik. Sungguh, Setan telah menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, Setan adalah musuh umat manusia yang sebenarnya.” (QS. Al-Isra: 53). Dengan mengutamakan kata-kata yang baik, komunikasi Islam dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengertian. (Joko Susanto, 2020)

2. Mengutamakan kejujuran

Komunikasi Islam berakar pada kejujuran dan keterbukaan. Nabi Muhammad Saw. selalu dikenal sebagai “Al-Amin” atau orang yang dapat dipercaya karena integritasnya dalam berkomunikasi. “Hai orang-orang

yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah yang benar.” (QS. Al-Ahzab: 70). Kejujuran dalam berkomunikasi mencerminkan ketulusan hati dan menghindari kesalahan atau penipuan (Herman Jamaluddin et al., 2020).

3. Mendengarkan secara aktif

Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan bagian integral dari komunikasi islam. Dalam Alqur'an, Allah memuji orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik dari mereka (QS. Az-Zumar: 18).

4. Hindari fitnah

Komunikasi islam menekankan untuk menghindari penyebaran fitnah atau desas-desus negatif tentang orang lain, karena hal ini dapat merusak hubungan dan menimbulkan kebencian (QS. Al-Hujurat: 12).

5. Memberi nasehat yang lembut

Komunikasi Islam mencerminkan nasehat dengan kelembutan dan ketulusan dengan niat yang baik. “Mari kita berpegang teguh pada tali (agama) Allah, dan tidak dipisahkan.” (QS. Al-Imran: 103). Nasehat yang diberikan dengan lembut mungkin lebih baik diterima dan berdampak positif pada hubungan sosial. Komunikasi islam menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang harmonis, penuhkasih sayang dan pengertian dalam kehidupan sosial, terutama dalam keluarga. Prinsip komunikasi Islam dari Alqur'an dan hadits menekankan pentingnya bahasa yang baik, kejujuran, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghindari fitnah, dan

nasihat yang lembut. (Mansuretal., 2022) Dengan melaksanakan prinsip komunikasi Islam dalam keluarga, diharapkan setiap anggota keluarga dapat merasakan kehangatan dan kedamaian yang terpancar dari keharmonisan dalam berinteraksi satu sama lain.

Komunikasi Islam dalam tataran keilmuan selalu dihubungkan dengan etika komunikasi yang ada di dalam Alquran. Adapun nilai nilai komunikasi yang terkandung dalam Alquran adalah:

Tabel 1.
Etika Komunikasi dalam Alquran.

No	Etika Komunikasi	Dalil Al-Qur'an
1.	<i>Qaulan Sadiidan</i>	(QS. An-Nisaa' [4]: 9 dan QS. Al-Ahzab [33]: 70)
2.	<i>Qaulan Baliighan</i>	(QS. An-Nisaa' [4]: 63)
3.	<i>Qaulan Masyuuran</i>	(QS. Al-Israa' [17]: 28)
4.	<i>Qaulan Layyinan</i>	(QS. Thaahaa (20): 44)
5.	<i>Qaulan Kariiman</i>	(QS. Al-Israa' [17]: 23)
6.	<i>Qaulan Ma'ruufan</i>	(QS. An-Nisaa' [4]: 5)

Komunikasi juga melibatkan elemen-elemen seperti pesan, saluran komunikasi, konteks, noise (gangguan), serta pengaruh konteks sosial dan budaya. Tujuan komunikasi dapat bervariasi, termasuk informasi, persuasi, hiburan, atau koordinasi.

Dalam konteks umum, komunikasi melibatkan studi tentang bagaimana pesan dikomunikasikan, diterima, dan memengaruhi perilaku individu atau

kelompok dalam berbagai situasi. Penelitian ini melibatkan aspek-aspek seperti psikologi komunikasi, teori komunikasi, analisis pesan, dan sosial dalam rangka memahami bagaimana komunikasi berperan dalam kehidupan manusia dan dalam berbagai konteks sosial.

Moderasi beragama dalam konteks komunikasi Islam adalah prinsip penting yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa dan komunikasi yang seimbang, penuh toleransi, dan tidak ekstrem dalam berbicara tentang agama (Tanjung, 2022). Ini berarti bahwa dalam berkomunikasi mengenai Islam, individu harus menjaga agar pesan-pesan agama disampaikan dengan cara yang menghargai keragaman, menghindari retorika eksklusif atau menggurui, dan mempromosikan dialog konstruktif (Hati et al., 2023).

Moderasi beragama juga berarti menghindari retorika yang memicu konflik antaragama, serta berperan dalam pendidikan masyarakat tentang prinsip-prinsip moderasi dalam Islam. Dengan menerapkan moderasi beragama dalam komunikasi Islam, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat.

E. Teori Komunikasi Interkultural

Teori komunikasi interkultural adalah bidang studi yang memeriksa cara komunikasi terjadi antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Lebih lanjut lagi, teori ini dikembangkan menjadi Teori Dimensi Budaya, yang membandingkan budaya nasional berdasarkan sejumlah dimensi, seperti individualisme-kolektivisme, jarak kekuasaan, dan ketidakpastian yang dihindari.

Teori ini membantu memahami perbedaan budaya dalam komunikasi (Hofstede, 2018).

Teori komunikasi interkultural adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung antara individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda (R'boul, 2022). Teori ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan budaya, seperti nilai-nilai, keyakinan, norma, dan bahasa, mempengaruhi proses komunikasi. Dalam era globalisasi yang semakin mendalam, pemahaman komunikasi antarbudaya menjadi semakin penting dalam mengatasi perbedaan dan mempromosikan pemahaman lintas budaya (Braslauskas, 2021).

Salah satu konsep sentral dalam teori komunikasi interkultural adalah "pengkodean" dan "dekoding." Pengkodean mengacu pada bagaimana pesan dikirim oleh pengirim dalam konteks budaya mereka, sementara dekoding mengacu pada bagaimana pesan tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh penerima dalam konteks budaya mereka. Perbedaan budaya dalam cara pengkodean dan dekoding pesan dapat menyebabkan ketidakpahaman atau kesalahan komunikasi.

Teori komunikasi interkultural juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya atau "*cultural awareness* (Kaihlanen et al., 2019)." Ini melibatkan kesadaran individu tentang nilai-nilai, norma, dan keyakinan dalam budaya mereka sendiri, serta budaya orang lain. Kesadaran budaya membantu dalam menghindari kesalahan dan konflik komunikasi yang dapat timbul akibat stereotip atau prasangka (Kumlien et al., 2020).

Selain itu, teori ini membahas pentingnya adaptasi komunikasi dalam konteks budaya yang berbeda. Kemampuan untuk mengadaptasi komunikasi agar lebih sesuai dengan budaya penerima pesan adalah keterampilan penting dalam komunikasi intercultural (Baker, 2022). Ini melibatkan fleksibilitas dalam bahasa, gaya berbicara, dan bahkan bahasa tubuh.

Teori komunikasi interkultural menyoroti peran penting dalam mendukung dialog dan perdamaian antarbudaya. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, komunikasi yang efektif antarbudaya merupakan landasan untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman (Balakrishnan et al., 2021). Teori ini membantu membentuk strategi dan pendekatan yang mendukung dialog dan kerjasama yang lebih baik antara individu dan kelompok budaya yang berbeda.

Dalam tataran ini, Pemerintah Kota Tanjung Balai, melalui komunikasinya, terlibat dalam dialog dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam. Teori komunikasi interkultural menyoroti pentingnya memahami perbedaan budaya dan agama dalam komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman, konflik, dan membangun pemahaman yang mendalam.

1. Pemahaman Nilai Kearifan Lokal: Teori ini menekankan perlunya pemerintah memahami nilai-nilai kearifan lokal di Tanjung Balai, termasuk norma-norma budaya dan agama setempat. Melalui komunikasi yang interkultural, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik

dengan masyarakat dan membangun kebijakan moderasi beragama yang menghormati nilai-nilai setempat (Prasojo & Pabbajah, 2020).

2. **Adaptasi Komunikasi:** Teori ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi komunikasi terhadap keberagaman budaya. Pemerintah perlu menyusun pesan-pesan yang mempertimbangkan variasi budaya dan agama di Kota Tanjung Balai agar dapat meresap dan diterima oleh beragam lapisan masyarakat (Rahman, 2021).
3. **Pembangunan Identitas Bersama:** Komunikasi interkultural dapat membantu membangun identitas bersama di tengah keragaman agama dan budaya. Pemerintah perlu membangun naratif yang inklusif dan mendalam, menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk merasa diakui dalam proses moderasi beragama (Hefni, 2020).
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Teori ini menekankan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Pemerintah dapat melibatkan kelompok-kelompok agama dalam dialog terbuka, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan moderasi beragama yang lebih berkelanjutan (Ridwan, 2021).
5. **Mengelola Konflik Budaya:** Teori komunikasi interkultural membantu pemerintah dalam mengelola potensi konflik budaya yang mungkin muncul selama proses moderasi beragama. Pemerintah perlu memiliki strategi komunikasi yang bijaksana untuk menyelesaikan ketegangan dan mempromosikan pemahaman saling menghormati (Mukhibat et al., 2023).

Dengan mengadopsi teori komunikasi interkultural, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi mereka dalam membangun moderasi beragama yang berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. Penerapan prinsip-prinsip interkultural membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif, menghormati keberagaman, dan memajukan tujuan moderasi beragama secara berkelanjutan.

Teori ini membahas cara komunikasi yang efektif dapat terjadi antara individu atau kelompok dari berbagai budaya. Dalam hal ini, implementasi moderasi beragama yang berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai menghadapi tantangan interkultural yang perlu diatasi.

Teori komunikasi interkultural menyoroti pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Pemerintah perlu mengakui dan memahami keberagaman budaya dan agama di Kota Tanjung Balai. Oleh karena itu, pesan-pesan moderasi beragama harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman etnis, bahasa, dan tradisi agama di masyarakat. Komunikasi interkultural dalam hal ini berarti menciptakan pesan yang dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya.

Kemudian, teori komunikasi interkultural menekankan pentingnya pengelolaan konflik budaya. Dalam konteks moderasi beragama, mungkin ada perbedaan pemahaman, nilai, dan keyakinan antarwarga. Pemerintah perlu menggunakan komunikasi interkultural untuk merespon konflik budaya dan memfasilitasi dialog konstruktif. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan ruang bagi warga Kota Tanjung Balai untuk berbicara tentang

perbedaan mereka dan mencari solusi bersama untuk mencapai moderasi beragama.

Terakhir, teori komunikasi interkultural menekankan pentingnya adaptasi komunikasi. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan gaya komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks budaya. Pesan-pesan moderasi beragama harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya setempat (Machwate et al., 2021). Komunikasi yang efektif akan terjadi ketika pemerintah mampu memahami konteks budaya dan mengomunikasikan pesan mereka dengan mempertimbangkan keunikan dan keberagaman masyarakat Tanjung Balai.

Dengan menerapkan teori komunikasi interkultural, pemerintah dapat membangun jembatan komunikasi yang lebih baik antara berbagai kelompok etnis dan agama di Kota Tanjung Balai. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan budaya, manajemen konflik yang efektif, dan adaptasi komunikasi yang tepat, proses pembangunan moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal dapat berjalan lebih lancar dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan.

F. Teori Komunikasi Pembangunan

Teori Komunikasi Pembangunan adalah sebuah paradigma yang menekankan peran penting komunikasi dalam upaya pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (Dai & Chen, 2017). Penerapan teori ini memandang komunikasi sebagai alat yang dapat membentuk pemahaman, memotivasi partisipasi masyarakat, dan memicu perubahan sosial yang positif. Dalam

kerangka ini, komunikasi tidak hanya dianggap sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai katalisator yang dapat membentuk persepsi, nilai, dan perilaku individu serta kelompok dalam suatu masyarakat.

Salah satu prinsip utama teori ini adalah partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan (Rogers, 1962). Hal ini menekankan bahwa pembangunan yang berhasil memerlukan keterlibatan langsung dari masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, di mana komunikasi bukan hanya sebagai alat penyampaian pesan dari pemerintah atau lembaga pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks global, teori komunikasi pembangunan telah membuktikan nilai esensialnya dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Penerapannya dapat terlihat dalam upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengelola isu-isu lingkungan. Komunikasi pembangunan juga menjadi sarana untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menciptakan dialog antarbudaya, dan merangsang tindakan kolektif terkait dengan perubahan iklim.

Meskipun demikian, teori ini tidak tanpa kritik. Beberapa penilaian mengarah pada kecenderungan pendekatan top-down, di mana pemerintah atau lembaga pembangunan menentukan agenda komunikasi tanpa memadukan dengan aspirasi masyarakat. Kritik juga mengenai ketidakmerataan dalam pola komunikasi yang dapat memunculkan disparitas akses informasi, serta

kekhawatiran bahwa teori ini mungkin hanya mengatasi gejala tanpa menangani akar masalah pembangunan.

Sebagai studi kasus, penerapan komunikasi pembangunan di Kota Tanjung Balai dapat mencakup upaya untuk membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan moderasi beragama. Pemanfaatan media lokal, seperti radio atau surat kabar setempat, dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama secara sesuai dengan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal (Atasoge et al., 2023).

Secara keseluruhan, teori komunikasi pembangunan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menerapkan komunikasi dalam konteks pembangunan. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, pemerintah dan lembaga pembangunan dapat mengoptimalkan peran komunikasi sebagai instrumen untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat, menjadikannya sebagai bagian integral dari upaya menuju pembangunan berkelanjutan.

Komunikasi pembangunan memegang peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan kota, terutama dalam upaya pemerintah Kota Tanjung Balai untuk membentuk moderasi beragama yang berbasis nilai kearifan lokal. Dalam lingkungan yang dipenuhi dengan keberagaman budaya dan agama, komunikasi menjadi alat utama untuk membentuk persepsi, memotivasi partisipasi masyarakat, dan menciptakan pemahaman bersama. Penting untuk memahami bahwa komunikasi dalam konteks ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran yang mendalam tentang keberagaman yang ada (Manalu, 2023).

Kota Tanjung Balai, dengan dinamikanya yang unik, menghadapi tantangan dalam memfasilitasi dialog antarumat beragama. Komunikasi pembangunan dapat menjadi kunci untuk membuka pintu kesadaran masyarakat akan keberagaman ini. Pemerintah perlu menggunakan media komunikasi yang efektif, seperti radio lokal, televisi, dan platform online, untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis.

Komunikasi pembangunan juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin ada di antara masyarakat. Dengan menyajikan narasi yang inklusif dan memberikan ruang bagi berbagai pandangan, pemerintah dapat melalui komunikasi membentuk pemahaman bersama tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi dasar moderasi beragama.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi pembangunan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembangunan moderasi beragama. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam forum-forum partisipatif, mendengarkan aspirasi mereka, dan menciptakan ruang untuk dialog terbuka. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya menjadi saluran satu arah, tetapi menjadi jembatan interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam menghadapi kompleksitas keberagaman, penggunaan bahasa yang membumi dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat menjadi kunci. Komunikasi yang efektif harus mampu menembus berbagai lapisan sosial, dari kelompok agama utama hingga masyarakat minoritas, sehingga pesan-pesan

moderasi beragama dapat meresap secara merata dan diterima dengan baik oleh seluruh komunitas (Latifah & Umah, 2022).

Penting juga untuk memanfaatkan media lokal dalam mendukung komunikasi pembangunan. Radio lokal, misalnya, dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mencapai lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah pedesaan yang mungkin memiliki akses terbatas pada media mainstream. Melalui siaran radio, pemerintah dapat menyampaikan informasi, cerita inspiratif, dan diskusi yang mendorong pemahaman tentang moderasi beragama.

Komunikasi pembangunan juga harus memperhitungkan konteks budaya dan nilai-nilai kearifan lokal (Aksa & Nurhayati, 2020). Bahasa dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi harus sesuai dengan konteks setempat. Pemerintah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam proses komunikasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal tercermin dengan baik dan dipahami oleh masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa komunikasi pembangunan bukanlah tugas yang selesai sekaligus, tetapi suatu upaya berkelanjutan. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas pesan-pesan yang disampaikan dan tingkat partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam strategi komunikasinya (Raharjo, n.d.).

Dengan memahami peran dan kekuatan komunikasi pembangunan, pemerintah Kota Tanjung Balai dapat membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman agama dan budaya. Komunikasi yang

bijaksana, inklusif, dan berkelanjutan akan membawa dampak positif dalam membentuk moderasi beragama yang sesuai dengan nilai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat Kota Tanjung Balai.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti menghadirkan Beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai perbandingan antara apa yang sudah pernah diteliti dengan apa yang saat ini penulis teliti. Penelitian tersebut yakni:

1. Judul Penelitian: “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia’s Diversity”, yang diteliti oleh Agus Akhmadi. Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dilakukan pada tahun 2019 dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuh

kembangkan moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.

2. Judul Penelitian: “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah”, yang diteliti oleh Rinda Fauzian, Hadiat, Peri Ramdani, Mohamad Yudiyanto. Penelitian ini merupakan karya ilmiah S2 yang dilakukan pada tahun 2021 dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal di madrasah dapat membentuk budaya berpikir moderat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Orientasi penelitian ini ialah pada fenomena alami, maka sifatnya mendasar dan naturalistik atau *naturalistic inquiry*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian pustaka). Hasil penelitian ini menunjukkan, penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal di madrasah dapat membentuk budaya berpikir moderat melalui metode pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan. Setelah dianalisis, bentuk penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal dan implikasinya terhadap pembentukan budaya berpikir moderat pada siswa antara lain: (1) Bentuk penguatan moderasi beragama ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstrakurikuler ialah melalui metode pembiasaan yang aplikasinya dengan kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan. Pembiasaan tersebut menjadi produk budaya siswa dan dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat (pemberdayaan), (2) Implikasi dari penguatan moderasi beragama berbasis

kearifan lokal ialah siswa yang memiliki budaya berpikir moderat dalam pemikiran, perbuatan dan Gerakan. Manifestasi dari sikap tersebut ialah siswa memiliki sikap komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi dan mengakomodasi budaya lokal.

3. Judul Penelitian: “Komunikasi Lintas Budaya dalam Menjaga Kerukunan antara Umat Beragama di Kampung Jatton Minahasa”, yang diteliti oleh Sinta Paramita, Wulan Purnama Sari. Penelitian ini merupakan karya ilmiah S2 yang dilakukan pada tahun 2016 dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal di madrasah dapat membentuk budaya berpikir moderat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informasi yang disampaikan kemudian dikumpulkan. Data yang berupa kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti terdalam. Sesudahnya peneliti membuat perenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, yang fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus hasil bahwa terjadi akulturasi antara warga yang beragama Islam dengan yang beragama

Kristen. Akulturasi ini menandakan bahwa interaksi yang terbentuk antara kedua kelompok agama merupakan pola interaksi asosiatif, sehingga tidak terjadi konflik seperti yang terdapat pada daerah lain.

4. Penelitian berjudul : “Model Komunikasi Harmonis Antarpemeluk Agama di Sorong Papua Barat” yang diteliti oleh Ali Nurdin, Pudji Rahmawati, Sulhawi Rubba. Penelitian ini merupakan karya ilmiah S2 yang dilakukan pada tahun 2020 dan dikutip pada tahun 2023. : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan model komunikasi harmonis antarpemeluk agama, serta faktor pendukung dan penghambat terjadinya komunikasi harmonis di Kota Sorong, Papua Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami proses dan model komunikasi antar pemeluk agama. Subjek penelitian ini tokoh lintas agama di Kota Sorong berjumlah tujuh informan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa proses komunikasi harmonis antarpemeluk agama dilakukan melalui tahapan penataan harmoni dan produktivitas. Tahapan penataan harmoni dilakukan melalui proses menanamkan rasa saling pengertian, toleransi, dan saling menghormati antarpemeluk agama. Tahapan ini menghasilkan produktivitas yaitu terwujudnya kerukunan antarumat beragama, dan melahirkan model komunikasi harmonis yang dibangun berdasarkan kerukunan, toleransi, dan kerja sama. Faktor pendukung komunikasi harmonis adalah adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB), peran agama dan budaya, dan implementasi konsep hidup berbagi sebagai karakter khas masyarakat Papua. Faktor penghambatnya adalah adanya kesenjangan sosial-ekonomi, mudarnya nilai adat kebersamaan akibat arus modernisasi, dan komunikasi yang tidak efektif antara pemimpin lokal dengan rakyat, serta dengan pemimpin nasional.

5. Penelitian berjudul “Konsep Husn Al-Khuluq Menurut Al-Ghazali dan Relevansinya terhadap Sikap Moderasi Beragama” yang diteliti oleh Abdul Ghofur. Penelitian ini merupakan karya ilmiah S2 yang diteliti pada tahun 2022 dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep husn khuluq menurut Al-Ghazali dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* dan melihat relevansinya terhadap konsep moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah semua aspek terkait dengan tema yang diusung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep husn al-khuluq membutuhkan aspek bathiniyah seseorang. Adapun antara konsep moderasi beragama dan konsep husn al-khuluq memiliki titik tekan sama yaitu *al-i’tidal* (adil di tengah-tengah). Seseorang yang memiliki husn al-khuluq (akhlak yang baik) maka ia sudah moderat. Menurut al-Ghazali, setidaknya terdapat empat point penting yang menjadi dasar-dasar substansial yang membentuk akhlak yang baik (husn al-khuluq) yaitu *al-Hikmah*, *asy Syaja’ah*, *al-‘Iffah*, dan *al-‘Adlu*. Beberapa hal tersebut jika dilakukan dengan penuh keyakinan dapat membentuk karakter yang kuat bagi seseorang dalam sikap moderasi beragamanya.

6. Penelitian berjudul “Koeksistensi Berbasis Moderasi Beragama: Konstruksi Keharmonisan Antar Umat Beragama di Desa Gelangkulon Ponorogo” yang diteliti oleh Ardhana Januar Mahardhani. Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dilakukan pada tahun 2022 dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk praktik baik dalam moderasi beragama yang terjadi di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dua kepercayaan yang berbeda di Desa Gelangkulon hidup berdampingan, dan tidak pernah terjadi konflik dalam masyarakat. Metode dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh adalah bahwa praktik moderasi beragama yang sangat baik pada hakekatnya diatur oleh pemerintah dan dilaksanakan dengan baik pada masyarakat Desa Gelangkulon dapat dilihat dari empat indikator diantaranya; 1) Moderasi Nasional, 2) Toleransi, 3) Anti Kekerasan, dan 4) Akomodatif. Kesimpulan menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut masing-masing menunjukkan hasil yang positif di Desa Gelangkulon karena sinergi yang sangat baik antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok masyarakat, sehingga dari sinergi yang sangat baik ini dapat dilihat bahwa praktik moderasi beragama di Desa Gelangkulon sudah baik.
7. Selanjutnya literatur yang membahas Moderasi Beragama bagi kelas Menengah Muslim Indonesia: Tantangan dan solusinya. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masih ada stigmatisasi dikotomi antara

Muslim dan non-Muslim, membuat tantangan moderasi beragama menjadi masalah tersendiri. Masalah lain adalah hubungan internal Muslim, terutama kontestasi intra ajaran. Akibatnya, ini mengakibatkan kondisi Muslim retak. Mereka bersaing untuk pemimpin dalam mendorong wacana agama di ruang publik. Kedua kondisi ini terkait dengan semakin kuatnya agama sebagai preferensi masyarakat ketika berinteraksi sosial. Pada akhirnya yang terjadi kemudian adalah semacam pelabelan dan diferensiasi sosial dalam masyarakat. (Jati, 2023)

8. Literatur lain terkait pentingnya meneliti moderasi beragama dalam artikel berjudul Peran Moderasi Beragama Terhadap Kepuasan Hidup Generasi Z Muslim, yang menganalisis bahwa Terminologi moderasi beragama merupakan salah satu topik yang begitu banyak mendapat perhatian dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia saat ini karena dianggap memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan bagi individu maupun kelompok. Selain itu, dengan keberadaannya, penghargaan terhadap jaminan perbedaan agama dan ajaran yang dianut oleh individu dapat dicapai. (Ramdani et al., 2022)
9. Penelitian lain dilakukan oleh Saihu dan Marsiti, fokus pada "Pendidikan Karakter dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat". (Saihu dan Marsiti, 2019) Penelitian ini mengkaji pendidikan Karakter untuk memerangi radikalisme di Negeri 3 Kota Depok menggunakan praktik pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam kurikulum formal dan tersembunyi. Kurikulum formal biasanya

diprogram dan dibuat selama IHT di sekolah pada awal tahun ajaran, sedangkan kurikulum tersembunyi tidak dapat memisahkan keduanya untuk pencapaian tujuan pembelajaran seperti penanaman nilai. Oleh karena itu, ikuti ketentuan yang menerapkan kurikulum formal. Sifat keteraturan ditentukan oleh wali kelas di setiap kelas induk. penanaman nilai-nilai karakter disiplin dilakukan pada saat jam pelajaran dengan persetujuan guru mata pelajaran, dan pada saat ulangan atau ulangan harian penanaman nilai karakter kejujuran, penanaman nilai-nilai keramahan, kesopanan, kesopanan Karakter yang benar dipraktikkan dalam salam di dalam dan di luar kelas, dan pengembangan nilai-nilai pribadi Pendidikan agama dimulai dengan berdoa, membiasakan siswa membaca kitab suci masing-masing agama yang dianut, dan menanamkan nilai-nilai pribadi. Menyanyikan lagu wajib kebangsaan setelah sholat dan menanamkan nilai-nilai karakter cinta kebersihan dan peduli lingkungan menyampaikan cinta tanah air. Menjadwalkan pembersihan kelas, belajar tidak dimulai jika kelas kotor, dll. Ini semua adalah bagian dari kurikulum tersembunyi untuk mencapai kurikulum formal berbasis pendidikan karakter.

10. Penelitian tentang telaah terhadap konsep Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020 dilakukan oleh Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami. Artikel ini merupakan jawaban atas keprihatinan masyarakat bahwa saat ini banyak gerakan radikal yang terus melakukan propaganda dan terorisme. Telah diketahui bahwa kesalahan

dalam pemahaman agama mengarah pada sikap dan tindakan yang ekstrim. Jika hal ini dibiarkan, niscaya akan menimbulkan keretakan sosial di kemudian hari. Fenomena ini menjadi isu yang patut ditelaah agar tidak menimbulkan kerancuan di kalangan umat beragama di Indonesia.

11. Penelitian moderasi beragama di PTKIN sebelumnya telah dilakukan oleh Hani Hiqmatunnisa dan Ashif Az Zafi dengan judul Menerapkan Nilai Moderasi Islam pada Pembelajaran Fiqh di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learning.(Hiqmatunnisa & Zafi, 2020) artikel ini membahas terkait nilai-nilai moderat yang perlu dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam Indonesia. Hal ini karena akan menjadi ikatan persaudaraan dalam menghadapi kemajemukan tubuh Muslim itu sendiri dan keberagaman pihak lain. Pembelajaran Fiqh merupakan wadah untuk menanamkan nilai moderasi Islam dengan menghadirkan konsep pembelajaran berbasis masalah yang menuntut mahasiswa untuk membuka wawasan yang luas tentang perbedaan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Berada di antara diri sendiri dan bersikap moderat dalam menghadapi perbedaan yang muncul

12. Penelitian oleh Munir Is'adi, Ubaidillah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul tentang Membumikan Nilai-nilai Moderasi Beragama di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Suberjambes Jember tahun 2023. Dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut Moderasi beragama sesuatu yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, penanaman konsep moderasi beragama bias di

laksanakan disemua lini kehidupan masyarakat salah satunya adalah program kampung zakat. Kampung zakat merupakan salah satu program ihtiyar pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam masyarakat. Kegiatan kampung zakat di Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe. Model penanaman moderasi beragama dengan cara tiga model. Model penerapan moderasi beragama (toleransi (tasamuh), keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawazzun),) di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe melalui tiga bagian yakni : 1.Melalui Pendidikan, 2. Keagamaan dan 3 Budaya. Ada tiga model pendayagunaan zakat yang di gunakan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemenag Republik Indonesia yakni : 1. Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. 2, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, dan 3, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. Dari ketiga hal tersebut kita moderasi beragama akan tertanam dalam setiap individu masyarakat Indonesia dan Indonesia menjadi Negara yang damai, ramah makmur dan *Baladatun Thayyibatun wa Robbun Ghofur*.

Literatur-literatur yang peneliti paparkan di atas adalah beberapa penelitian terdahulu yang menyumbang kerangka berpikir dalam penelitian ini, namun peneliti berkonsentrasi dalam Model Komunikasi Islami Pemerintah Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Nilai Kearifan Lokal Di Kota Tanjung Balai.

Berikut peneliti jabarkan perbedaan penelitin ini dengan Beberapa penelitian sebelumnya.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu yang relevan

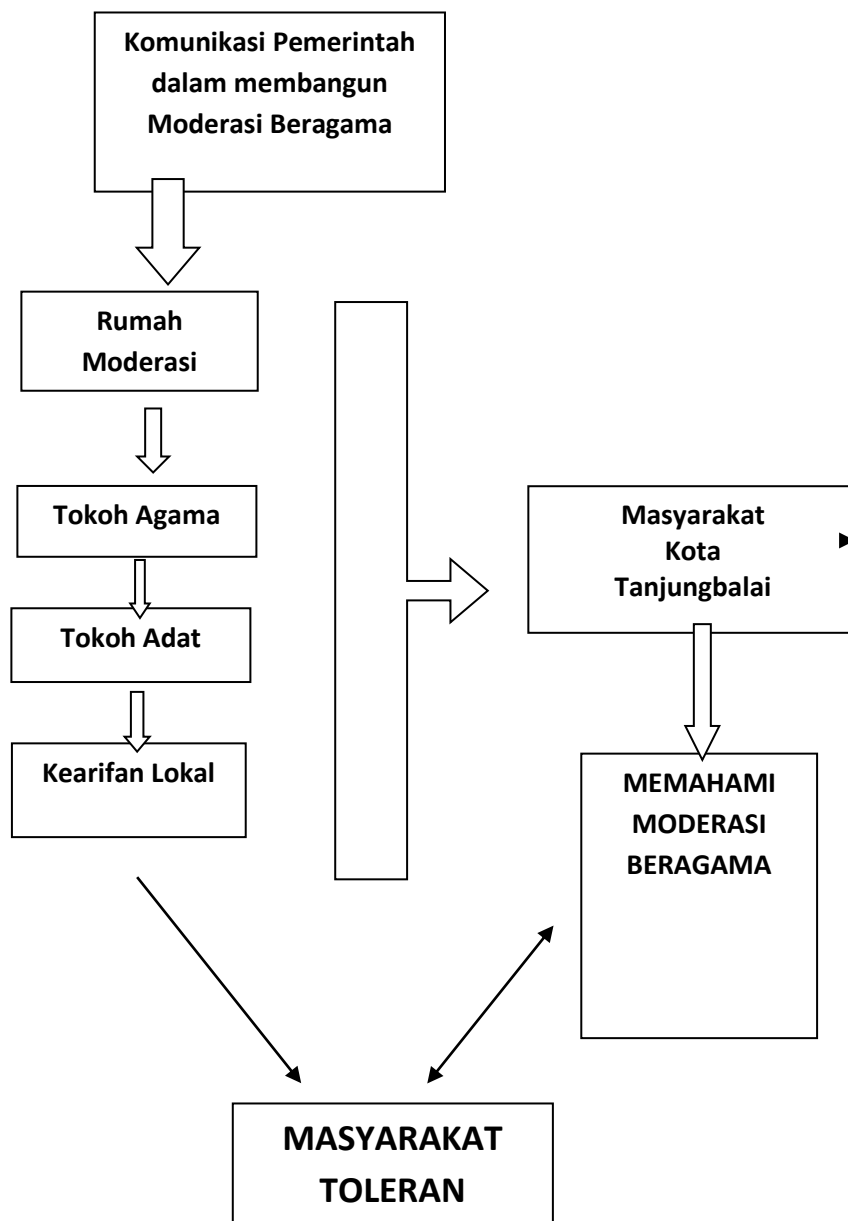
No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1	Muhammad Abror (Abror, 2020)	Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi	Perbedaan penelitian terletak pada objek tujuan penelitian. Penelitian ini membahas peran komunikasi pemerintah dalam moderasi beragama berbasis kearifan lokal.
2	Agus Akhmadi (Akhmadi, 2019)	Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia	Perbedaan penelitian terletak pada konteks pembahasan. Penelitian ini membahas peran Pemko Tanjung Balai dalam menciptakan moderasi beragama berbasis kearifan lokal.
3	Mustaqim Hasan (Hasan, 2021)	Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa	Perbedaan penelitian terletak pada pembahasan. Mustaqim membahas prinsip-prinsip moderasi beragama secara islami. Penelitian ini membahas kearifan lokal sebagai

			instrument moderasi beragama
4	Arif Budiono (Budiono, 2021)	Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah : 143)	Perbedaan penelitian terletak pada pembahasan. Penelitian Arif terfokus pada konsep <i>wasathiyyah</i> yang berlandaskan agama Islam. Penelitian ini membahas komunikasi pemerintah dalam moderasi beragama.
5	Fauziah Nurdin (Nurdin, 2021)	Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist	Perbedaan penelitian terletak pada pembahasan. Penelitian ini membahas peran Pemko Tanjung Balai dalam moderasi beragama
6	Abdul Syatar, dkk. (Syatar et al., 2020)	Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Perbedaan terletak pada pembahasan. Penelitian ini membahas moderasi beragama dengan meninjau peran Pemko Tanjung Balai.
7	Nazil Mumtaz al-Mujtahid, dkk (Al-	Penguatan Harmoni Sosial Melalui Moderasi	Perbedaan penelitian terletak pada substansi pembahasan. Perbedaan penelitian terletak

	Mujtahid et al., 2022)	Beragama dalam Surah Al-Kafirun Perspektif Komunikasi Pembangunan	pada objek dimana tesis ini membahas moderasi beragama dalam tataran komunikasi pemerintahan.
8	Husnul Khotimah (Khotimah, 2020)	Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren	Perbedaan penelitian terletak di objek pembahasan. Penelitian ini membahas peran Pemko Tanjung Balai dalam mengakomodasi kepentingan umat beragama.
9	M. Amin, dkk. (2023)	Peran Politik Tokoh Agama pada Pemilu	Perbedaan penelitian terletak pada variabel. Penelitian ini menggunakan Pemko Tanjung Balai sebagai subjek penelitian
10	Taupik Hidayat (2023)	Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024	Perbedaan penelitian terletak di pembahasan. Penelitian ini tidak membahas situasi, namun peran Pemko Tanjung Balai dalam mengakomodasi moderasi beragama berbasis kearifan lokal.

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

H. Kerangka Berpikir Peneliti



Gambar 3.
Kerangka Pikir Peneliti

Berdasarkan gambar kerangka berpikir peneliti diatas, maka dapat di jelaskan bahwa Komunikasi pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya membangun Moderasi Beragama dalam masyarakat, melalui peran pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat dengan membentuk kampung

Moderasi dibawah Kementerian agama dan pemerintah kota Tanjungbalai sebagai upaya membangun pemahaman Moderasi Beragama bagi masyarakat .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hal ini tidak jauh berbeda pendapat Lexy J. Moleong (Moleong, 2018) mengatakan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan pandangan yang akan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap secara individu maupun kelompok.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis observasi (*field research*). Pendekatan penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan memungkinkan pengujian teori serta hipotesis di lapangan yang sebenarnya. Penelitian lapangan sering kali menghasilkan data yang kaya dan kontekstual, yang dapat menjadi kontribusi berharga dalam memahami masalah-masalah tertentu dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti-bukti langsung (Czarniawska, 2022; Rudzki et al., 2022)

Kelebihan utama dari penelitian lapangan adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan berinteraksi langsung

dengan subjek atau situasi yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas aspek-aspek tertentu dalam suatu konteks nyata (Bailey, 2023; Wright et al., 2020).

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi aktif yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, dan konteks sosial individu (Lincoln & Guba, 2016). Dalam pandangan ini, realitas diinterpretasikan secara subjektif, dan setiap individu membangun makna berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Konstruktivisme juga mengakui peran penting interaksi sosial dalam pembentukan pengetahuan, dengan konsep bahwa makna tidak hanya dibentuk secara individual tetapi juga melalui dialog dan interaksi dengan orang lain (Green & Piel, 2015). Paradigma ini memainkan peran kunci di berbagai bidang, merangkul pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam tentang bagaimana individu membentuk pemahaman mereka terhadap dunia (Olsen & Pilson, 2022; Pilarska, 2021). Paradigma konstruktivis menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi (Dyczkowska & Fijałkowska, 2022). Dalam konteks ini, proses Komunikasi pemerintah dalam membangun Moderasi beragama di Kota Tanjungbalai dapat dilihat sebagai bagian dari konstruksi bersama pemahaman masyarakat tentang Moderasi Beragama.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Tanjungbalai tempatnya di Kantor Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan Februari 2023

sampai dengan Maret 2024.

Detail mengenai jangka waktu pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.
Perkiraan Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	Februari – Mei				Juni - Oktober				November-Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Penulisan Proposal												
2.	FGD												
3.	Pengumpulan data												
4.	Dokumentatif												
5.	Penganalisisan Data												
6.	Langkah Penyelesaian												

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabulasi perkiraan penelitian di atas digunakan sebagai panduan *timeline* bagi peneliti. Oleh karena itu, perkiraan di atas tidak bersifat permanen dan dapat berubah apabila temuan penelitian masih belum maksimal.

C. Informan Penelitian

Identifikasi informan penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam memperoleh data dan hasil penelitian. Adapun informan dalam penelitian

disertasi ini adalah mereka yang dianggap faham serta terkait langsung dengan masalah penelitian. Penentuan informan ini menggunakan teknik purposif dengan tujuan informan yang memahami persoalan tentang sikap toleransi beragama yang ada di Kota Tanjungbalai. Prinsip penggalan data adalah kejenuhan data, dimana penelitian akan berhenti menjaring data apabila data sudah jenuh.

Tabel 4.
Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Kedudukan
1.	Hj. Delima	Ketua MABMI Kota Tanjungbalai
2.	H. Al Ahyu, MA	Kepala Kantor Kemenag Kota Tanjungbalai / Ketua Moderasi Beragama Kota Tanjungbalai
3.	Lian Rangkuti.	Sekretaris MABMI Kota Tanjungbalai
4.	Sekretaris Daerah	Nurmalini marpaung S. Sos, M.si
5.	Kabag Kesra Pemko Tanjungbalai	Herri Gunawan, S.Sos
6.	Kasi Bimas Islam Kemenag Kota tanjungbalai	Dr. KH.Mulyadi, M.HI
5.	Ketua MUI	H. Hajarul Aswadi, S.Pdi
6.	Ketua FKUB	Hasbullah, SE

Sumber: Diolah Peneliti

D. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik berupa benda nyata ataupun abstrak (tidak nyata), peristiwa. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui

pengamatan, maupun melalui pertanyaan yang telah disiapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan.

2. Data skunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain baik dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil-hasil penelitian yang mendukung jawaban terhadap masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian disertasi ini dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut: Teknik pertama yang dilakukan peneliti adalah mengamati secara langsung seluruh aktivitas masyarakat, baik yang berhubungan dengan Moderasi Beragama dan Kearifan Lokal Masyarakat kota Tanjungbalai, yaitu:

1. Observasi

Melaksanakan observasi di lokasi penelitian yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *partisipant* dan observasi *nonpartisipant*. Melalui observasi *partisipant*, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2014). Peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Sedangkan observasi *nonpartisipant* hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Mengadakan wawancara dengan beberapa informan yang kompeten agar menghasilkan data yang valid. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *indepth interview* dengan tehnik semi terstruktur (*semi-structured interview*). Tehnik ini dipilih karena peneliti ingin mengontrol informasi yang ingin diperoleh dari subjek dan informan penelitian dengan tetap membuka kemungkinan munculnya pertanyaan tambahan ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan terhadap subjek penelitian dan informan yang diidentifikasi memahami dan terlibat dalam komunikasi pemerintah dalam membangun Moderasi beragama di Kota Tanjungbalai. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (terlampir) dengan menggunakan *life history*. Para informan ditentukan teknik *purposive sampling*.

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan pendekatan informasi tentang *life history*, yaitu berusaha memperoleh informasi informan, pada aspek pekerjaan, serta kegiatan kemasyarakatan, dan lain-lain, kemudian berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan komunikasi pemerintah kota Tanjungbalai dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama. Wawancara selanjutnya Mengambil data serta dokumentasi berupa arsip, foto, rekaman suara dan lainnya.

3. Kajian Pustaka

Mengkaji literatur pustaka secara berkala untuk memperkaya khazanah referensi. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk member penjelasan atau penafsiran melalui metode studi pustaka (library research). Tulisan ini membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang berdiri pada jenis kajian pustaka (Creswell, 2020). Proses analisis dilakukan dengan melihat beberapa kajian ilmu komunikasi dalam membentuk suatu perspektif yang dikhususkan untuk melihat kepustakaan yang berorientasi pada perspektif *deductive – interpretive*.

Denzin & Lincoln dalam Rorong (2019) mengemukakan bahwa berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau psikologis), yang pada tatananya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur. Kajian pustaka dalam tulisan ini penulis ambil karena dapat dikaji secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian.

Studi yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dibidang oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dibidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian (Singarimbun & Effendi, 1989).

Studi literatur adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan sintesis literatur, dokumen, dan sumber informasi yang telah ada (Hermans, 2014). Tujuan dari studi literatur adalah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merangkum penelitian sebelumnya, teori, temuan, dan kerangka kerja yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Dalam studi literatur, peneliti menyusun dan mengevaluasi informasi yang sudah ada, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan memberikan konteks yang diperlukan untuk penelitian yang akan datang (Culler, 2023). Kelebihan utama dari studi literatur adalah efisiensi dalam mengumpulkan informasi, menyediakan landasan teoretis yang kuat, dan membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian yang sesuai. Studi literatur juga mendukung penelitian lintas disiplin ilmu dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu (Devadas Pillai, 2019).

4. *Focus Group Discussion*

Melakukan pengadaan *Focus Group Discussion* (FGD). *Focus Group Discussion* (FGD) adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan kelompok kecil peserta yang berpartisipasi dalam diskusi terarah tentang topik tertentu di bawah bimbingan seorang moderator. FGD sering digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perspektif, sikap, dan pemahaman kelompok terhadap suatu masalah atau topik, serta untuk menggali gagasan, pendapat, dan pengalaman mereka. Melalui interaksi kelompok, FGD dapat menghasilkan data yang berharga untuk analisis

penelitian, terutama dalam studi sosial, perilaku, dan opini masyarakat (Hennink & Leavy, 2015; Morgan, 2020).

F. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai "Model Komunikasi Islami Pemerintah dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Kota Tanjung Balai", pemilihan instrumen pengumpulan data memegang peran kunci untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang upaya pemerintah dalam mempromosikan moderasi beragama. Berikut adalah beberapa rancangan instrumen penelitian yang dapat digunakan:

1. Pedoman Wawancara: Rancang pedoman wawancara yang bersifat terstruktur dan mencakup pertanyaan-pertanyaan terinci tentang langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam membangun moderasi beragama. Fokuskan pertanyaan pada kebijakan, program, dan strategi komunikasi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya moderasi.
2. Checklist Observasi: Buat checklist observasi untuk merekam detail observasi langsung terhadap kegiatan komunikasi pemerintah. Amati elemen-elemen seperti pesan-pesan yang disampaikan, jenis media yang digunakan, serta tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan moderasi beragama.
3. Analisis Dokumen: Sediakan format analisis dokumen untuk mengevaluasi konten dari berbagai materi komunikasi pemerintah, seperti pidato resmi, brosur, atau publikasi terkait moderasi beragama. Fokuskan analisis pada

bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tercermin dalam komunikasi pemerintah.

Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memberikan gambaran holistik tentang Model komunikasi pemerintah dalam membangun moderasi beragama di Kota Tanjung Balai. Melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan penilaian skala, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal tercermin dalam komunikasi pemerintah dan seberapa efektif upaya tersebut dalam membentuk moderasi beragama di tingkat lokal.

G. Teknik Analisis Data

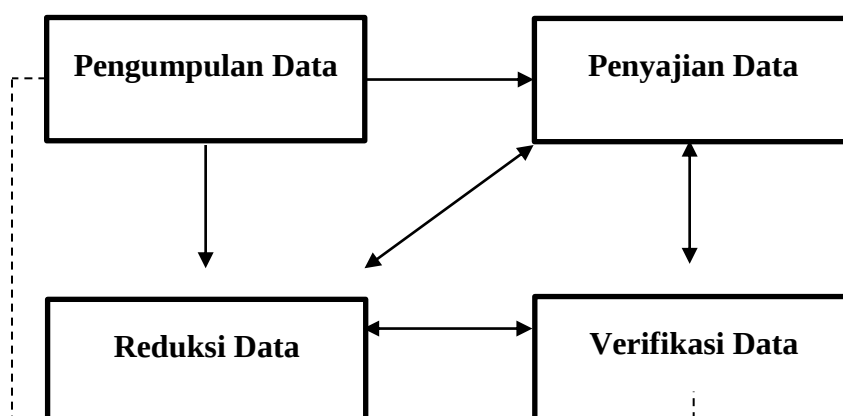
Dalam menganalisis data penelitian mengenai "Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Kota Tanjung Balai" menggunakan pendekatan analisis data Miles and Huberman, fokus pada pemahaman mendalam dan pemetaan hubungan antarvariabel menjadi kunci. Analisis data ini memanfaatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B.Miles et al., 2014).

Pertama-tama, pada tahap reduksi data, data kualitatif dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen dikondensasi untuk mengidentifikasi pola dan tema utama (Miles & Huberman, 2016). Dalam konteks ini, temuan awal mencakup penekanan Pemko Tanjung Balai pada bahasa inklusif dan seruan untuk menghormati perbedaan, mencerminkan upaya aktif mereka dalam mempromosikan moderasi beragama.

Kedua, pada tahap penyajian data, hasil reduksi data disusun dan ditempatkan dalam kerangka analisis untuk menggambarkan hubungan

antarvariabel (Miles & Huberman, 1994). Misalnya, interaksi positif antara penceramah dan audiens selama kegiatan dakwah menjadi representasi konkret dari efektivitas pesan moderasi dalam menginspirasi respons positif dari masyarakat.

Tahap ketiga melibatkan penarikan kesimpulan dari pola-pola dan hubungan yang muncul. Dalam hal ini, kesimpulan dapat mencakup bahwa Al Washliyah memiliki peran penting dalam memitigasi potensi konflik agama selama tahun politik 2024. Namun, tantangan eksistensial juga terlihat, di mana adanya resistensi terhadap pesan-pesan moderasi menunjukkan bahwa perubahan sikap memerlukan pendekatan yang lebih holistik.



Gambar 4.
Model Miles dan Huberman

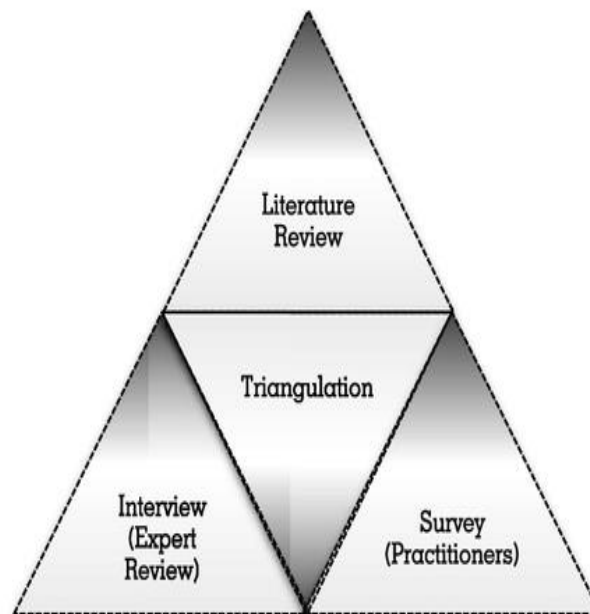
Dengan menerapkan pendekatan Miles and Huberman, analisis data ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika praktik komunikasi pembangunan agama selama periode politik tersebut. Dengan menekankan keterkaitan antar variabel, analisis ini dapat

membantu membentuk rekomendasi untuk memperkuat praktik dakwah moderasi di tengah tantangan dan peluang yang ada.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik uji keabsahan data yang relevan untuk memastikan kevalidan dan keakuratan hasil penelitian. Berikut beberapa teknik yang dapat diterapkan:

1. Triangulasi: Menggunakan triangulasi melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data atau pendekatan analisis untuk memverifikasi dan membandingkan temuan. Dalam konteks ini, informasi dari wawancara mendalam, analisis konten media sosial, dan mungkin data dari survei atau kuisioner dapat digunakan bersamaan. Jika temuan dari berbagai sumber dan metode sejalan, keabsahan data dapat diperkuat.



Gambar 5.
Penggunaan Triangulasi

2. *Member Checking*: Member checking melibatkan kembali ke informan atau partisipan penelitian untuk memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan pemahaman mereka dengan benar. Peneliti dapat membagikan temuan awal atau hasil analisis kepada informan dan meminta umpan balik mereka. Ini memberikan kesempatan bagi informan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan tambahan jika diperlukan.
3. *Audit Trail*: Membuat audit trail atau jejak audit yang mendokumentasikan langkah-langkah penelitian dari awal hingga akhir. Ini mencakup catatan tentang keputusan metodologis, pengkodean data, dan perubahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian. Audit trail dapat memberikan transparansi dan memudahkan pemeriksaan oleh peneliti lain.

Dengan menerapkan kombinasi teknik uji keabsahan data ini, penelitian dapat memastikan kehandalan dan ketangguhan temuan, meningkatkan validitas, dan memberikan dukungan kuat terhadap interpretasi hasil penelitian.

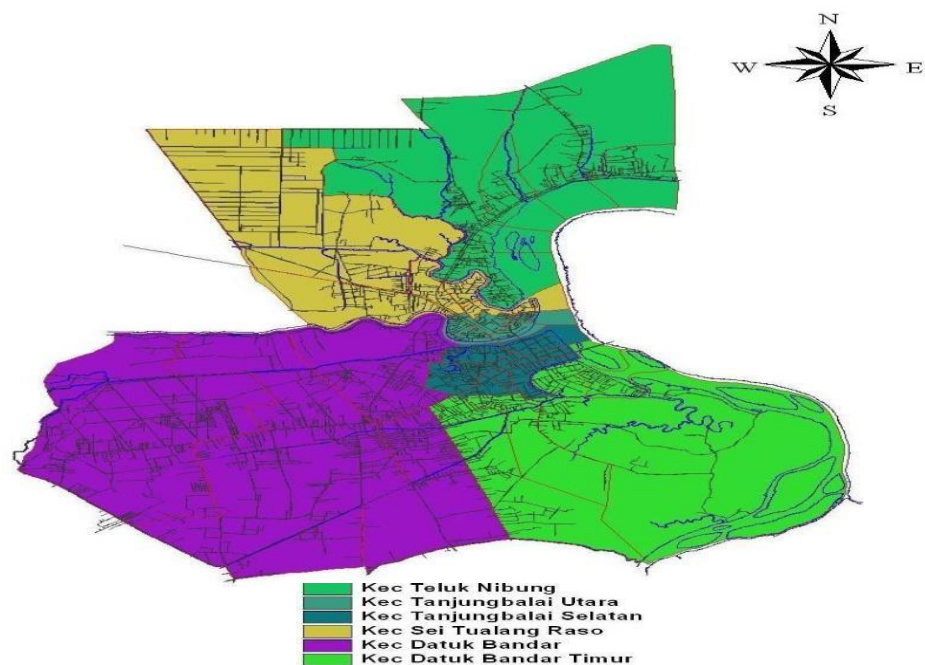
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Tanjungbalai mempunyai luas wilayah seluas 60,52 km² yang terdiri dari 6 kecamatan, 31 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai tahun 2020 sebesar 176.027 orang, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.909 orang /km². jumlah rumahtangga sebanyak 37.464 rumah tangga. Persentase usia penduduk 68,94 %, dan penduduk lansia 4,21 %.(Tanjungbalai, 2002)



Gambar 6.
Peta Kota Tanjung Balai

Secara Astronomis Kota Tanjungbalai terletak di antara 2° 58' LU dan 99° 48' BT. Secara Geografis Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh Kabupaten Asahan.

Secara administratif, wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Berdasarkan sejarah, asal usul berdirinya Kota Tanjungbalai tidak dapat dipisahkan dengan sejarah berdiri nya Kesultanan Asahan yang berdiri ± 401 tahun yang lalu. Berdirinya Kota Tanjung Balai tepatnya bermula dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai Sultan Pertama Kesultanan Asahan di Kampung Tanjung pada tahun 1620. Asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada disekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai Asahan. Balai tersebut lama kelamaan ramai disinggahi para pendatang dan masyarakat, yang kemudian dinamai Kampung Tanjung atau lebih dikenal dengan “Balai Di Tanjung” .(Tanjungbalai, 2002)

.Kota Tanjungbalai pernah menjadi Kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km². Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 km² dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dengan Kabupaten Asahan.

Perkembangan kota Tanjungbalai sangat berkaitan dengan kehadiran Kesultanan Asahan, pertengahan abad ke-18. Kemudian pada 27 Juni 1917 Kerajaan ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia-Belanda, menjadi suatu gemeente . Menurut cerita rakyat nama Kota Tanjungbalai bermula dari sebuah kampung yang ada disekitar ujung tanjung dari muara Sungai Silau dan Sungai Asahan. Letak yang sangat strategis akhirnya tempat ini banyak disinggahi orang- orang sebagai bandar kecil tempat melintas ataupun orang-orang yang ingin bepergian ke hulu Sungai Silau. Tempat yang sangat strategis tersebut kemudian dinamai “Kampung Tanjung” dan orang lazim menyebutnya Balai di ujung Tanjung.

Kota Tanjungbalai dulunya merupakan daerah bagian kawasan kekuasaan Kabupaten Asahan. Pada tahun 1956 dikeluarkannya Undang-Undang darurat No.9 tahun 1956, Lembaran Negara 1956 No.60 nama Humintee Tanjungbalai diganti menjadi Kota kecil Tanjungbalai dan Jabatan Walikota terpisah dari Bupati Asahan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1956 No.U.P.15/2/3. Selanjutnya dengan UU No.1 Tahun 1957 nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi kota praja Tanjungbalai.

Dengan letak geografis kota Tanjungbalai yang sangat dekat dengan selat Malaka, kota Tanjungbalai merupakan kota yang mayoritasnya bermata pancaraharian sebagai nelayan. Dialirin 2 sungai sekaligus yaitu sungai Asahan dan sungai Silau, kedua aliran sungai ini memiliki nilai-nilai histori yang sangat penting untuk dipelajari dan diteliti, seperti bekas letak Istana Kesultanan Asahan yang langsung berbelakangan dengan aliran Sungai Silau dan Balai di Ujung Tanjung yang merupakan titik nol kota Tanjungbalai dan juga merupakan titik

daerah awal terbentuknya kota Tanjungbalai. Kedua contoh peninggalan sejarah tersebut merupakan 2 dari banyak nya peninggalan sejarah yang berada di kota Tanjungbalai terkhusus di daerah aliran sungai Asahan dan sungai Silau.

Kota Tanjungbalai adalah kota yang memiliki ikon “*Balayar Satujuan Batambat Satangkahan*” yang berarti satu kata dalam mencapai tujuan, serta Monumen Air Mancur dan Ikan Lumba-Lumba yang berada di pusat kota menunjukkan kota yang heterogen.



Gambar 7.
Lambang Kota Tanjung Balai

Arti Lambang

Perisai bersudut delapan melambangkan perisai kemerdekaan, berisi:

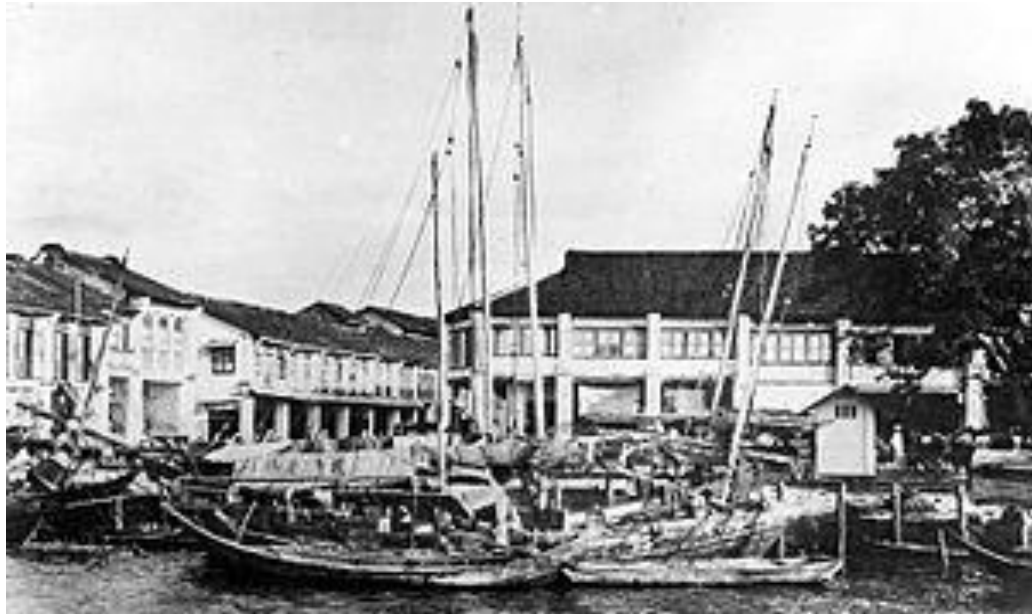
- a. Pita suci pengabdian daerah
- b. dua bambu runcing, kepahlawanan mempertahankan kemerdekaan
- c. Bintang bersinar lima, bintang ideologi negara Pancasila

Perisai inti merupakan sumber kekuatan daerah dalam mengisi kemerdekaan, berisikan:

1. Kepala dengan tonggak lima melambangkan kota yang berjiwa Pancasila.
2. Kapal, derek/kran melambangkan kota pelabuhan dan perdagangan.
3. Pabrik dan roda melambangkan kota industri.
4. Ikan melambangkan kehidupan nelayan.
5. Tunas kelapa, melambangkan sumber perdagangan yang terus meningkat.
6. Kulit kerang berisi balai, melambangkan istilah kota kerang dan kebudayaan daerah.



Gambar 8.
Kota Tanjung Balai pada tahun 1930-an (Udara)



Gambar 9.
Pelabuhan Tanjung Balai di masa Hindia Belanda tahun 1917.

Keadaan wilayah kota Tanjungbalai memiliki daerah dataran rendah berawa-rawa, sembarawut dan tidak teratur, mebuat Belanda ingin membentuk suatu perencanaan kota yang cukup baik, sehingga fisik-fisik kota menjadi lebih rapi dan teratur .

Kota Tanjungbalai merupakan ibukota dari Afdeeling Asahan yang menjadikan kota ini menjadi salah satu dari daerah administrative di Keresidenan Sumatera Timur. Eksistensi kota Tanjungbalai dalam perekonomian Sumatera Timur semakin vital setelah pembangunan Jembatan Kisaran dan pembukaan jalur kereta api Medan – Tanjungbalai.



Gambar 10.
Kantor perusahaan Guntzel & Schumacher di jl. Heerenstraat
di Tanjung Balai tahun 1917

Setelah jembatan Kisaran berfungsi dan dibangun jalan kereta api Medan –Tanjungbalai, maka hasil-hasil dari perkebunan dapat lebih lancar disalurkan dan diekspor melalui kota pelabuhan Tanjungbalai. Untuk memperlancar kegiatan perkebunan tersebut maskapai Belanda membuka kantor dagang di Tanjungbalai. Kantor dagang tersebut antara lain: kantor K.P.M., Borsumeij dan lain-lain, maka pada abad XX mulailah penduduk bangsa Eropa tinggal menetap di kota Tanjungbalai. Assisten Resident van Asahan berkedudukan di Tanjungbalai dan karena jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan (*Voorzitter van den Gemeenterad*)

Sebagai kota pelabuhan dan tempat kedudukan asisten resident, Tanjungbalai merupakan tempat kedudukan Sultan Kerajaan Asahan. Pada waktu Gementee Tanjungbalai didirikan atas Besluit G.G. 27 Juni 1917 No. 284,

wilayah Gementee Tanjungbalai adalah 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui maklumat tanggal 11 Januari 1958 No. 260 daerah-daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 No. 641) dikembalikan pada batas semula menjadi 200 Ha.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1956, Lembaran Negara 1956 No. 60 nama Hamintee Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai dan Jabatan Walikota terpisah dari Bupati Asahan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1956 No. U.P. 15/2/3. Selanjutnya dengan UU No. 1 Tahun 1957 nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi Kotapraja Tanjungbalai.

Dari tahun ke tahun Kota Tanjungbalai terus berkembang, para pendatang dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang, kemudian menetap di Tanjungbalai, sehingga kota ini telah menjadi kota yang berpenduduk padat. Sebelum kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 Ha. (2 Km²) menjadi 60 Km², kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per Km². Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 Km² dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, saat itu kota Tanjungbalai terdiri dari 5 Kecamatan.

Berdasarkan SK.Gubsu No.146.1/3372/SK/1993 28 Oktober 1993 desa dan kelurahan telah dimekarkan menjadi bertambah 5 desa dan 7 kelurahan persiapan sehingga menjadi 19 desa dan 11 kelurahan di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Perda No.23 Tahun 2001 seluruh desa yang ada telah berubah status menjadi Kelurahan, sehingga saat ini Kota Tanjungbalai terdiri dari 30 Kelurahan.

2. Keadaan Penduduk kota Tanjungbalai

Masyarakat kota Tanjungbalai sangat kental dengan yang namanya suku Melayu dikarenakan dahulunya kota Tanjungbalai merupakan ibu kota Kesultanan Melayu Asahan. Berjalannya waktu kota Tanjungbalai sekarang dihuni mayoritas penduduk Mandailing, akan tetapi penduduk yang bersuku Mandailing di Tanjungbalai juga sudah mulai mengikuti adat-adat budaya Melayu.

Kota Tanjungbalai terletak di koordinat 2° 58' LU dan 99° 48' BT, dengan luas wilayah 60,529 Km² (6.052,9 Ha). Pada tahun 1993, desa dan kelurahan di Kota Tanjungbalai dimekarkan menjadi 19 desa dan 11 kelurahan persiapan, dan pada tahun 2001 seluruh desa berubah status menjadi kelurahan sehingga jumlah kelurahan menjadi 30.

Pada tahun 2005, terbit Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Pebruari 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Sehingga, wilayah Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan.

Mulanya, kota Tanjungbalai hanya memiliki wilayah sebesar 199 hektare atau sekitar 2 kilometer persegi. Kemudian, kota ini diperluas menjadi 60..52 kilometer persegi. Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara

dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 jiwa dengan rasio lebih kurang 20.000 jiwa per kilometer persegi.

Berikut kuantitas penduduk berdasarkan jenis kelamin masyarakat Kota Tanjungbalai.

Tabel 5.
Kuantitas Penduduk

KUANTITAS PENDUDUK Berdasarkan Jenis Kelamin . Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis Kelamin							
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					
		L (jiwa)	(%)	P (jiwa)	(%)	L+P (jiwa)	(%)
1	Tanjungbalai Selatan	9.903	49,22	10.215	50,78	20.118	11,09
2	Tanjungbalai Utara	9.183	50,79	8.896	49,21	18.079	9,97
3	Sei Tualang Raso	14.040	51,10	13.438	48,90	27.478	15,15
4	Teluk Nibung	21.613	51,06	20.713	48,94	42.326	23,34
5	Datuk Bandar	20.955	50,48	20.558	49,52	41.513	22,89
6	Datuk Bandar Timur	16.125	50,60	15.744	49,40	31.869	17,57
KOTA TANJUNGBALAI		91.819	50,62	89.564	49,38	181.383	100,00

Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

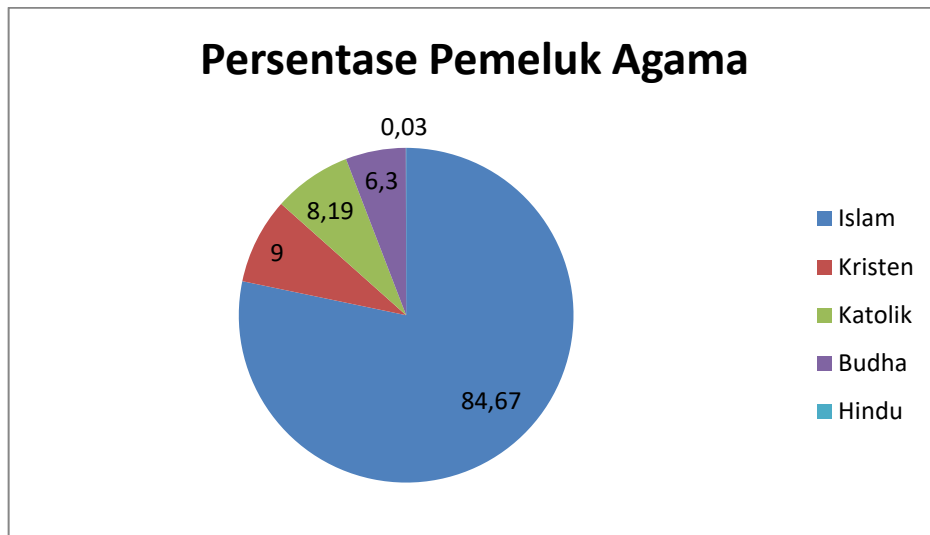
Tabel 6.
Kecamatan dan Penduduk Kota Tanjung Balai

No	Kecamatan	Penduduk
1	Datuk Bandar	40.336
2	Datuk Bandar Timur	30.470
3	Tanjung Balai Selatan	19.544
4	Tanjung Balai Utara	17.930
5	Sei Tualang Raso	27.272
6	Teluk Nibung	41.483
Jumlah		176.027

Tanjungbalai (Jawi: تتجورغ بالي) merupakan salah satu kota madya di provinsi Sumatera Utara dengan Luas 60,52 km². Hasil Sensus Penduduk 2020 di Kota Tanjungbalai antara lain, jumlah penduduk 176.027 jiwa, rasio jenis kelamin 102,64, persentase penduduk usia produktif 68,94 persen, dan persentase penduduk lansia 4,21 persen (BPS Kota Tanjungbalai, 2023)

Gambaran demografis kota Tanjungbalai menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia di Tanjungbalai cukup tinggi yaitu 68,94. Dalam kategori penduduk, mayoritas masyarakat Tanjng Balai adalah suku batak dan diikuti dengan suku jawa dan melayu. Sedangkan pemeluk agamanya mayoritas beragama Islam, diikuti dengan Kristen dan Katolik.

Adapun persentase pemeluk agama di kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:



Gambar 11.
Demografi Pemeluk Agama

Persentase pemeluk agama di atas secara eviden menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kota Tanjungbalai merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini terhitung wajar sebab perkembangan kebudayaan di kota Tanjungbalai kental akan nuansa melayu. Oleh karena itu, data di atas memperkuat penelitian penulis untuk mengidentifikasi peninggalan sejarah bercorak Islam di Tanjungbalai.

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota madya di provinsi Sumatera Utara dengan Luas 60,52 km². Hasil Sensus Penduduk 2020 di Kota Tanjung Balai antara lain, jumlah penduduk 176.027 jiwa, rasio jenis kelamin 102,64, persentase penduduk usia produktif 68,94 persen, dan persentase penduduk lansia 4,21 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Ditinjau dari segi sejarah, eksistensi Kota Tanjung Balai tidak terlepas dari peran kerajaan melayu Asahan. Oleh karena itu, Kota Tanjung Balai hingga saat

ini identik dengan corak suku melayu. Meski demikian, melayu bukanlah identitas representasi Kota Tanjung Balai melainkan hanya salah satu instrument yang dilestarikan mengingat nilai-nilai sejarah suku melayu. Seiring perkembangan zaman, Kota Tanjung Balai mulai terjamah oleh beberapa suku seperti Batak, Jawa Aceh dan lainnya. Adapun jumlah suku di Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, 2020):

Asahan Bawah berupa dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 0-25 meter. Asahan tengah berbukit-bukit dengan ketinggian 25-50 meter dari permukaan laut. Asahan Atas yang berbatasan dengan kabupaten Simalungun dan Tapanuli Utara, merupakan dataran tinggi. Kota Tanjungbalai sendiri dialiri dengan sungai Asahan dan Sungai Silau serta beberapa sungai kecil-kecil. Keadaan topografi datar, berawa-rawa dan sekeliling kota terdapat persawahan pasang surut.

Terhitung sejak tahun 2015, Kota Tanjung Balai justru banyak ditinggali oleh suku batak. Hal ini mengindikasikan bahwa melayu hanyalah identitas yang bersifat instrument sejarah, bukan representasi kota. Masuknya beberapa suku ke Kota Tanjung Balai mengakibatkan munculnya gejala kebudayaan seperti asimilasi dan akulturasi. Hal ini pula yang memunculkan serangkaian kearifan lokal yang unik dan tetap terjaga esensi dan eksistensinya hingga saat ini.

Adapun datanya adalah sebagai berikut:

7. Agama

7.1. Proporsi Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI (JIWA)	%	PEREMPUAN (JIWA)	%	KOTA TANJUNGBALAI	%
1	Islam	80.191	50,72	77.926	49,28	158.117	87,17
2	Kristen	6.574	50,07	6.556	49,93	13.130	7,24
3	Katholik	723	49,66	733	50,34	1.456	0,80
4	Hindu	15	51,72	14	48,28	29	0,02
5	Budha	4.296	49,93	4.308	50,07	8.604	4,74
6	Konghucu	17	45,95	20	54,05	37	0,02
7	Aliran Kepercayaan	3	30,00	7	70,00	10	0,01
TOTAL		91.819	50,55	89.564	49,45	181.383	100,00

Sumber: BPS Kota Tanjung Balai (2023)

Gambar 12
Data Agama Islam, Protestan Khatolik, Hindu

Dari tabulasi di atas, dapat dilihat bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas disusul oleh Kristen dan Buddha. Menariknya, Kota Tanjung Balai tidak hanya didiami oleh enam buah agama yang diakui oleh konstitusi melainkan terdapat aliran kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Hal ini pertanda bahwa Kota Tanjung Balai adalah kota yang religius namun representasi yang ditonjolkan adalah kebudayaan sehingga Kota Tanjung Balai memiliki etalase yang menarik dari segi keberagaman.

Kearifan lokal Kota Tanjung Balai bersifat unik dan general sehingga beberapa tradisi yang sifatnya keagamaan dapat didegradasi pada level umum

sehingga seluruh masyarakat dapat merayakannya. Hal ini tidak terlepas dari gejala kebudayaan sebagaimana penulis jelaskan di atas. Kearifan lokal di Kota Tanjung Balai seyogyanya dapat dijadikan instrument Moderasi Beragama mengingat Kota Tanjung Balai bukanlah kota yang identic dengan keagamaan melainkan etnik. Moderasi beragama menjadi penting bagi Kota Tanjung Balai mengingat indeks heterogenitas di Kota Tanjung Balai cukup variatif.

Berdasarkan cerita rakyat, serta kepercayaan masyarakat setempat, ketika berbicara tentang sejarah Tanjungbalai, secara tidak langsung kita juga membicarakan tentang Asahan. Daerah Asahan dahulu didiami oleh “orang Hulu” dibawah dipimpin seorang Raja Putri yang bernama Raja Simargolang. Kerajaan Asahan ini berkedudukan di Huta Bayu atau Pulau raja (sekarang Pulau Rakyat). Raja Simargolang memerintah dengan sangat bijaksana dan disukai oleh rakyatnya. Dengan berjalannya waktu, kemudian wilayah Asahan dipimpin oleh Kesultanan Asahan I yaitu Sultan Abdul jalil, putra dari Sultan Aceh Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil pusat pemerintahan dipindah dari Asahan ke Tanjungbalai, yang mengakibatkan berpindahnya penduduk dari Hulu Sungai Asahan ke Tanjungbalai sebagai ibukota Kesultanan.

Masyarakat Tanjungbalai dari awal berdirinya terdiri dari empat etnis/suku yaitu: Melayu (Sultan Abdul Jalil dari Aceh), Minagkabau (Siti Ungu keturunan dari Pagaruyung), Karo (Bayak Lingga /Karo-Karo), dan Batak (Simargolang). Keempat suku inilah yang kemudian melahirkan etnis/suku Melayu sebagai suku masyarakat setempat kota Tanjungbalai sampai sekarang. Selain dari keempat suku ini, suku Melayu di Tanjungbalai juga berasal dari suku-suku pendatang,

baik yang berkeinginan menetap dan menjadi etnis Melayu, maupun melalui perkawinan dengan penduduk setempat.

Kesemua suku-suku yang ada di kota ini berinteraksi secara baik, dengan saling menghargai adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing suku, dan menghormati perbedaan yang ada. Mereka hidup secara berdampingan, rukun, dan saling membantu diantara yang membutuhkan. Interaksi yang demikian ini bisa dilihat, setelah mereka berada bersama masyarakat setempat yang bersuku Melayu, dimana perlahan-lahan banyak suku di luar Melayu yang mengikuti adat budaya Melayu, terutama bagi mereka yang memeluk agama Islam. Hal ini juga dimungkinkan karena suku Melayu bukan hanya berdasarkan keturunan, tetapi ada juga yang berdasarkan dengan keakuan dari masyarakat sendiri yang menginginkan menjadi Melayu dengan ciri-ciri, berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat budaya Melayu.

Demikian kuatnya pengaruh adat istiadat budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat kota Tanjungbalai, sehingga masyarakat pendatang dan menetap di kota ini juga mengikuti adat budaya Melayu kota ini. Hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan acara resmi di pemerintahan maupun upacara adat dalam perkawinan, dan lain-lain selalu memasukkan unsur adat budaya Melayu seperti; tepung tawar, balai, tepak sirih.

B. Temuan Khusus

1. Komunikasi Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam membangun Moderasi Beragama

Komunikasi yang dilakukan pemerintah kota Tanjungbalai dalam

membangun konsep Moderasi Beragama adalah bekerjasama dengan Kementerian Agama, sebagaimana wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, “bahwa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Tanjungbalai untuk menjaga keharmonisan dalam menjaga toleransi umat beragama harus saling menghargai dan mengormati antar umat beragama yang berada di Kota Tanjungbalai.” Dengan saling menghormati satu sama lain dalam antar umat beragama yang berada di Kota Tanjungbalai. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama, membangun budaya dialog, menghindari prasangka dan persepsi yang salah, dan menyuarakan pesan toleransi. Dengan cara ini, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan damai tanpa adanya benturan antar umat beragama.

Pemerintah Kota Tanjung Balai secara aktif mengambil peran yang sentral dalam membangun moderasi beragama melalui model komunikasinya yang cermat dan inklusif (Wahyudin, 2023). Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tanjung Balai (Pemko Tanjung Balai) memiliki strategi komunikasi yang bertujuan untuk merangkul keberagaman etnis dan agama, mempromosikan toleransi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warganya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki Visi dalam pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026, yaitu: “mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religious, Sejahtera, Indah dan Harmonis”. Visi tersebut memiliki Beberapa pengertian, sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan;** yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan

menjadi benar-benar berwujud.

- 2) **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km² di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.
- 3) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 4) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku.
- 5) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 6) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

Misi pemerintah Kota Tanjungbalai adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi

membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi.

Misi juga dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen terbaik *stakeholder* baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
- b. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
- c. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
- d. Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan

infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

- f. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
- g. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Penjelasan dari misi ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengutamakan pelayanan public yang utama.

Idealnya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar hidupnya sebagai warga negara. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik yang dapat menumbuhkan nilai kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah dan jajarannya. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menciptakan keberpihakan kepada masyarakat serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa aman bagi warga untuk bermukim, berusaha dan beribadah; bebas untuk mengeluarkan pendapat; mendapat kemudahan dalam hal membutuhkan pelayanan dasar, ijin berusaha dan ijin lainnya serta pelayanan lain yang dibutuhkan serta warga mudah untuk mengakses berbagai informasi.

Dengan kata lain bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik yakni transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan partisipasi publik.

Transparansi dimaksudkan bahwa berbagai proses, pelaksanaan, kelembagaan dan informasi pembangunan harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat sehingga akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan serta berperan aktif dalam kegiatan monitoring pembangunan. Akuntabilitas diartikan sebagai segala proses pengambilan kebijakan oleh stakeholder dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Penegakan hukum dimaknai bahwa pemerintahan yang baik harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat serta partisipasi publik adalah pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif di setiap kesempatan.

Saat ini, prinsip-prinsip *good governance* akan dijalankan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai utamanya ketersediaan layanan publik berbasis teknologi dan informasi, dukungan ketersediaan sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten, ketersediaan kebijakan dan sistem regulasi yang memihak pada kepentingan publik, sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta harmonisasi komunikasi antar pelaku pembangunan. Apabila hal ini telah terpenuhi maka diharapkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan prinsip

memberikan pelayanan prima yakni pelayanan mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau akan dapat terwujud.

2. Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.

Dimensi pembangunan dalam rangka membangun manusia seutuhnya tidak hanya terkait pada pembangunan fisik, semata tetapi juga pembangunan non fisik yakni pembangunan mental spiritual masyarakat. Pembangunan mental spiritual masyarakat efektif dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan (*religius*) sejak dini kepada masyarakat melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab.

Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang religius dan berakhlak mulia yakni masyarakat yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya satu komponen utama dari model komunikasi Pemerintah Kota Tanjung Balai adalah pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan

lokal, termasuk tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan kelompok etnis. Dalam serangkaian dialog dan pertemuan rutin, pemerintah bekerja sama dengan para tokoh ini untuk mendengarkan masukan, menciptakan pemahaman bersama, dan merancang strategi bersama untuk membangun moderasi beragama. .

Pembangunan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia akan menjadi agenda pokok pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang secara simultan dilaksanakan dengan agenda pokok pembangunan lainnya. Pembangunan masyarakat yang religius akan lebih dikembangkan kepada bagaimana membangun tatanan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi umat. Secara konkrit hal ini akan diawali dengan pemantapan pendidikan karakter di bangku sekolah dan di keluarga, menggalakkan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan aparaturnya yang disertai dengan kebijakan yang mendukung serta fasilitasi/bantuan bagi pembangunan/rehab rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya melalui bantuan hibah.

3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi serta meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada selanjutnya membentuk pola kemitraan dengan sektor swasta dengan tujuan dapat menciptakan

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam rangka menjalankan peranannya terhadap fungsi proteksi dan fasilitasi. Peran utama yang dimaksud adalah dukungan kebijakan yang terkait dengan penguatan kelembagaan, regulasi dan fasilitasi dalam mendorong iklim investasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ekonomi Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan ditujukan kepada pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing dimaksud didefinisikan sebagai kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengedepankan potensi sumberdaya sebagai potensi ekonomi unggulan yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian dan peternakan, koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Kunci keberhasilan peningkatan daya saing adalah adanya inovasi yang kreatif yang diwujudkan dengan pengembangan industri yang berbasis kreatifitas atau yang disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan dimaksud membutuhkan dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, infrastruktur pendukung, sumberdaya alam dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan keuangan/bantuan permodalan.

4. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat.

Pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia meliputi pembangunan pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan anak didik yang berintelektual, mampu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjelma dalam diri lulusan yang memiliki iman dan takwa dan berbudaya dan berkarakter menuju kemandirian. Artinya bahwa kemampuan intelektual yang diperoleh dari sistem pendidikan yang terselenggara digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak saja untuk masa sekarang, juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan yang berkualitas juga dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era global. Pendidikan yang berkualitas harus terus didukung dengan pendanaan yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat baik dari segi geografis terlebih dari segi ekonomis. Pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan menjamin bahwa pelayanan pendidikan akan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. ke depan tidak ada alasan penduduk yang tidak bersekolah karena alasan aksesibilitas maupun alasan ekonomis.

Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas mutu lulusan yang tentunya akan dapat terwujud apabila ada keterlibatan dari setiap *stakeholders* dan partisipasi aktif masyarakat, orang tua dan pihak swasta untuk terlibat aktif di dunia pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan menuntaskan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun selain memfasilitasi untuk mengembangkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara bersinergi dan beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang sehat akan lebih mudah menerima dan melaksanakan proses pendidikan. Pembangunan kesehatan akan diwujudkan melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan akan tenaga medis, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian pola hidup bersih dan sehat dan melibatkan stakeholders serta pihak ketiga. Tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang secara umum ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat.

5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Pemenuhan infrastuktur dasar dan ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial sangat dibutuhkan keberadaannya. Pembangunan infrastruktur dewasa ini menghadapi tantangan yang sangat berat terlebih-lebih masalah rendahnya kualitas yang selalu menjadi sorotan publik. Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan dan memperhitungkan dinamika perkembangan dan persebaran permukiman penduduk dan lingkungannya, luas wilayah, kondisi geografis wilayah dan diperlukan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar satu wilayah dengan wilayah di daerah lainnya serta harus memperhatikan atau mengakomodir keberlanjutan program.

Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan pola dan penataan ruang. Oleh karena itu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus sudah mengakomodir perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara baik serta telah mengintegrasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH *public* maupun RTH *private* sehingga cita-cita untuk mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi serta nyaman untuk bermukim bagi warga akan dapat terwujud.

Pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan nasional dan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan

dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya secara intensif diperlukan upaya untuk terus mengembangkan jejaring, baik ke tingkat nasional, ke Provinsi dan ke masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan pembangunan dan

Model ini mengakui pentingnya partisipasi dan kerjasama lintas sektor dalam mencapai tujuan moderasi beragama. Selain itu, penulis menemukan bahwa terdapat dua model komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Tanjung Balai yaitu komunikasi linier dan komunikasi partisipatif.

Model komunikasi pembangunan linier adalah pendekatan yang digunakan dalam konteks pembangunan untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada masyarakat dengan cara yang terstruktur dan terarah (Pinkas et al., 2019). Dalam model ini, komunikasi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan dan memfasilitasi perubahan sosial. Proses komunikasi diatur secara linier, dengan pemerintah atau lembaga pembangunan sebagai pihak yang mengirimkan pesan kepada masyarakat.

Pertama-tama, dalam model komunikasi pembangunan linier, pemerintah atau lembaga pembangunan memiliki peran utama sebagai pengirim pesan. Mereka merancang pesan-pesan yang berfokus pada tujuan pembangunan, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Pesan ini sering kali bersifat informatif dan edukatif, ditujukan untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang diusung.

Kedua, pesan-pesan yang disampaikan dalam model komunikasi pembangunan linier mengalir secara terarah dari pemerintah atau lembaga pembangunan ke masyarakat (Rani & Maarif, 2021). Komunikasi ini bersifat satu

arah, di mana pihak pengirim memiliki kendali penuh atas informasi yang disampaikan. Masyarakat dianggap sebagai penerima pesan yang harus menerima dan memahami informasi yang disajikan. Model ini seringkali mencerminkan struktur hierarki dalam konteks pembangunan, di mana keputusan dan arahan datang dari pihak yang memiliki otoritas.

Terakhir, evaluasi dan umpan balik dalam model komunikasi pembangunan linier mungkin terbatas. Pihak yang mengirim pesan mungkin tidak sepenuhnya terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat atau tidak membangun mekanisme evaluasi yang kuat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, karena komunikasi yang bersifat top-down kurang memperhitungkan pandangan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Seiring dengan perkembangan pemahaman tentang partisipasi masyarakat, model komunikasi pembangunan linier cenderung berkembang menuju pendekatan yang lebih interaktif dan inklusif.

Model komunikasi pembangunan partisipatif mendasarkan diri pada prinsip bahwa pembangunan yang berhasil melibatkan partisipasi aktif masyarakat akan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan. Dalam model ini, komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari pemerintah atau lembaga pembangunan ke masyarakat, tetapi juga sebagai wadah untuk mendengar suara masyarakat, menggali kebutuhan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Model ini menekankan kolaborasi dan keterlibatan bersama dalam seluruh siklus pembangunan (Haavisto & Linge, 2022).

Pertama, model komunikasi pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat sebagai mitra yang aktif. Pemerintah atau lembaga pembangunan bukan hanya sebagai pengirim pesan, tetapi juga sebagai pendengar yang berusaha memahami perspektif dan kebutuhan masyarakat. Proses komunikasi bersifat dua arah, dengan dialog terbuka dan inklusif sebagai prinsip utama. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi (Ernstmann et al., 2022).

Kedua, model ini mengakui pentingnya pembangunan kapasitas komunikatif masyarakat. Masyarakat diberdayakan untuk dapat menyuarakan pendapat mereka secara efektif, mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok partisipatif, dan berkontribusi aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah dan lembaga pembangunan mendukung penguatan kapasitas komunikatif ini melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendekatan pendidikan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi mereka dengan lebih baik.

Terakhir, evaluasi dan umpan balik dalam model komunikasi pembangunan partisipatif merupakan elemen kunci. Proses evaluasi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pembangunan, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan umpan balik. Dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi, tercipta mekanisme yang memungkinkan perbaikan dan penyesuaian program pembangunan berdasarkan pengalaman dan pandangan langsung dari mereka yang terlibat. Dengan demikian, model ini menciptakan

lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu merespons kebutuhan yang berkembang dari masyarakat.

Selain itu, Pemko Tanjung Balai menggunakan media komunikasi sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Mereka meluncurkan kampanye-kampanye komunikasi yang berfokus pada nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan kerukunan. Ini termasuk penggunaan media cetak, radio lokal, dan platform online untuk menyebarkan informasi yang positif dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan keyakinan agama. Model ini menciptakan saluran komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pemko Tanjung Balai beserta kementerian agama dan masyarakat membangun rumah Moderasi beragama, serta memanfaatkan acara-acara budaya sebagai platform untuk membangun moderasi beragama di Kota Tanjungbalai . Mereka mendukung dan menyelenggarakan kegiatan seni, pertunjukan tradisional, dan perayaan agama yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Model ini memahami kekuatan seni dan budaya sebagai alat untuk menyatukan warga, merayakan keberagaman, dan mempromosikan pesan moderasi beragama dengan cara yang lebih mendalam dan emosional.

Pentingnya model komunikasi ini juga tercermin dalam pembentukan forum-forum dialog antaragama yang aktif (Sumpena & Jamaludin, 2020). Pemerintah menyelenggarakan pertemuan rutin antar pemimpin agama dan kelompok etnis untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi bersama untuk tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Model ini

menciptakan ruang untuk mengatasi mispersepsi dan membangun kepercayaan antar komunitas.



Gambar 13.
Peresmian Rumah Moderasi Beragama tahn2022

Selain itu, Pemko Tanjung Balai aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum partisipatif. Model ini memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide mereka terkait moderasi beragama. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah menciptakan rasa memiliki bersama terhadap kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan, sekaligus memperkuat partisipasi aktif dalam menjaga kerukunan di Kota Tanjung Balai.



Gambar 14.
Forum Partisipatif

Model komunikasi Pemko Tanjung Balai juga menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan dalam membangun pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama. Mereka melibatkan lembaga-lembaga pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif tentang nilai-nilai moderasi. Dengan mendukung pendidikan yang inklusif dan mendalam, model ini bertujuan untuk membentuk pemikiran yang rasional dan positif terhadap perbedaan agama.

Pemerintah juga memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminatif atau intoleran (Achmad, 2022). Model

ini menciptakan mekanisme yang jelas untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu moderasi beragama. Dengan demikian, masyarakat merasa aman dan yakin bahwa pemerintah serius dalam melindungi kerukunan dan harmoni di Kota Tanjung Balai.

Keseluruhan, model komunikasi Pemerintah kota Tanjungbalai adalah upaya yang holistik untuk membangun moderasi beragama dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal, melibatkan masyarakat secara aktif, dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Dengan fokus pada kerjasama, edukasi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan moderasi beragama di lingkungan yang heterogen dan multikultural seperti Kota Tanjung Balai.

2. Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Moderasi Beragama di Kota Tanjung Balai

Kota Tanjung Balai memiliki warisan kearifan lokal yang kaya dan beragam. Kearifan lokal di kota ini mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya, agama, dan tradisi yang memengaruhi perkembangan masyarakatnya. Salah satu aspek penting dari kearifan lokal di Tanjung Balai adalah harmoni antara berbagai kelompok etnis dan agama. Kota ini menjadi rumah bagi berbagai kelompok seperti Melayu, Tionghoa, Batak, dan lainnya, serta agama seperti Islam, Buddha, dan Kristen.

Sejarah kota ini dalam sejarah berawal dari masyarakat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebagaimana masyarakat Indonesia secara umum, pengaruh keyakinan awal masyarakat sangatlah besar, bagi politik, ekonomi,

sosial dan budaya pemikiran masyarakat saat ini. Meski demikian, aliran kepercayaan awal masyarakat nusantara termasuk orang Melayu yaitu animisme dan dinamisme tetap ada, kedatangan agama Islam, tidak serta merta menghapuskan aliran kepercayaan ini, namun seiring masuk dan berkembangnya ajaran Islam tersebut merubah dan mewarnai budaya yang ada.

Seiring penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, nilai-nilai Islam berangsur-angsur menyatu dengan tradisi, norma, dan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Kerelaan mereka mengizinkan orang asing untuk tinggal di negeri mereka menunjukkan bahwa mereka siap membagi kehidupan bersama. Pendirian beberapa kerajaan Islam di beberapa pulau Indonesia seperti pulau Sumatera, adalah bukti begitu kuatnya pengaruh Islam di negeri ini. Islam sebagai faktor eksternal berhasil menyatukan kelompok-kelompok etnis yang terdiri atas beberapa suku yang ada di Sumatera. Arus aktivitas pedagang, pengembaraan ulama, dan penggunaan bahasa Melayu merupakan tulang punggung bagi integrasi budaya tersebut.

Dalam masyarakat multietnik, seperti di Kota Tanjungbalai, bahasa Melayu merupakan bahasa dominan yang digunakan dalam pergaulan sosial. Secara historis, dominasi bahasa Melayu ini terkait dengan masa awal keberadaan orang Melayu di kota tersebut. Seperti halnya kota-kota maritim lainnya di tanah air, Tanjungbalai yang merupakan salah satu kota bandar maritim telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) penduduk setempat.

Bahasa merupakan salah satu identitas kelompok etnik akan tampak jelas dalam suatu interaksi sosial masyarakat majemuk. Salah satu identitas Orang Melayu adalah bahasa Melayu. Orang-orang Melayu di Tanjungbalai menguasai dengan baik bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa-bahasa tersebut ditentukan oleh konteks interaksi yang mereka hadapi. Dalam pergaulan sehari-hari, seperti di tempat-tempat publik, bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi dan interaksi sosial yang digunakan oleh orang-orang Tanjungbalai. Bahasa Indonesia akan digunakan oleh orang-orang Melayu Tanjungbalai jika mereka berurusan dengan instansi atau dalam situasi resmi.

Konteks historis dan geografis di atas, telah menempatkan bahasa Melayu memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Tanjungbalai. Karena bahasa Melayu merupakan referensi komunikasi sosial, para pendatang pun seperti orang-orang Batak dan etnis lain harus belajar dan menggunakan bahasa tersebut dengan baik. Pemahaman yang baik terhadap bahasa Melayu sering mendorong timbulnya gejala interferensi leksikal ketika orang-orang Tanjungbalai berbicara dalam bahasa Melayu di lingkungan internalnya atau ketika mereka berbahasa Indonesia dengan orang yang baru dikenalnya.

Sebagai sarana interaksi sosial, penguasaan bahasa Melayu tidak hanya untuk mengekspresikan diri, tetapi juga menjadi media integrasi sosial dengan orang-orang Melayu atau penduduk Tanjungbalai. Dalam konteks integrasi sosial, bahasa bukan sekedar untuk meningkatkan “daya keberterimaan” masyarakat lokal terhadap kehadiran dan eksistensi orang-orang luar, memudahkan

pemahaman terhadap budaya masyarakat lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk mempermudah akses terhadap sumber daya ekonomi lokal.

Berdasarkan fakta sejarah ini, kita ambil suatu pelajaran bahwa perkembangan Islam dilakukan dengan cara-cara yang penuh toleransi, dalam artian pesan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat untuk semesta alam, disampaikan dengan cara yang damai dan persuasif, dakwah dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur budaya lokal masyarakat melayu atau dengan cara akulturasi budaya bukan dengan kekerasan. Dengan cara ini ajaran Islam meresap ke dalam masyarakat Melayu. Sehingga muncul idiom *cultural* yang mengatakan bahwa “Bicara Melayu berarti bicara tentang Islam dan Budaya Melayu berarti Budaya Islam”, ini suatu ungkapan yang menyatakan bahwa antara dunia Melayu dan Islam merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.(Mailin : 2016)

Satu hal yang perlu dipahami bersama adalah bahwa akulturasi Islam di Indonesia, tidak hanya meliputi dunia Melayu saja, karena Islam juga sangat kental masuk dalam masyarakat Jawa, namun tidak pernah orang mengatakan bahwa bicara Jawa berarti bicara Islam. Demikian juga hal nya dengan proses masuknya budaya Melayu dalam masyarakat Batak Toba yang ada di kota Tanjungbalai, bukan lah suatu hal yang mudah. Akulturasi budaya Melayu dan Budaya Batak di kota ini melalui perjalanannya panjang. Sehingga lahirnya budaya Melayu yang berbeda dengan Melayu di daerah lain. Melayu di daerah Tanjungbalai ini cenderung kasar baik dalam tutur kata maupun tingkah laku. Hal ini dikarenakan terjadinya akulturasi antara budaya Melayu dan Budaya Batak.

Islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk manusia agar bersosialisasi kemudian melahirkan suatu kebudayaan. Kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang dibuat manusia sebagai anggota masyarakat, dipandang sebagai realita yang menjadi sasaran ajaran Islam. Peran agama Islam dalam kebudayaan ini adalah memberikan nilai-nilai etis yang menjadi ukuran nilai.

Dalam kehidupan sosial orang Melayu di Sumatera khususnya di Kota Tanjungbalai, hubungan persaudaraan antara orang Melayu dengan orang-orang Batak yang beragama Islam ternyata sudah terjalin dengan sangat baik. Sebagaimana lazimnya pada masyarakat atau kelompok etnik lain, orang Melayu juga lebih memperhatikan faktor agama dalam urusan perkawinan atau perijodohan. Sekalipun demikian, dalam hal-hal tertentu orang Melayu menghargai pluralisme sosial keagamaan dan kesukuan.

Proses akulturasi budaya Melayu dan masyarakat Batak Toba Muslim di Tanjungbalai selain berdasarkan beberapa faktor diatas, terdapat beberapa persamaan budaya yang menyebabkan mudahnya proses akulturasi budaya Batak dan Budaya Melayu di kota ini, diantaranya:

1. Sistem kekerabatan suku Batak Toba dan Suku Melayu sama-sama menggunakan garis keturunan dari bapak (patrilineal). Kaum laki-laki menjadi penentu dalam membentuk garis keturunan dan hubungan kekerabatan. Namun dalam beberapa adat istiadat terdapat perbedaan.

2. Selain terdapat kesamaan dalam sistem kekerabatan, terdapat juga kesamaan dalam suku Batak Toba dan suku Melayu, dalam hal budaya, seperti

ungkapan-ungkapan pantun dalam suku Melayu, juga terdapat ungkapan-ungkapan umpasa dalam suku Batak Toba. Budaya meratap dalam suku Batak Toba, juga terdapat dalam suku Melayu, yaitu: sinandong.

3. Menurut kajian sejarah dan antropologi, nenek moyang orang Batak sama dengan orang Melayu, berasal dari Hindia Belakang, dan penutur bahasa Austronesia.

Kearifan lokal di Tanjung Balai mengajarkan nilai-nilai saling menghormati dan hidup berdampingan, yang telah berkontribusi pada koeksistensi yang relatif damai di antara kelompok-kelompok ini. dalam tataran ini penulis akan mengklasifikasikan melalui tabulasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal kota Tanjung Balai yang dapat dioptimalkan sebagai instrument moderasi beragama, beberapa di antaranya adalah:

Tabel 7.
Klasifikasi Kearifan Lokal Kota Tanjung Balai

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Koeksistensi Etnis dan Agama	Kearifan lokal Tanjung Balai tercermin dalam harmoni antara berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Tionghoa, dan Batak,

		serta berbagai agama seperti Islam, Buddha, dan Kristen. Nilai-nilai saling menghormati dan hidup berdampingan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari (Supriyanto, 2022).
2	Tradisi Budaya	Festival dan acara budaya lokal seperti perayaan Imlek, Lebaran, dan Pesta Rakyat Tanjung Balai menggambarkan kearifan lokal dalam merayakan perbedaan dan merangkul keragaman. Tradisi-tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan pemahaman lintas budaya (Suarnaya, 2021).
3	Gotong Royong	Nilai-nilai gotong royong dan kerja sama komunal tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong digunakan untuk membangun rumah, membantu tetangga dalam acara-acara khusus, dan dalam berbagai kegiatan sosial (Nashohah, 2021).
4	Adat-Istiadat Lokal	Adat-istiadat lokal seperti upacara perkawinan, adat istiadat kelahiran, dan peringatan kematian memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya. Ini juga menjadi wadah di mana

		nilai-nilai agama dan budaya diintegrasikan (Lede, 2022).
5	Seni dan Pertunjukan	Pertunjukan seni tradisional seperti tari dan musik lokal menjadi sarana untuk mengabadikan dan merayakan warisan budaya. Acara-acara seni ini juga dapat menjadi wadah bagi pertukaran budaya antar kelompok etnis (Hamdani, 2020).
6	Warisan Kebudayaan Lokal	Tanjung Balai memiliki warisan kebudayaan lokal yang bersifat sakral seperti tarian dan senandung Gubang yang berfungsi sebagai pemanggil angin untuk aktivitas nelayan (Irmayanti et al., 2022). Ada pula pengobatan tradisional seperti Songgot dan lain sebagainya.

Sumber: Diolah Peneiti (2024)

Selain itu terdapat Beberapa tradisi di masyarakat Tanjungbalai, diantaranya:

1. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Tradisilisan yang ada di Kota Tanjungbalai :
 - 1) Cerita rakyat “Asal Mula Pulau Simardan”

- 2) Pantang larang adalah petuah–petuah atau nasihat yang disampaikan oleh orang–orang tua secara seperti istilah Sonjo Kalo. Sonjo kalo secara bahasa artinya adalah kala senja atau waktu senja. Waktu senja atau maghrib pada masyarakat Tanjungbalai dahulu adalah waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk keluar rumah atau berkeliaran kecuali adahal-hal penting yang mendesak.
 - 3) Petuah membangun rumah. Masyarakat pada masa lalu menggunakan banyak pituah dan pantang larang dalam membangun rumah. Masyarakat juga memperhatikan banyak faktor yang juga sangat bermakna
 - 4) Mendadong anak
 - 5) Kebiasaan pelaut memperhatikan suara ayam berkokok pada dini hari (pukul 01.00 – 03.00), apabila terdengar suara ayam berkokok pada dini hari biasanya sebagai pertanda akan terjadi pasang naik air laut dan sungai pada subuh hari.
2. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Beberapa adat istiadat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Tanjungbalai adalah :
- 1) Bubur Podas

Bubur podas adalah salah satu makanan khas Kota Tanjungbalai yang selalu dibuat pada saat bulan ramadhan. Sebelum memasuki bulan ramadhan dan pada malam ke 27 bulan ramadhan masyarakat Tanjungbalai

yang beragama islam memiliki kebiasaan saling memberi makanan kepada sanak saudara dan tetangga.

Memasuki rumah baru.

Gotong royong membersihkan lingkungan dan rumah ibadah.

3. Ritual Khusus

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

4. Menyonggot

Menyonggot adalah adat Melayu yang sangat lekat dengan orang-orang melayu. Menyonggot bisa diartikan sebagai penjeput semangat. Menyonggot dilakukan oleh masyarakat melayu di beberapa kesempatan baik itu suka maupun duka.

Beberapa kesempatan untuk menyonggot diantaranya:

- a. Pernikahan
- b. Tujuh bulanan kandungan/ Melanggeng perut
- c. Kelahiran/mengayunkan
- d. Khitanan anak
- e. Khataman Al-Quran

Sekarang menyonggot juga telah dilakukan pada kesempatan-kesempatan

seperti:

- 1) Wisuda
- 2) Berhasil dalam tugas
- 3) Pergi dan Pulang haji/umrah
- 4) Baru sembuh dari sakit

Saat menyonggot, diusahakan agar orang yang akan disonggot tidak mengetahui bahwa dia akan disonggot. Dengan tidak diberi tahu terlebih dahulu maka orang yang akan disonggot nantinya akan terkejut dan merasa bahagia telah diperhatikan. Bahagia karena merasa diperhatikan inilah yang diharapkan menjadi obat dan penyemangat.

Menyonggot biasanya menggunakan balai/bale dan tepung tawar. Bale akan diangkat ke atas kepala orang yang disonggot dan tepung tawar yang akan di percik-percikkan atau di oleskan ke orang yang di songgot tadi.

Selain tepak, Bale/Balai dan tepung tawar harus dimiliki oleh orang melayu. Kedua benda ini yaitu Bale/balai dan Tepung tawar sama pentingnya dengan tepak yang hampir selalu ada di setiap kegiatan atau perayaan.

1. Pantun

Bagi Masyarakat Melayu Asahan-Tanjungbalai, pantun sejak dulu hingga hari ini menjadi salah satu bagian penting yang mampu menunjukkan jati diri adat bangsa melayu. Hampir setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu menggunakan pantun.

Senandong yang merupakan nyanyian khas di daerah Melayu Asahan-Tanjungbalai ini sajumpun menggunakan lirik yang kebanyakan disusun seperti pantun. Ketika pernikahan, juga banyak ditemukan pantun. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lain. Sampai hari ini, pantun masih menjadi ciri khas Melayu Asahan-Tanjungbalai. Biasanya, dalam sambutan-sambutan kenegaraan dari walikota, kepala-kepala dinas, atau tokoh-tokoh masyarakat di dalam sebuah kegiatan masih menggunakan pantun sebagai pembuka dan penutupnya.

5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

1) Tepak

Tepak bagi Masyarakat Melayu khususnya Melayu Asahan-Tanjungbalai merupakan hal yang sangat penting. Setiap rumah orang melayu harus memiliki tepak. Dahulu, tepak harus dihidangkan setiap tamu datang.

Sampai hari ini penggunaan tepak masih sering kita lihat.

Hanya saja memang penggunaannya diminimalisir hanya ketika ada perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan.

6. Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Beberapa Seni yang ada di Tanjungbalai adalah :

1) Senandong

Senandong adalah tradisi lisan berupa syair nyanyian yang isinya menceritakan tentang kesedihan nasib seseorang. Menurut beberapa penutur, Senandong yang dalam bahasa Indonesia bisa dituliskan dengan Senandung itu merupakan kata yang berasal dari Siandong yang artinya juga sangat mirip yaitu Mengoluh akan peruntungannya.

Mengoluh akan peruntungannya maksudnya adalah bahwa senandong ini dahulu merupakan syair-syair yang dinyanyikan oleh masyarakat yang mengeluh atas apa yang terjadi kepadanya. Senandong dinyanyikan dengan lirik-lirik seperti pantun. Lirik-lirik tersebut biasanya adalah lirik-lirik yang berisi kesedihan dan penyesalan.

Namun, sejak ajaran Islam semakin kental, masyarakat mulai mengganti lirik-lirik senandong tersebut dengan lirik-lirik yang lebih baik, tidak ada rapatan dan kesedihan. Lirik- lirik senandong juga

bisa diganti dengan lirik yang mampu mengajak orang berbuat baik, menumbuhkan semangat, dan mengajak orang lain untuk belajar serta menghormati sesama.

Demikian beberapa kearifan lokal dalam tradisi masyarakat Tanjungbalai.

Koeksistensi etnis dan agama dalam konteks komunikasi pemerintah untuk membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai menjadi suatu tantangan yang kompleks, namun sangat penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antarwarga. Kota Tanjung Balai, sebagai daerah yang multikultural dan multiagama, memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama. Pemerintah perlu menjalankan peran yang proaktif dalam memfasilitasi dialog dan pemahaman antar kelompok etnis serta agama untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi moderasi beragama.

Dalam membangun moderasi beragama, pemerintah harus memanfaatkan komunikasi sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan-pesan inklusif yang menghargai keberagaman (Natonis et al., 2023). Melalui kampanye-kampanye pendidikan dan penyuluhan, pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi landasan bagi toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Penting bagi pemerintah untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat etnis dalam upaya komunikasi ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih relevan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah

langkah yang krusial. Dengan melibatkan warga dalam forum-forum diskusi dan konsultasi, pemerintah dapat membangun rasa memiliki bersama terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan harmoni di Kota Tanjung Balai.

Keberhasilan komunikasi pemerintah dalam membangun moderasi beragama juga bergantung pada adanya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminatif atau intoleran (Abdillah et al., 2023). Pemerintah perlu menunjukkan sikap yang konsisten dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak koeksistensi etnis dan agama. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis.

Terakhir, pengembangan media yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, keberagaman, dan moderasi beragama juga merupakan elemen penting dalam upaya ini (Yusuf & Mutiara, 2022). Pemerintah dapat mendukung media lokal untuk menyebarkan informasi yang positif dan mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk opini publik yang mendukung moderasi beragama di Kota Tanjung Balai.

Kemudian, Dalam konteks pembangunan moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai, tradisi budaya memegang peran

penting sebagai elemen identitas yang mengikat masyarakat. Tradisi budaya menjadi fondasi yang kuat untuk membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung moderasi beragama (Siregar, 2022). Pemerintah perlu menggali dan mempromosikan tradisi-tradisi budaya yang memiliki nilai-nilai inklusif dan menghormati perbedaan, sehingga dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan harmoni antarwarga.

Pentingnya tradisi budaya terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan moral dan spiritual bagi masyarakat. Melalui kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi budaya, masyarakat dapat memahami nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong-royong, dan keadilan (Siahaan & Kause, 2022). Pemerintah dapat memanfaatkan platform tradisi budaya untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama, sehingga nilai-nilai tersebut terus diteruskan dan diinternalisasi oleh generasi muda.

Selain itu, tradisi budaya juga dapat menjadi jembatan untuk membangun dialog antarwarga yang berasal dari berbagai etnis dan agama. Pemerintah dapat menyelenggarakan acara-acara budaya bersama yang melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat, sehingga tercipta ruang yang inklusif dan ramah bagi semua warga. Dengan memanfaatkan tradisi budaya, pemerintah dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa solidaritas di antara masyarakat Kota Tanjung Balai.

Adanya dukungan terhadap seni dan budaya lokal juga dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat (Riyadi et al., 2022). Pemerintah dapat mendorong pengembangan industri kreatif yang berbasis pada tradisi

budaya, seperti kerajinan lokal, tarian, dan musik tradisional. Ini tidak hanya akan mendukung pelestarian warisan budaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Terakhir, pemerintah perlu mendorong pembelajaran dan penelitian terkait tradisi budaya sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Dengan memasukkan unsur-unsur kearifan lokal dalam pendidikan formal, masyarakat Kota Tanjung Balai dapat memahami dan menghargai tradisi budaya sebagai sumber nilai untuk memperkuat moderasi beragama di lingkungan mereka.

Di sisi lain, Gotong-royong memiliki peran sentral dalam upaya membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. Prinsip gotong-royong mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah dapat memanfaatkan nilai gotong-royong sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana warga dari berbagai etnis dan agama dapat saling mendukung dan bekerja bersama.

Dalam konteks moderasi beragama, gotong-royong dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat mengorganisir kegiatan gotong-royong yang melibatkan semua lapisan masyarakat, sehingga membangun rasa kebersamaan dan persatuan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengalami langsung nilai-nilai positif gotong-royong, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar untuk memahami dan menghormati perbedaan dalam keyakinan agama.

Gotong-royong juga menjadi sarana untuk membangun solidaritas di antara warga kota (Lede, 2022). Pemerintah dapat menggandeng organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok-kelompok sukarelawan untuk melaksanakan proyek-proyek gotong-royong yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang inklusif dan saling mendukung, yang dapat menjadi dasar untuk moderasi beragama.

Pentingnya gotong-royong dalam moderasi beragama juga terlihat dalam penanggulangan konflik dan potensi ketegangan antarwarga. Dengan mempromosikan semangat gotong-royong, masyarakat dapat lebih mudah menyelesaikan perbedaan dan konflik melalui dialog dan kerjasama. Pemerintah dapat memfasilitasi forum-forum gotong-royong yang berfungsi sebagai wadah untuk berdiskusi dan menemukan solusi bersama.

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong-royong juga dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Pemerintah dapat menyertakan informasi pendidikan dalam setiap kegiatan gotong-royong, menggali nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, gotong-royong bukan hanya menjadi kegiatan fisik, tetapi juga platform untuk membangun pemahaman dan kesadaran bersama dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Tanjung Balai.

Adat-istiadat lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. Warisan budaya ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan

harmoni dan kerukunan antarwarga. Pemerintah dapat memanfaatkan adat-istiadat lokal sebagai sumber inspirasi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung moderasi beragama, sekaligus menjaga dan memperkaya identitas kultural masyarakat.

Dalam konteks moderasi beragama, adat-istiadat lokal dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Susanti, 2022). Nilai-nilai seperti saling menghormati, keadilan, dan gotong-royong yang tertanam dalam adat-istiadat dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan agama. Pemerintah dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam program edukasi dan penyuluhan untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya moderasi beragama.

Adat-istiadat lokal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun dialog antarwarga dari berbagai etnis dan agama. Pemerintah dapat menggelar acara-acara yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan upacara atau kegiatan adat. Dengan demikian, tercipta ruang bagi warga untuk saling mengenal, memahami, dan menghormati tradisi masing-masing, yang pada akhirnya dapat memperkuat kerukunan hidup bersama (Rahma, 2021).

Upaya pelestarian adat-istiadat lokal juga dapat membawa dampak positif pada sektor ekonomi dan pariwisata. Pemerintah dapat memberdayakan komunitas lokal untuk mengembangkan produk-produk berbasis adat yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman budaya sebagai aset berharga.

Pentingnya adat-istiadat lokal juga terletak pada perannya dalam menangkal pengaruh-pengaruh eksternal yang mungkin mengancam harmoni sosial. Dengan memperkuat nilai-nilai lokal, masyarakat dapat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan tetap teguh pada prinsip-prinsip moderasi beragama. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempromosikan kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan adat-istiadat sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Kota Tanjung Balai.

Selanjutnya, Seni dan pertunjukan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. Seni tidak hanya menciptakan keindahan visual, tetapi juga dapat menjadi medium yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan inklusif, toleran, dan menghormati perbedaan keyakinan agama. Pemerintah dapat memanfaatkan seni dan pertunjukan sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman kultural dan keagamaan di tengah masyarakat.

Melalui seni dan pertunjukan, pemerintah dapat menciptakan ruang ekspresi bagi seniman lokal untuk menggambarkan nilai-nilai moderasi beragama (Rasyid, 2022). Pertunjukan seni, seperti drama, tarian, dan seni rupa, dapat menjadi wahana bagi seniman untuk menyampaikan pesan-pesan harmoni dan toleransi secara kreatif. Pemerintah dapat mendukung produksi seni lokal yang mewakili berbagai aspek keberagaman di Kota Tanjung Balai.

Pertunjukan seni juga dapat menjadi sarana untuk membangun dialog antarwarga yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, etnis, dan agama.

Pemerintah dapat menggelar acara seni bersama yang melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, menciptakan ruang untuk pertukaran ide dan pengalaman. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman antarwarga tentang nilai-nilai budaya dan agama satu sama lain, serta memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan seni sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Program seni edukatif, seperti pameran seni atau pertunjukan teater pendidikan, dapat memberikan informasi yang kreatif dan menarik tentang nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antarumat beragama.

Pentingnya seni dan pertunjukan juga terlihat dalam upaya pelestarian tradisi budaya lokal. Seni tradisional, seperti musik dan tarian tradisional, tidak hanya menjadi warisan budaya yang berharga tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung moderasi beragama.

Pemerintah dapat melibatkan komunitas seni lokal dalam inisiatif-inisiatif pembangunan berbasis budaya. Dukungan terhadap seniman dan kelompok seni lokal dapat memberikan kontribusi positif pada ekonomi kreatif daerah, sambil menjaga dan mempromosikan moderasi beragama melalui karya seni yang dihasilkan. Dengan demikian, seni dan pertunjukan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi kreatif tetapi juga alat strategis untuk membangun harmoni dan moderasi beragama di Kota Tanjung Balai.

Terakhir, Warisan kebudayaan lokal di Kota Tanjung Balai menjadi pilar yang sangat penting dalam upaya membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal (Kautsar & Mahmudah, 2021). Warisan ini mencakup berbagai aspek, termasuk tradisi, adat-istiadat, seni, dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah dapat memanfaatkan warisan kebudayaan lokal sebagai sumber inspirasi dan fondasi untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang moderasi beragama di tengah masyarakat yang multikultural.

Warisan kebudayaan lokal dapat menjadi instrumen untuk meresapi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Pemerintah dapat mempromosikan budaya saling menghormati dan memahami antarwarga dengan memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh komunitas. Melalui pelestarian dan promosi warisan kebudayaan lokal, masyarakat dapat memahami dan menghargai keberagaman agama dan budaya yang ada di Kota Tanjung Balai.

Adat-istiadat dan tradisi lokal dapat menjadi cara untuk membangun norma dan etika dalam masyarakat yang mendukung moderasi beragama (Belwawin & Abineno, 2023). Pemerintah dapat mendukung upaya pelestarian tradisi lokal dengan mengadakan acara-acara yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Ini dapat menciptakan ruang untuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan antarwarga, memperkaya pemahaman tentang moderasi beragama.

Warisan kebudayaan lokal juga dapat menjadi sumber daya ekonomi yang bernilai. Pemerintah dapat mendukung pengembangan industri kreatif berbasis

kebudayaan lokal, seperti kerajinan tangan tradisional, kuliner khas daerah, atau pariwisata budaya. Dengan cara ini, pelestarian warisan kebudayaan lokal tidak hanya mendukung identitas budaya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.

Pentingnya pelestarian warisan kebudayaan lokal juga terlihat dalam peranannya dalam menanamkan nilai-nilai positif pada generasi muda. Pemerintah dapat mengintegrasikan unsur-unsur warisan kebudayaan dalam sistem pendidikan formal dan non-formal (Maharani & Rahmانيar, 2023). Dengan demikian, generasi muda dapat menghargai dan meneruskan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung moderasi beragama, sehingga warisan kebudayaan dapat terus hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat Kota Tanjung Balai.

Selain itu, kearifan lokal di Tanjung Balai juga tercermin dalam tradisi dan budaya lokal yang unik. Idealnya moderasi beragama yang dapat dimaksimalkan di kota Tanjung Balai harus bersifat akomodatif dengan budaya lokal. Dengan begini, moderasi beragama dapat diinternalisasi melalui pemahaman nilai-nilai kultural yang dapat mendegradasi fanatisme dalam beragama.

Bertolak dari pendapat diatas, maka peneliti berasumsi bahwa selain dengan menggunakan bahasa dalam artian yang sebenarnya, Islamisasi di tanah Melayu juga melalui media “bahasa” dalam artian “bahasa budaya”. Bahasa budaya yang dimaksud adalah dengan cara pendekatan budaya dalam wujud akulturasi. Sehingga dengan “bahasa budaya” inilah, Islamisasi di tanah melayu

meresap hingga ke dalam kehidupan masyarakat, hingga lapisan paling bawah sekalipun.

Proses Islamisasi dan perkembangan budaya serta peradaban Islam dalam hal ini memainkan peranan yang signifikan dalam sejarah kesultanan Melayu di daerah-daerah di Indonesia, termasuk sejarah kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur seperti Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kesultanan Serdang, Kesultanan Kualuh, Kesultanan Bilah, dan Kesultanan Asahan.

3. Peluang dan Tantangan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Tanjungbalai

Dalam merangkai wacana mengenai peluang dan tantangan moderasi beragama berbasis kearifan lokal, kita harus memahami bahwa kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat tertentu. Pendekatan moderasi beragama yang berakar pada kearifan lokal menawarkan peluang signifikan untuk membangun harmoni antarumat beragama, namun sekaligus dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan pemikiran kritis dan strategi yang matang (Islamy & Susilo, 2022).

Berdasarkan wawancara bersama Kasi Bimas Islam Bapak Mulyadi bahwa beliau menyampaikan tatangan dan hambatan dalam komunikasi kepada tokoh-tokoh agama tidak ada karena semua tokoh-tokoh agama apabila dikumpulkan mereka menyambut dengan baik, serta masyarakat juga menyambut baik, jika di sampaikan dengan komunikasi yang baik, sehingga mudah difahami masyarakat.

Salah satu peluang utama moderasi beragama berbasis kearifan lokal adalah kemampuannya untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan

inklusif. Kearifan lokal mencerminkan toleransi terhadap perbedaan dan menghormati pluralitas keyakinan. Dengan merangkul nilai-nilai ini, moderasi beragama dapat menjadi fondasi untuk membangun dialog antarumat beragama yang konstruktif. Pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai landasan untuk menciptakan inisiatif dialog dan pertemuan lintasagama yang mempromosikan pemahaman bersama dan kesejahteraan bersama (Bachrong & Karim, 2022).

Selain itu, peluang moderasi beragama berbasis kearifan lokal terletak pada potensinya untuk mengurangi ketegangan dan konflik antarumat beragama. Dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pada gotong royong, saling menghormati, dan perdamaian, moderasi beragama dapat mengubah dinamika konflik menjadi kesempatan untuk membangun kerjasama dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Penggunaan kearifan lokal sebagai pijakan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengatasi ketegangan dan mencegah konflik yang lebih serius .

Selain itu, moderasi beragama berbasis kearifan lokal dapat menjadi kekuatan penghubung antara agama dan pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai kearifan lokal sering kali mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pemberdayaan masyarakat (Sholikah, 2022). Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat menjadi agen positif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai lokal yang diyakini oleh masyarakat.

Namun, di tengah peluang-peluang tersebut, moderasi beragama berbasis kearifan lokal juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan konsep kearifan lokal untuk kepentingan politik atau keagamaan tertentu. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak tertentu mungkin mencoba mengklaim bahwa pemahaman mereka tentang kearifan lokal adalah satu-satunya yang benar, dan hal ini dapat merugikan semangat dialog dan toleransi.

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Saibon Selaku pengelola kampung moderasi beragama mengatakan bahwa :

“Tantangan atau hambatan yang dihadapi pemerintahan kota tanjungbalai adanya alasan politik seringkali digunakan untuk menunggangi agama dan memanfaatkannya dikota tanjungbalai, hambatan ini menyebabkan runtuhnya kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun dengan susah payah oleh pemerintah kota Tanjungbalai.”

Hasil Wawancara dengan Bapak syahrial Selaku pengelola kampung moderasi beragama mengatakan bahwa :

“Tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintahan kota tanjungbalai adanya sikap fanatisme dalam berbagai agama dapat terjadi dan berkembang dikota tanjungbalai, ini dapat membentuk radikal oleh karena itu mereka berpikir bahwa ajaran yang mereka anut adalah paling benar. Dan mereka berpikir bahwa orang yang tidak menganut agama ajaran itu dianggap sesat.”

Hasil wawancara dengan masyarakat terhadap tantangan atau hambatan mengatakan bahwa:

“Tantangan ini menjadi paling sulit dikondisikan dan sebagian agama berfikir bahwa untuk tidak saling toleransi akibat memanfaatkan ajaran dan politik yang mereka ambil.” Tantangan ini berawal dari salah satu pihak kurang dengan ajaran yang mereka anut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan atau hambatan yang dihadapi pemerintahan kota Tanjungbalai adalah rendahnya

sikap toleransi umat beragama dikarenakan masih ada sikap fanatisme warga masyarakat Kota Tanjungbalai. Tantangan lainnya adalah potensi ketidaksetaraan dalam pengakuan dan perlindungan bagi semua kelompok agama dalam konteks kearifan lokal. Kadang-kadang, nilai-nilai lokal yang diutamakan masyarakat tertentu mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan kelompok agama minoritas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih mendalam dan inklusif untuk memahami kearifan lokal dalam konteks keseluruhan masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks kearifan lokal, risiko terjadinya ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas perlu diwaspadai (Rahmayuni & Hidayat, 2020). Bila tidak dikelola dengan bijaksana, moderasi beragama berbasis kearifan lokal dapat memperkuat norma-norma patriarki atau merugikan hak-hak kelompok minoritas yang berbeda agama atau keyakinan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama juga mencakup prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.

Selain itu, tantangan lain adalah potensi polarisasi dalam masyarakat akibat moderasi beragama yang tidak seimbang atau tidak adil. Pemerintah dan tokoh agama perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pesan-pesan moderasi benar-benar mencerminkan keragaman masyarakat, dan bahwa tidak ada kelompok yang merasa diabaikan atau tidak diakui. Pendidikan dan kampanye komunikasi perlu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap keragaman agama (Rifandanu et al., 2022).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemahaman mendalam tentang kearifan lokal dan bagaimana nilai-nilainya dapat menjadi dasar untuk moderasi beragama menjadi kunci. Diperlukan pendekatan yang inklusif, di mana partisipasi semua pihak, termasuk kelompok agama minoritas, diperhatikan dan dihormati. Pemerintah juga harus berperan sebagai mediator yang adil dan mendukung inisiatif-inisiatif yang memperkuat moderasi beragama tanpa diskriminatif.

Dalam merespon tantangan dan memaksimalkan peluang moderasi beragama berbasis kearifan lokal, kolaborasi antarumat beragama dan partisipasi masyarakat secara aktif sangat penting. Penguatan lembaga-lembaga yang mewadahi dialog antarumat beragama, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moderasi, dan implementasi kebijakan yang mendukung kerukunan agama menjadi langkah-langkah strategis dalam membangun moderasi beragama yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan cara ini, kearifan lokal tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi motor penggerak bagi moderasi beragama yang mampu membawa masyarakat menuju pemahaman dan toleransi yang lebih baik di tengah perbedaan.

C. Pembahasan

Model Komunikasi yang digunakan pemerintah dalam membangun Moderasi Beragama adalah dengan meningkatkan toleransi umat beragama dengan model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (*relationship*) di antara dua orang atau lebih. Proses komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-

masing pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki konten pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama Kota Tanjungbalai melakukan dialog dengan organisasi masyarakat dari 6 Agama yaitu dari Agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua FKUB Haji Haidir mengatakan bahwa :

“Model Komunikasi pemerintahan kota Tanjungbalai dalam membangun moderasi beragama adalah dengan melakukan komunikasi dan menjalin hubungan baik antar umat beragama, masyarakat warga kota Tanjungbalai harus meningkatkan toleransi dalam beragama dengan adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan harmonis harus dimulai dari adanya rasa saling pengertian dan saling menghormati. Konsep saling pengertian dan saling menghormati dapat dimulai dari pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi setiap pemeluk agama.”

Pemerintah kota Tanjungbalai dalam hal ini menegaskan bahwa komitmen Pemerintah kota Tanjungbalai dalam membawa visi Religius atau Agamis dalam beberapa kegiatan sangat sakral dan sarat makna karena menunjukkan keharmonisan hidup berdampingan, sebagaimana disampaikan bapak walikota :
 “Membedakan semua agama itu adalah adalah Aqidah dan ibadah nya. Selain itu kita semua sama. Kita manusia yang bersaudara. Anak cucu Nabi Adam. Kegiatan ini juga menurut saya sebagai bukti bahwa imej Tanjungbalai sebagai daerah intoleran tidak ada lagi. Kita juga sudah meletakkan atau mendirikan berdirinya

tugu perdamaian, di Water Front City. Selanjutnya akan dibangun semua Rumah Ibadah yang berdampingan di Water Front City tersebut sebagai destinasi wisata religi,” tandasnya. hasil wawancara bersama Bapak Kabagkesra Heri Gunwan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama, tokoh masyarakat, Tokoh ulama serta masyarakat membentuk kampung moderasi beragama dan membangun tugu kerukunan di depan Vihara Tri Ratna jalan Asahan.

Hal ini dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga kerukunan dan persatuan antar semua komponen masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan rasa damai dan aman dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting, mengingat dalam pemilu nanti dinamika nya semakin semakin tinggi FKUB punya kewajiban mengajak, menyerukan umat agar menjaga kerukunan agar menjaga kerukunan antar kondusivitas daerah menjelang pemilu tahun 2024.

Peran tokoh agama sangat strategis dalam mendinginkan suasana (*Cooling Sistem*) dan dalam mencegah terjadinya perpecahan dalam kontestasi politik menghadapi pemilu tahun 2024 maka sosialisasi ini menjadi penting sebagai upaya cipta kondisi pemilu yang aman, nyaman, damai, dan demokratis, sebagaimana wawancara dengan Tokoh FKUB kota Tanjungbalai "Saya berharap forum kerukunan umat beragama Kota Tanjungbalai dapat terus menetapkan perannya di tengah masyarakat, menjadi jembatan dan wadah dalam memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik sosial dalam masyarakat," katanya. "Semoga FKUB kota Tanjungbalai hari ini dapat membangun kinerja serta mampu

membangkitkan semangat kita untuk memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Komunikasi merupakan jembatan utama yang menghubungkan satu sama lain dalam kehidupan sosial. Komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa sayang, mempererat tali silaturahmi dan menciptakan keharmonisan dalam interaksi sehari-hari. Konsep komunikasi Islam memiliki prinsip dan etika yang mendasari bagaimana berkomunikasi secara lebih bermakna dan membawa keberkahan dalam kehidupan. (Tahir & Rayhaniah, 2022)

Konsep komunikasi Islam berakar pada ajaran Alqur'an dan Hadits yang merupakan dua sumber utama ajaran Islam. (Amrullah & Fanani, 2019) Alqur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hadits, di sisi lain, adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh teladan dalam berkomunikasi. (Rakhmawati, 2020)

Alquran menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan bijaksana (QS. An-Nahl: 125). Komunikasi Islam dilandasi oleh akhlak yang tinggi, menghindari ucapan yang tidak berguna, fitnah atau menyinggung (QS. Al-Hujurat: 11-12). Lebih dari itu, Alqur'an juga menganjurkan untuk mendengarkan baik-baik dan menjawab dengan santun (QS. Al-Baqarah: 83).

Kearifan lokal di kota ini mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya, agama, dan tradisi yang memengaruhi perkembangan masyarakatnya. Salah satu aspek penting dari kearifan lokal di Tanjung Balai adalah harmoni antara berbagai

kelompok etnis dan agama

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan praktik-praktik yang telah berkembang dalam suatu masyarakat selama berabad-abad. Ini mencakup pemahaman lokal tentang keseimbangan alam, hubungan antarmanusia, keyakinan spiritual, etika, dan cara-cara hidup yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Kearifan lokal dapat menjadi instrumen moderasi beragama karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) **Inklusivitas:** Kearifan lokal seringkali mencerminkan budaya dan kepercayaan yang inklusif terhadap perbedaan dan keragaman. Di dalamnya terdapat nilai-nilai saling menghormati dan menghargai keberagaman, sehingga dapat mempromosikan toleransi dan persaudaraan di antara beragam kelompok keagamaan (Rumahuru, 2021).
- 2) **Solusi Konflik:** Kearifan lokal sering mengandung pandangan tentang penyelesaian konflik dan mencari keseimbangan di antara pihak-pihak yang berbeda. Prinsip-prinsip tersebut bisa membantu dalam mengatasi perbedaan agama dan mencegah konflik berkepanjangan (Islam, 2020).
- 3) **Relevansi Konteks:** Kearifan lokal cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat setempat. Oleh karena itu, memanfaatkan kawasan lokal dalam konteks moderasi beragama dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah yang spesifik di daerah tersebut (Arafah, 2020).
- 4) **Membangun Kepercayaan:** Ketika prinsip-prinsip kearifan lokal digunakan dalam upaya moderasi beragama, hal itu dapat membantu membangun

kepercayaan dan akseptansi di antara penganut agama yang berbeda. Ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun dialog dan kerjasama yang lebih konstruktif (Saumantri, 2022).

- 5) Menghargai Kearifan Lain: Menggunakan kearifan lokal sebagai instrumen moderasi beragama menghargai dan menghormati warisan budaya dan spiritual suatu masyarakat (Surbakti, 2019). Hal ini bisa membantu menghindari konfrontasi atau penilaian negatif terhadap praktik keagamaan orang lain.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber kearifan lokal juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Selain itu, dalam upaya moderasi beragama, kita juga perlu membuka diri terhadap perspektif global dan menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan aspirasi universal untuk perdamaian dan keadilan.

Dalam tataran ini, untuk menginisiasi kearifan lokal sebagai instrument moderasi beragama dibutuhkan peran pemerintah dalam sosialisasi. Dalam hal ini, perlu digunakan teori difusi inovasi agar pesan-pesan moderasi melalui kearifan lokal dapat diinternalisasi secara merata (Rogers, 1962). Untuk melakukan komunikasi pembangunan agama dengan kearifan lokal sebagai instrumen, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut:

Penelitian dan Pemahaman: Pemerintah perlu melakukan penelitian mendalam tentang kearifan lokal yang ada di wilayah atau komunitas tertentu. Pemahaman yang baik tentang nilai-nilai, tradisi, dan praktik keagamaan lokal

akan membantu pemerintah mengenali cara terbaik untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat (Abidin, 2021).

Kolaborasi dan Konsultasi: Pemerintah harus berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan ahli kearifan lokal dalam proses pembangunan agama. Melalui dialog terbuka dan konsultasi, pemerintah dapat memahami perspektif lokal, memastikan bahwa program pembangunan agama menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada (Tanjung, 2022).

Pendidikan dan Penyuluhan: Pemerintah dapat menggunakan media, seminar, dan pelatihan untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memadukan kearifan lokal dengan pembangunan agama (Hakim, 2018). Ini dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai yang positif dalam kearifan lokal.

Integrasi dalam Kebijakan Pembangunan: Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan agama yang diadopsi mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan menghormati hak-hak serta kebebasan beragama. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program tersebut lebih relevan dan diterima dengan baik oleh masyarakat (Sazali et al., 2015).

Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi dampak dari upaya komunikasi dengan kearifan lokal. Ini akan membantu dalam menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan memberikan peluang untuk perbaikan lebih lanjut (Noor, 2023).

1. Model komunikasi Pemerintah dalam membangun Moderasi Beragama di Kota Tanjung Balai.

Berdasarkan hasil penelitian dilapanagan, pemerintah kota Tanjungbalai menggunakan Beberapa Model komunikasi yang efektif dalam membangun moderasi beragama di masyarakat kota Tanjungbalai. Model Komunikasi yang digunakan pemerintah dalam membangun Moderasi Beragama adalah dengan meningkatkan model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (*relationship*) di antara dua orang atau lebih. Proses komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki konten pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi. berikut Beberapa model komunikasi yang digunakan:

- a. Model Pelatihan dan Penyuluhan: Pemerintah kota Tanjungbalai dapat menggunakan model komunikasi ini dengan fokus pada pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama. Hal ini dilakukan pemerintah melalui kerjasama dgn Kementerian Agama dalam melaksanakan Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan, selain itu dilaksanakn seminar, lokakarya yang melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan akademisi.
- b. Model Kemitraan dengan Pemuka Agama: Pemerintah kota Tanjungbalai dapat menjalin kemitraan dengan pemuka agama dan

lembaga keagamaan untuk membangun moderasi beragama di masyarakat. Dalam model komunikasi ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama kepada umat melalui khutbah, ceramah, dan program-program keagamaan lainnya. Dalam

- c. Model Media dan Teknologi Informasi: Pemerintah kota Tanjungbalai dapat memanfaatkan media massa, media sosial, dan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama kepada masyarakat. Dalam model komunikasi ini, pemerintah dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi modern untuk menyebarkan konten-konten yang mendukung moderasi beragama, seperti video, infografis, artikel.
- d. Model Dialog dan Diskusi Publik: Pemerintah kota Tanjungbalai dapat mengadakan forum-forum dialog dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, pemuda, perempuan, akademisi, dan masyarakat umum. Model komunikasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, pemahaman, dan pendapat yang konstruktif untuk membangun kesepahaman dan moderasi beragama.
- e. Model Penanganan Konflik: Pemerintah kota Tanjungbalai juga perlu memiliki model komunikasi khusus untuk menangani konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama. Dalam model ini, pemerintah

dapat berperan sebagai mediator yang objektif dan adil, serta menggunakan

- f. Integrasi dalam Kebijakan Pembangunan: Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan agama yang diadopsi mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan menghormati hak-hak serta kebebasan beragama. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program tersebut lebih relevan dan diterima dengan baik oleh masyarakat (Sazali et al., 2015).
- g. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi dampak dari upaya komunikasi dengan kearifan lokal. Ini akan membantu dalam menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan memberikan peluang untuk perbaikan lebih lanjut (Noor, 2023).

Penerapan model-model komunikasi di atas harus didukung oleh komitmen kuat dari pemerintah kota Tanjungbalai, kolaborasi antarinstansi pemerintah dan lembaga masyarakat, serta pendekatan yang inklusif dan menghormati keberagaman agama di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haji Haidir (Keua FKUB) mengatakan bahwa :

“Model Komunikasi pemerintahan kota Tanjung Balai dalam membangun moderasi beragama adalah dengan melakukan komunikasi dan menjalin hubungan baik antar umat beragama, masyarakat warga kota Tanjung Balai harus meningkatkan toleransi dalam beragama dengan

adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan harmonis harus dimulai dari adanya rasa saling pengertian dan saling menghormati. Konsep saling pengertian dan saling menghormati dapat dimulai dari pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi setiap pemeluk agama.”

Pemerintah kota Tanjung Balai dalam hal ini menegaskan bahwa komitmen Pemerintah kota Tanjungbalai dalam membawa visi Religius atau Agamis dalam beberapa kegiatan sangat sakral dan sarat makna karena menunjukkan keharmonisan hidup berdampingan, sebagaimana disampaikan Bapak Walikota: “Membedakan semua agama itu adalah adalah Aqidah dan ibadah nya. Selain itu kita semua sama. Kita manusia yang bersaudara. Anak cucu Nabi Adam. Kegiatan ini juga menurut saya sebagai bukti bahwa imej Tanjungbalai sebagai daerah intoleran tidak ada lagi. Kita juga sudah meletakkan atau mendirikan berdirinya tugu perdamaian, di *Water Front City*. Selanjutnya akan dibangun semua Rumah Ibadah yang berdampingan di *Water Front City* tersebut sebagai destinasi wisata religi,” tandasnya. hasil wawancara bersama Bapak Kabagkesra Heri Gunwan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama, tokoh masyarakat, Tokoh ulama serta masyarakat membentuk kampong moderasi beragama dan membangun tugu kerukunan di depan Vihara Tri Ratna jalan Asahan.

2. Penanaman konsep moderasi beragama melalui kearifan lokal masyarakat Kota Tanjung Balai.

Penanaman konsep moderasi beragama melalui kearifan lokal suatu masyarakat bukanlah hal yang mudah di kota Tanjungbalai. hal ini dikarenakan karakter masyarakat Melayu yang dimiliki masyarakat kota Tanjungbalai sulit unruk menerima hal baru. Namun pemerintah melakukan Beberapa langkah pendekatan kepada masyarakat dalam menanamkan konsep moderasi beragama bagi masyarakat, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang kearifan lokal: Langkah pertama adalah memahami kearifan lokal yang ada di Kota Tanjung Balai. Ini melibatkan studi mendalam tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kearifan lokal, Anda dapat menentukan cara terbaik untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Pemahaman yang baik tentang nilai-nilai, tradisi, dan praktik keagamaan lokal akan membantu pemerintah mengenali cara terbaik untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat (Abidin, 2021).
- b. Kolaborasi dengan tokoh agama dan pemimpin masyarakat: Membangun kemitraan dengan tokoh agama dan pemimpin masyarakat setempat sangat penting. Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas dan dapat membantu dalam menyebarkan konsep moderasi beragama. Libatkan mereka dalam

diskusi, seminar, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan dialog antaragama dan toleransi.

- c. Pendidikan dan pelatihan: Sediakan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada moderasi beragama. Ini dapat melibatkan penyediaan bahan ajar yang relevan, seperti buku, brosur, atau materi audiovisual, yang menyoroti nilai-nilai moderasi dan pentingnya menghormati perbedaan agama. Selain itu, lakukan pelatihan bagi guru, pemuka agama, dan pemimpin masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang moderasi beragama dan bagaimana mengajarkannya kepada orang lain. Pemerintah dapat menggunakan media, seminar, dan pelatihan untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memadukan kearifan lokal dengan pembangunan agama (Hakim, 2018).
- d. Menyelenggarakan kegiatan lintas agama: Adakan kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas agama. Misalnya, pertemuan antaragama, dialog agama, kunjungan ke tempat-tempat ibadah, atau kegiatan sosial bersama. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman, saling menghormati, dan kerja sama antara anggota berbagai agama. Dalam hal ini pemerintah berkolaborasi dengan tokoh Agama, tokoh masyarakat, akademisi, ormas, membangun kampung moderasi beragama di Kota Tanjungbalai.

- e. Menggunakan media sosial dan teknologi informasi: Manfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan moderasi beragama yang disampaikan dengan karakter keraifan lokal yang ada, sehingga pesan dapat dengan mudah difahami.
- f. Pembentukan lembaga atau forum interagama: Bantu dalam pembentukan lembaga atau forum yang mewadahi dialog dan kerja sama antaragama di Kota Tanjung Balai. Lembaga semacam ini dapat menjadi tempat untuk berbagi pemikiran, mengatasi perbedaan, dan mempromosikan moderasi beragama secara terus-menerus. Keikutsertaan Lembaga adat seperti Majelis Adat Budaya Melayu kota Tanjungbalai.
- g. Penghargaan dan pengakuan: Apresiasi para tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan individu yang berperan aktif dalam mempromosikan moderasi beragama. Berikan penghargaan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam membangun kerukunan antaragama dan mendorong moderasi beragama di Kota Tanjung Balai.

Penting untuk diingat bahwa penanaman konsep moderasi beragama membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam masyarakat Kota Tanjung Balai.

Di Kota Tanjung Balai, terdapat beberapa contoh kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam moderasi beragama. Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal yang relevan:

- 1) Adat Istiadat yang Menghormati Perbedaan: Masyarakat di Kota Tanjung Balai memiliki adat istiadat yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan agama. Misalnya, dalam merayakan perayaan agama tertentu, masyarakat sering saling mengunjungi dan memberikan ucapan selamat kepada tetangga atau teman seagama maupun berbeda agama. Ini mencerminkan sikap saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan.
- 2) Gotong Royong Lintas Agama: Kearifan lokal yang kuat dalam masyarakat Tanjung Balai adalah semangat gotong royong. Masyarakat berbagai agama sering bekerja sama dalam kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama, seperti membangun tempat ibadah, membersihkan lingkungan, atau mengadakan kegiatan sosial. Semangat gotong royong ini mencerminkan kerjasama dan persatuan di antara masyarakat beragama.
- 3) Adanya Dialog Antaragama: Masyarakat Tanjung Balai memiliki tradisi dialog antaragama sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman dan kerukunan antaragama. Dialog ini dilakukan melalui pertemuan rutin atau acara khusus yang melibatkan pemuka agama dari berbagai denominasi. Dalam dialog ini, mereka

berbagi pemahaman agama, menyoroti persamaan, dan menghormati perbedaan agama.

- 4) Keterlibatan Pemuka Agama dalam Kehidupan Masyarakat: Pemuka agama, seperti guru agama, ulama, pendeta, dan biksu, memiliki peran yang penting dalam masyarakat Tanjung Balai. Mereka tidak hanya mengurus kegiatan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam masalah sosial dan kesejahteraan umum. Melalui keterlibatan aktif mereka, pemuka agama membantu membangun kesadaran akan pentingnya moderasi beragama dan mendorong toleransi di antara umat beragama.
- 5) Warisan Budaya yang Memperkuat Kerukunan: Kota Tanjung Balai kaya akan warisan budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai agama. Misalnya, ada festival budaya atau perayaan yang melibatkan pertunjukan seni, musik, tarian, dan kuliner dari berbagai tradisi agama. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkuat kerukunan antaragama melalui apresiasi terhadap keragaman budaya.

Menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Tanjung Balai dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mempromosikan moderasi beragama. Dengan memperkuat nilai-nilai ini dan mengintegrasikannya dalam pendekatan moderasi

beragama, masyarakat dapat membangun kerukunan, saling menghormati, dan memperkuat toleransi di antara umat beragama.

Kearifan lokal di kota ini mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya, agama, dan tradisi yang memengaruhi perkembangan masyarakatnya. Salah satu aspek penting dari kearifan lokal di Tanjung Balai adalah harmoni antara berbagai kelompok etnis dan agama. Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan praktik-praktik yang telah berkembang dalam suatu masyarakat selama berabad-abad. Ini mencakup pemahaman lokal tentang keseimbangan alam, hubungan antarmanusia, keyakinan spiritual, etika, dan cara-cara hidup yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Kearifan lokal dapat menjadi instrumen moderasi beragama karena beberapa alasan, yaitu:

- 6) **Inklusivitas:** Kearifan lokal seringkali mencerminkan budaya dan kepercayaan yang inklusif terhadap perbedaan dan keragaman. Di dalamnya terdapat nilai-nilai saling menghormati dan menghargai keberagaman, sehingga dapat mempromosikan toleransi dan persaudaraan di antara beragam kelompok keagamaan (Rumahuru, 2021).
- 7) **Solusi Konflik:** Kearifan lokal sering mengandung pandangan tentang penyelesaian konflik dan mencari keseimbangan di antara pihak-pihak yang berbeda. Prinsip-prinsip tersebut bisa membantu

dalam mengatasi perbedaan agama dan mencegah konflik berkepanjangan (Islam, 2020).

- 8) Relevansi Konteks: Kearifan lokal cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat setempat. Oleh karena itu, memanfaatkan kawasan lokal dalam konteks moderasi beragama dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah yang spesifik di daerah tersebut (Arafah, 2020).
- 9) Membangun Kepercayaan: Ketika prinsip-prinsip kearifan lokal digunakan dalam upaya moderasi beragama, hal itu dapat membantu membangun kepercayaan dan akseptansi di antara penganut agama yang berbeda. Ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun dialog dan kerjasama yang lebih konstruktif (Saumantri, 2022).
- 10) Menghargai Kearifan Lain: Menggunakan kearifan lokal sebagai instrumen moderasi beragama menghargai dan menghormati warisan budaya dan spiritual suatu masyarakat (Surbakti, 2019). Hal ini bisa membantu menghindari konfrontasi atau penilaian negatif terhadap praktik keagamaan orang lain.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber kearifan lokal juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Selain itu, dalam upaya moderasi beragama, kita juga perlu

membuka diri terhadap perspektif global dan menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan aspirasi universal untuk perdamaian dan keadilan.

Dalam tataran ini, untuk menginisiasi kearifan lokal sebagai instrument moderasi beragama dibutuhkan peran pemerintah dalam sosialisasi. Dalam hal ini, perlu digunakan teori difusi inovasi agar pesan-pesan moderasi melalui kearifan lokal dapat diinternalisasi secara merata (Rogers, 1962). Untuk melakukan komunikasi pembangunan agama dengan kearifan lokal sebagai instrumen, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut:

3. Peluang dan tantangan Pemerintah dalam menanamkan konsep Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai.

Dalam menanamkan konsep Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai, Pemerintah akan menghadapi sejumlah peluang dan tantangan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Peluang:

- 1) Keanekaragaman Agama: Kota Tanjung Balai memiliki keragaman agama yang signifikan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Pemerintah untuk memperkuat dialog antarumat beragama dan mempromosikan toleransi serta pengertian antaragama.
- 2) Kearifan Lokal yang Kaya: Kota Tanjung Balai memiliki warisan budaya dan tradisi yang kaya serta nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah dapat memanfaatkan hal ini untuk

memperkaya konsep Moderasi Beragama dengan memasukkan elemen-elemen kearifan lokal dalam pendekatan dan kegiatan yang dilakukan.

- 3) Partisipasi Masyarakat: Masyarakat Kota Tanjung Balai aktif dalam kegiatan keagamaan dan memiliki keterlibatan yang kuat dalam urusan agama. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program Moderasi Beragama, sehingga mendapatkan dukungan dan keterlibatan yang lebih luas.

b. Tantangan:

- 1) Perbedaan Interpretasi Agama: Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah adalah perbedaan interpretasi agama yang ada di masyarakat. Pandangan dan keyakinan yang berbeda-beda dapat menyulitkan upaya mencapai kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan Moderasi Beragama dan bagaimana menerapkannya secara efektif.
- 2) Konflik dan Ketegangan: Kota Tanjung Balai pernah mengalami konflik antaragama di masa lalu. Tantangan bagi Pemerintah adalah mengelola ketegangan yang ada dan membangun kepercayaan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda agar tercipta lingkungan yang harmonis.
- 3) Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Moderasi Beragama dan memperkuat

pemahaman mereka mengenai konsep tersebut memerlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan program-program edukatif yang efektif untuk mencapai tujuan ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti:

- a) Mendorong dialog antaragama dan dialog antarkelompok masyarakat untuk memperkuat pemahaman dan toleransi.
- b) Melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam upaya menjalankan program Moderasi Beragama.
- c) Mengadakan kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan pemahaman antaragama, seperti seminar, lokakarya, atau festival keagamaan.
- d) Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendekatan Moderasi Beragama.
- e) Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai Moderasi Beragama, baik melalui program formal maupun nonformal.

Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antara Pemerintah, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan serta organisasi sosial akan menjadi kunci keberhasilan dalam menanamkan konsep Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai.

Peran tokoh agama sangat strategis dalam mendinginkan suasana

(*Cooling Sistem*) dan dalam mencegah terjadinya perpecahan dalam kontestasi politik menghadapi pemilu tahun 2024 maka sosialisasi ini menjadi penting sebagai upaya cipta kondisi pemilu yang aman, nyaman, damai, dan demokratis, sebagaimana wawancara dengan Tokoh FKUB kota Tanjungbalai "Saya berharap forum kerukunan umat beragama Kota Tanjungbalai dapat terus menatapkan perannya di tengah masyarakat, menjadi jembatan dan wadah dalam memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik sosial dalam masyarakat," katanya. "Semoga FKUB kota Tanjungbalai hari ini dapat membangun kinerja serta mampu membangkitkan semangat kita untuk memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Komunikasi merupakan jembatan utama yang menghubungkan satu sama lain dalam kehidupan sosial. Komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa sayang, mempererat tali silaturahmi dan menciptakan keharmonisan dalam interaksi sehari-hari. Konsep komunikasi Islam memiliki prinsip dan etika yang mendasari bagaimana berkomunikasi secara lebih bermakna dan membawa keberkahan dalam kehidupan (Tahir & Rayhaniah, 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintahan yang dalam tataran ini Pemko Tanjung Balai memegang peran sentral. Dalam tataran ini penulis menarik beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Model komunikasi pembangunan Pemko Tanjung Balai dalam membangun moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai terlihat melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara adat, untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Melalui dialog terbuka dan kerjasama dengan tokoh agama serta kelompok masyarakat, Pemko Tanjung Balai menciptakan lingkungan komunikasi yang mendukung pembangunan moderasi beragama secara bersama-sama.
2. Kearifan lokal di Kota Tanjung Balai menjadi instrumen moderasi beragama melalui nilai-nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Pemerintah dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai landasan untuk menyusun pesan-pesan moderasi yang bersifat kontekstual dan relevan. Nilai-nilai seperti gotong-royong, saling menghormati, dan kerukunan dapat diintegrasikan dalam program

pembangunan untuk membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang moderasi beragama yang berakar pada kearifan lokal.

3. Peluang komunikasi Pemko Tanjung Balai terletak pada kemampuan mereka untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dan menjalin komunikasi yang inklusif. Melalui partisipasi aktif masyarakat, Pemko memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam implementasi moderasi beragama. Namun, tantangan mungkin muncul dalam mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan di kalangan masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, Pemko perlu memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan mencerminkan keberagaman dan keadilan agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Dalam memperkuat model komunikasi Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal, sejumlah saran konstruktif dapat diusulkan:

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Fokus pada upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menyelenggarakan workshop, seminar, dan program edukatif lainnya, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya moderasi beragama dalam konteks kearifan lokal.

2. **Penguatan Keterlibatan Masyarakat:** Aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program moderasi beragama. Pemerintah dapat membentuk forum-forum dialog terstruktur dan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan perwakilan kelompok etnis. Ini dapat menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap inisiatif moderasi beragama.
3. **Memanfaatkan Teknologi dan Media Sosial:** Pemerintah dapat memanfaatkan lebih efektif teknologi dan media sosial sebagai alat komunikasi. Dengan menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama secara kreatif dan informatif melalui platform digital, pemerintah dapat lebih mudah mencapai berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan yang aktif di media sosial juga dapat membangun interaksi dua arah, memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik dan berpartisipasi lebih aktif dalam dialog.
4. **Pendekatan Sensitif Kebudayaan:** Penting untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap keberagaman budaya dan agama di Kota Tanjung Balai. Pesan-pesan moderasi beragama perlu dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan agama, sehingga dapat meresap dengan baik dan diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.
5. **Pemantauan dan Evaluasi Rutin:** Selalu melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap efektivitas model komunikasi. Dengan

memahami respons dan kebutuhan masyarakat secara kontinyu, pemerintah dapat menyesuaikan strategi komunikasi mereka agar tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu.

Dengan menerapkan saran-saran konstruktif ini, Pemerintah Kota Tanjung Balai dapat memperkuat model komunikasinya dalam membangun moderasi beragama, menjadikannya lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Nomor 6). <https://doi.org/10.3390/su14063415>
- Abdillah, M. T., Alamudi, I. A., & Sa'dah, R. T. (2023). Moderasi Beragama Menjawab Intoleransi di Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005. In *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* (Vol. 9, Nomor 2, hal. 1–11). STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi. <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5021>
- Abidin, A. Z. (2021). NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERMENDIKBUD NO. 37 TAHUN 2018. *JIRA: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik*, 2(5). <https://doi.org/10.47387/jira.v2i5.135>
- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Achmad, S. (2022). PEMBELAJARAN BERBASIS LITERASI DIGITAL UNTUK PENGUATAN MODERASI BERAGAMA (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 SALATIGA). In *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* (Vol. 5, Nomor 1, hal. 1–18). IAIN Pontianak. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v5i1.2145>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Aksa, A., & Nurhayati, N. (2020). Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo Di Bima (Tinjauan Sosio-Historis). *Harmoni*, 19(2), 338–352. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.449>
- Al-Mujtahid, N. M., Alfikri, M., & Sumanti, S. T. (2022). Penguatan Harmoni Sosial Melalui Moderasi Beragama dalam Surah Al-Kafirun Perspektif Komunikasi Pembangunan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 531–544. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2042>
- Al-Mujtahid, N. M., & Sazali, H. (2023). REVITALIZATION OF MODERATION MESSAGES IN THE MADINAH CHARTER: Religious Development Communication Studies. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 59–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i1.5301>
- Al-Qarni, 'Aidh. (2008). *Tafsir al-Muyassar*. Qisthi Press.

- Al-Shâbûnî, M. ‘Alî. (n.d.). *Shafwât al-Tafâsîr* (3 ed.). Dâr al-Shâbûnî.
- Al-Thabary, I. J. (2000). *Jamî’ al-Bayân fî Ta’wîl Al-Qur’an* (24 ed.). Daar al-Salam.
- Amin, M., Izomiddin, I., & Anisya, S. (2023). Peran Politik Tokoh Agama pada Pemilu. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16151>
- Arafah, S. (2020). Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural). *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 6(1).
- Arifin, Z. (2021). *Pengantar Komunikasi Islam Prespektif Tadabbur Al-Quran Al-Karim*.
- As-Suyuthi, J., & Al-Mahally, J. M. I. A. (2015). Tafsir Al-Jalalain. *Tafsir jalalain (terjemah)*.
- Ashoumi, H., & Hidayatulloh, M. K. Y. (2022). Internalization of Religious Moderation Values Through Learning Moral Sufism with Implications for Student Association Ethics. *SCHOOLAR: Social and*
- Atasoge, A. D., Aran, A. M., & Sihombing, A. A. (2023). Korke: Rumah Moderasi Beragama Masyarakat Lamaholot di Flores Timur. In *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* (Vol. 9, Nomor 1, hal. 33–47). Office of Religious Research and Development. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1877>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In *Sage Publications*.
- Bachrong, F., & Karim, A. (2022). Assilessureng and Assijigeng: The Concept of Religious Moderation Tomanurunge ri Bacukiki. *Al-Qalam*, 28(1). <https://doi.org/10.31969/alq.v28i1.1031>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai*.
- Bailey, C. A. (2023). A Guide to Qualitative Field Research. In *A Guide to Qualitative Field Research*. <https://doi.org/10.4135/9781071909614>
- Baker, W. (2022). From intercultural to transcultural communication. *Language and Intercultural Communication*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/14708477.2021.2001477>

- Balakrishnan, K., Harji, M. B., & Angusamy, A. (2021). Intercultural communication competence: well-being and performance of multicultural teams. *Journal of Intercultural Communication*, 21(2). <https://doi.org/10.36923/jicc.v21i2.16>
- Baqi, M. F. A. (2009). *al-Mu'jam al-mufahras li-alfaz al-Qur'an al-karim* (4 ed.). Daar al-Fikr.
- Belwawin, H., & Abineno, F. O. (2023). Implikasi Pendidikan Keagamaan Terhadap Moderasi Beragama di SMTK Marturia Sentani Kabupaten Jayapura Tahun 2022. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 8, Nomor 1, hal. 19–28). Universitas Nasional. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i1.1909>
- Bennett, M. R., Parameshwaran, M., Schmid, K., Ramos, M., & Hewstone, M. (2022). Effects of neighbourhood religious diversity and religious and national identity on neighbourhood trust. *Group Processes and Intergroup Relations*, 25(5). <https://doi.org/10.1177/1368430221990095>
- BPS Kota Tanjungbalai. (2023). *Kota Tanjung Balai Dalam Angka 2022*.
- Braslauskas, J. (2021). Developing intercultural competences and creativity: The foundation for successful intercultural communication. *Creativity Studies*, 14(1). <https://doi.org/10.3846/cs.2021.14583>
- Budiono, A. (2021). MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR SURAT AL-BAQARAH: 143). *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 1(01).
- Creswell, J. W. (2020). Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan. In *Mycolological Research*.
- Culler, J. (2023). Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. In *Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature*. <https://doi.org/10.4324/9781003260080>
- Czarniawska, B. (2022). Social Science Research: From Field to Desk. In *Social Science Research: From Field to Desk*. <https://doi.org/10.4135/9781529799613>
- Dai, X., & Chen, G. M. (2017). Conflict management and intercultural communication: The art of intercultural harmony. In *Conflict Management and Intercultural Communication: The Art of Intercultural Harmony*. <https://doi.org/10.4324/9781315266916>
- Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Devi Manoharmayum, D., Habib

- Shah, A., Alekseevna Prodanova, N., Elmirzayevich Mamarajabov, M., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>
- Devadas Pillai, S. (2019). Sociology through literature: A study of Kaaroor's stories. In *Sociology Through Literature: A Study of Kaaroor's Stories*. <https://doi.org/10.4324/9780429288050>
- Dewi, H. P., Yusri, M., & Ridani, R. (2023). Peran Pesantren Modern Dalam Menjawab Tantangan Moderasi Beragama Saat Ini. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(1), 29–34.
- Dyczkowska, J., & Fijałkowska, J. (2022). Model of integrated reporting “concept in practice” in the light of pragmatic constructivist paradigm: case studies of life science companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(8). <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2019-4093>
- Engkizar, E., Kaputra, S., Mutathahirin, M., Syafril, S., Arifin, Z., & Kamaluddin, M. (2022). Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat. *Harmoni*, 21(1), 110–129. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.603>
- Ernstmann, N., Nakata, H., Meurer, L., Weiß, J., Geiser, F., Vitinius, F., Petermann-Meyer, A., Burgmer, M., Sonntag, B., Teufel, M., & Karger, A. (2022). Participative development and evaluation of a communication skills–training program for oncologists—patient perspectives on training content and teaching methods. *Supportive Care in Cancer*, 30(3). <https://doi.org/10.1007/s00520-021-06610-1>
- Faridah, F., Ruslan, R., Muhammad Said, N., & Yusuf, M. (2023). Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.47435/retorika.v5i1.1753>
- Green, M. G., & Piel, J. A. (2015). Theories of human development: A comparative approach. In *Theories of Human Development: A Comparative Approach*. <https://doi.org/10.4324/9781315662466>
- Haavisto, V. E., & Linge, T. T. (2022). Internal crisis communication and Nordic leadership: the importance of transparent and participative communication in times of crisis. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 22(4–5). <https://doi.org/10.1080/15022250.2022.2123038>
- Habibah, F. H., Hidayati, H., Afrizon, R., Putra, A., & Sundari, P. D. (2023). Development Physics Module Based on Project Based Learning Integrated

- with Local Wisdom on Rotational Dynamics and Equilibrium of a Rigid Body. *Journal of Innovative Physics Teaching*, 1(1). <https://doi.org/10.24036/jipt/vol1-iss1/14>
- Hakim, A. L. (2018). Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(1), 19–34. <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.129>
- Hamdani, H. (2020). *PENGOBATAN GOBUK DAN SENI TRADISI MELAYU PESISIR TANJUNGBALAI ASAHAN*.
- Hamka. (2012). *Tafsir al-Azhar* (4 ed.). Pustaka Nasional.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(2), 111–123.
- Hati, L. P., Al-Mujtahid, N. M., Kholil, S., Sahfutra, S. A., Ginting, L. D. C. U., & Fahreza, I. (2023). Religious Harmony Forum: Ideal Religious Moderation in the Frame of Building Tolerance in Medan City , Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 104(4), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.420>
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Hennink, M. M., & Leavy, P. (2015). Understanding Focus Group Discussions. In *Understanding Focus Group Discussions*. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199856169.001.0001>
- Hermans, T. (2014). The manipulation of literature: Studies in literary translation. In *The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation*. <https://doi.org/10.4324/9781315759029>
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1). <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>
- Hofstede, G. (2018). National Culture - Hofstede Insights. In *Hofstede Insights*.
- Holt, D. H., Højlund, H., & Jensen, H. A. R. (2021). Conflict and synergy in health promotion partnerships: a Danish case study. In *Health Promotion International* (Vol. 38, Nomor 4). Oxford University Press (OUP). <https://doi.org/10.1093/heapro/daab189>

- Iftitah Nurul Laily. (2022). Kearifan Lokal adalah Nilai Luhur, Pahami Ciri-Ciri dan Fungsinya. *Katadata.co.id*.
- Irmayanti, I., Panggabean, K. D., & Nasution, A. H. (2022). PEMANFAATAN CERITA RAKYAT SINANDONG GUBANG DALAM PENANAMAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT TANJUNGBALAI. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1). <https://doi.org/10.24114/ph.v7i1.33759>
- Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1). <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1379>
- Islamy, A., & Susilo, A. (2022). Kosmopolitanisme Islam Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia. In *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* (Vol. 3, Nomor 2, hal. 77–88). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i2.412>
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). FIKIH MEDIA SOSIAL DI INDONESIA. *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5(2). <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>
- Jati, W. R. (2023). the Religious Moderation for Indonesia Muslim Middle Class: Challenges and Solutions. *Penamas*, 36(1), 19–36. <https://doi.org/10.31330/penamas.v36i1.647>
- Kaihlanen, A. M., Hietapakka, L., & Heponiemi, T. (2019). Increasing cultural awareness: Qualitative study of nurses' perceptions about cultural competence training. *BMC Nursing*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0363-x>
- Katsir, I. (2018). *Tafsir al-Quran al-Adzim* (7 ed.). Insan Kamil.
- Kautsar, M. S. Al, & Mahmudah, N. (2021). SOCIALIZATION OF THE GRANTING OF INTEGRATION RIGHTS TO NON-HEIRS OF RELIGIOUS MODERATION PERSPECTIVE. ... *Jurnal Moderasi Beragama*.
- Kementrian Kesehatan RI. (2022). Modul pelatihan. *Jangan Belajar*, 1(was), 1–416.
- Khiabany, G. (2021). Is There an Islamic Communication Theory? In *Iranian Media*. <https://doi.org/10.4324/9780203876411-9>
- Khotimah, H. (2020). INTERNALISASI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM PESANTREN. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*,

1(1). <https://doi.org/10.19105/rjpai.v1i1.3008>

Kota Toleran. (2018). *10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah 2018*.

Kumlien, C., Bish, M., Chan, E. A., Rew, L., Chan, P. S., Leung, D., & Carlson, E. (2020). Psychometric properties of a modified cultural awareness scale for use in higher education within the health and social care fields. *BMC Medical Education*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02326-8>

Latief, A. (2023). Tolerance in Strengthening the Values of Religious Moderation. *4th Annual Civic Education Conference (ACEC 2022)*.

Latifa, R., Fahri, M., & Mahida, N. F. (2022). Religious Moderation Attitude: Development Scale. *Journal An-Nafs: Kajian*

Latifah, E., & Umah, K. A. (2022). Moderasi Beragama: Optimalisasi Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan dengan Filantropi Islam. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 6, Nomor 1, hal. 98–103). Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.397>

Lede, Y. U. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Penanaman Nilai Budaya Lokal Tama Umma Kalada. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(1). <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.627>

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2016). The Constructivist Credo. In *The Constructivist Credo*. <https://doi.org/10.4324/9781315418810>

Lusia, E., Benawa, A., Alwino, A., Irawan, I., & Kusumajati, D. A. (2023). Evaluation of the Performance Character of SPIRIT Value Through Pancasila Education During the Covid-19 Pandemic. In *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies* (Vol. 150). https://doi.org/10.1007/978-3-031-17548-0_10

Machwate, S., Bendaoud, R., Henze, J., Berrada, K., & Burgos, D. (2021). Virtual exchange to develop cultural, language, and digital competencies. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13115926>

Maharani, M. S., & Rahmانيar, Y. (2023). Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah. In *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 8, Nomor 1, hal. 51). STAIN Curup. <https://doi.org/10.29240/belajea.v8i1.6436>

Mailin, M. (2017). Akulturasi Nilai Budaya Melayu Dan Batak Toba Pada Masyarakat Melayu Kota Tanjungbalai Asahan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 41(1), 155–173. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.328>

- Manalu, S. R. (2023). Religious Moderation in the Scope of Globalization and Multiculturalism in Indonesia. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison*
- Media Indonesia. (2022). *Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (Vol. 30, Nomor 25).
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif/penulis. *Prof. DR. Lexy J. Moleong, MA (edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morgan, D. L. (2020). Basic and Advanced Focus Groups. In *Basic and Advanced Focus Groups*. <https://doi.org/10.4135/9781071814307>
- Muhtadi, A. S. (2019). Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama. *Conference Proceeding ICONIMAD 2019*, 275, 1.
- Mukhibat, M., Istiqomah, A. N., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan). In *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* (Vol. 4, Nomor 1, hal. 73–88). STAIN Ponorogo. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>
- Musi, M. A., Muh. Yusri Bachtiar, Herlina, & Sitti Nurhidayah Ilyas. (2022). Local Wisdom Values of the Bugis Community in Early Childhood Multicultural Learning. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 10(2). <https://doi.org/10.23887/paud.v10i2.50622>
- Nashohah, I. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Penguatan Karakter dalam Masyarakat Heterogen. *Prosiding Nasional*, 4(November).
- Natonis, H. Y., Leobisa, J., Sitopu, R., Udju, A. H., Hutabarat, O., Tomatala, S., & Saingo, Y. A. (2023). Sosialisasi Moderasi Beragama di SMP Kristen Ta'aba Malaka. In *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 3, Nomor 1, hal. 106–113). Indonesian Scientific Journal. <https://doi.org/10.25008/altifani.v3i1.325>
- Noor, H. (2023). Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum di Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*,

- 17(1). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1811>
- NU Online. (2023). *4 Indikator Moderasi Beragama yang Tampak di Sejumlah Lembaga*.
- Nuridin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Olsen, J., & Pilson, A. (2022). Developing Understandings of Disability through a Constructivist Paradigm: Identifying, Overcoming (and Embedding) Crip-Dissonance. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 24(1). <https://doi.org/10.16993/sjdr.843>
- Pangestu, R., Akmansyah, M., & ... (2022). Strengthening Religious Moderation Through Internalization Islamic Education Values In Islamic Boarding School.
- Pilarska, J. (2021). The constructivist paradigm and phenomenological qualitative research design. In *Research Paradigm Considerations for Emerging Scholars*. <https://doi.org/10.21832/9781845418281-008>
- Pinkas, B., Schneider, T., Tkachenko, O., & Yanai, A. (2019). Efficient circuit-based PSI with linear communication. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11478 LNCS. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17659-4_5
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). AKOMODASI KULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK BERNUANSA AGAMA DI INDONESIA. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>
- Prihana, E., Ngadisah, Labolo, M., & Kusworo. (2020). Sundanese Culture Local Wisdom Based Leadership: The Dynamics of Government Leadership of Purwakarta Regent Period 2008-2018. *International Journal of Science and Society*, 2(1). <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i1.71>
- Qurtubi, A. A. A. M. A. (2002). *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- R'boul, H. (2022). Epistemological plurality in intercultural communication knowledge. *Journal of Multicultural Discourses*, 17(2). <https://doi.org/10.1080/17447143.2022.2069784>
- Raharjo, A. B. (n.d.). RELIGIOUS MODERATION MOVEMENT AS THE EVALUATION AND DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION: Efforts to Apply Islamic Shari'a Rahmatan lil alamin.

prosiding.icaismuh.org.

- Rahma, S. A. Al. (2021). *TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ad9n>
- Rahman, W. A. (2021). Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman. In *El Madani : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* (Vol. 2, Nomor 2, hal. 237–260). Institut PTIQ Jakarta. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v2i02.294>
- Rahmayuni, D., & Hidayat, H. (2020). Hierarki Pengaruh Isu-Isu Moderasi Beragama pada Media Guo Ji Ri Bao 国际日报 Studi Kasus Berita Konflik Etnis Uighur di Xinjiang. In *Jurnal Studi Jurnalistik* (Vol. 2, Nomor 1, hal. 1–24). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://doi.org/10.15408/jsj.v1i2.14568>
- Ramdani, Z., Natanel, Y., & Busro, B. (2022). the Role of Religious Moderation on Life Satisfaction of Generation Z Muslims. *Penamas*, 35(2), 187–198. <https://doi.org/10.31330/penamas.v35i2.627>
- Rani, L., & Maarif, S. (2021). Development E-Module Three Variables Linear Equations System Based On Mathematic Communication. *Journal of Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang*, 5(2). <https://doi.org/10.31331/medivesveteran.v5i2.1707>
- Rasyid, M. (2022). REINVENTING RELIGIOUS MODERATION IN INDIA THROUGH SUFI CONTENT IN BOLLYWOOD MUSIC VIDEO. *Mahakarya: Student's Journal of Cultural Sciences*.
- Ridwan, M. (2021). PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKOLAH KEJURUAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. In *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. 2, Nomor 1, hal. 1–10). IAIN Palu. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol2.iss1.35>
- Rifandanu, F., Dani, W. N. R., & Baidhowi. (2022). Moderasi Beragama Tinjauan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Ibadah Umat Islam di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. In *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (Vol. 25, Nomor 2, hal. 263–278). State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.263-278>
- Riyadi, A., Hamid, N., & Saerozi, S. (2022). Internalization of Religious Tolerance Through Cross-Cultural Dialogue in Kendal's Art Performances.

International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, 24(2).
<https://doi.org/10.21580/ihya.24.2.11377>

Robot, M. (2023). The Wall of The House As The Grammar of Diversity (Catolic and Islamic Communication Model In Ntaram). *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(07).
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i07.344>

Rogers, E. (1962). Difussion of Innovations (First Edition). In *The Free Press, New York*.

Rorong, M. J. (2019). Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi. *Commed : Jurnal Komunikasi dan Media*, 4(1), 90–107.
<https://doi.org/10.33884/commed.v4i1.1417>

Rozak, A. (2008). KOMUNIKASI LINTAS AGAMA: Media Sosial Pembentukan Masyarakat Sipil. *Jurnal Dakwah*, IX(1).

Rudzki, E. N., Kuebbing, S. E., Clark, D. R., Gharaibeh, B., Janecka, M. J., Kramp, R., Kohl, K. D., Mastalski, T., Ohmer, M. E. B., Turcotte, M. M., & Richards-Zawacki, C. L. (2022). A guide for developing a field research safety manual that explicitly considers risks for marginalized identities in the sciences. *Methods in Ecology and Evolution*, 13(11).
<https://doi.org/10.1111/2041-210X.13970>

Rumahuru, Y. Z. (2021). Pendidikan agama inklusif sebagai fondasi moderasi beragama: Strategi merawat keberagaman di Indonesia. *KURIOS*, 7(2).
<https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.323>

Sar, D. C., Anwar, K., Ali, A. H. bin, Dorloh, S., & ... (2022). INTERNALIZATION OF RELIGIOUS MODERATION IN THE DIGITAL ERA TO CONSTRUCT QUALITY CULTURE IN HIGHER EDUCATION. *PROCEEDINGS*

Saumantri, T. (2022). Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat Agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(2).
<https://doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>

Sazali, H., Guntoro, B., Subejo, & Partini, S. U. (2015). “ ANALISIS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN AGAMA ” (Studi Pemerintahan Kota Bogor). *Jurnal Komunikasi Profetik*, 08(02), 37–50.

Shihab, M. Q. (2015). *Tafsir al-Mishbah* (2 ed.). Lentera Hati.

Sholikah, S. A. (2022). EVALUASI PENERAPAN MODERASI BERAGAMA TERHADAP SIKAP BERAGAMA PESERTA DIDIK DI SMP PGRI

- KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO. In *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 6, Nomor 1, hal. 107). STAI Mahad Aly Al-Hikam Malang. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.863>
- Siahaan, H. E. R., & Kause, M. (2022). Hospitalitas sebagai Hidup Menggereja dalam Bingkai Moderasi Beragama di Indonesia. In *Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* (Vol. 2, Nomor 2, hal. 232–240). Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya. <https://doi.org/10.54170/dp.v2i2.146>
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). Metodologi penelitian survey sosial. In *Jakarta: LP3ES*.
- Singhal, M., Ling, C., Paudel, P., Thota, P., Kumarswamy, N., Stringhini, G., & Nilizadeh, S. (2023). SoK: Content Moderation in Social Media, from Guidelines to Enforcement, and Research to Practice. *Proceedings - 8th IEEE European Symposium on Security and Privacy, Euro S and P 2023*. <https://doi.org/10.1109/EuroSP57164.2023.00056>
- Siregar, E. S. (2022). Sikap Moderasi Beragama Komunitas Islam dan Kristen: Studi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II. In *Islam & Contemporary Issues* (Vol. 2, Nomor 2, hal. 37–43). Medan Resource Center. <https://doi.org/10.57251/ici.v2i2.540>
- Suarnaya, I. P. (2021). MODEL MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA PEGAYAMAN KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 4(1). <https://doi.org/10.36663/wspah.v4i1.239>
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 95–112. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sufah, F., Latipah, E., & Izzah, I. (2023). Early Adult Psychosocial: Synthesizing Erick Erikson's Theory in Islamic Concepts. *ISLAMIKA*, 5(3). <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3605>
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sumpena, D., & Jamaludin, A. N. (2020). Pluralistic Da'wah Model in Maintaining Religious Tolerance in Bekasi. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 14(2). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i2.10219>
- Supriyanto, S. (2022). Principles Of Compassion In The World Religions For Coexistence Among Religions In The Perspective Of Karen Armstrong. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 13(02). <https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2663>

- Surbakti, N. (2019). BELAJAR MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL DARI YESUS DALAM MATIUS 22:32. *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN*, 1(2). <https://doi.org/10.35909/visiodei.v1i2.31>
- Suryana, D., & Hilmi, F. (2023). Educating for Moderation: Internalization of Islamic Values in Shaping Religious Tolerance in Vocational High Schools. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*.
- Susanti, S. (2022). MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. In *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* (Vol. 6, Nomor 2, hal. 168–182). IAI Muhammadiyah Bima. <https://doi.org/10.52266/tajid.v6i2.1065>
- Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., & Rahman, A. (2020). Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1), 1–13.
- Tanjung, S. R. (2022). Implementasi Moderasi Beragama pada Program kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Umat Beragama. *Kompetensi*, 7(1). <https://doi.org/10.47655/kompetensi.v7i1.22>
- Tanjungbalai, P. K. (2002). *PPKD tanjungbalai*.
- Taufani. (2018). Pemikiran Pluralisme Gusdur. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(2), 198–217.
- Telaumbanua, S. R. K., Harahap, M. Y., Aceh, I. R. N., Herman⁴, N., & Arli, W. (2023). Moderasi Beragama Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Desa Sibolangit. In *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* (Vol. 5, Nomor 4, hal. 2353–2359). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.2228>
- Tuju, R. S., Robandi, B., & Sinaga, D. C. (2022). Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2). <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.240>
- Uge, S., Neolaka, A., & Yasin, M. (2019). Development of social studies learning model based on local wisdom in improving students' knowledge and social attitude. *International Journal of Instruction*, 12(3). <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12323a>
- Wahyudin, D. (2023). RELASI AGAMA, MEDIA DAN NARASI MODERASI BERAGAMA PADA GENERASI Z DI TULUNGAGUNG. In *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* (Vol. 23, Nomor 1, hal. 131–148). IAIN Tulungagung. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2023.23.01.131-148>

- Widyatwati, K., Dienaputra, R. D., Suganda, D., & Mamun, T. N. (2021). The Teachings of Character in Local Wisdom Study On: Labuhan Alit Parangkusumo Rituals. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3). <https://doi.org/10.33403/rigeo.800517>
- Wright, A. L., Middleton, S., Hibbert, P., & Brazil, V. (2020). Getting On With Field Research Using Participant Deconstruction. *Organizational Research Methods*, 23(2). <https://doi.org/10.1177/1094428118782589>
- Yusuf, M. Z., & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama. In *Dialog* (Vol. 45, Nomor 1, hal. 127–137). Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.535>
- Zuhri, S., Herawan, T., Wening, N., & Harsono, M. (2019). A review on human resource management based on local wisdom. In *Journal of Advanced Research in Law and Economics* (Vol. 10, Nomor 6). [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.6\(44\).18](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.6(44).18)